

SERI GLOSARIUM

GLOSARIUM POLITIK



PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Seri Glosarium: GL 023

GLOSARIUM
POLITIK

HADIAH IKHLAS

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Seri Glosarium: GL

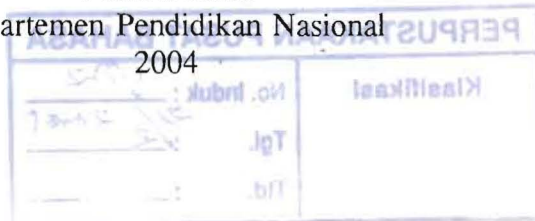
GLOSARIUM POLITIK

Penanggung Jawab
Dendy Sugono

Penyunting
Haryadi
Cormentyna Sitanggang



Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
2004



GLOSARIUM POLITIK

ISBN 979 685 464 3

Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV
Rawamangun, Jakarta 13220

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

320.031

GLO

G Glosarium Politik/Haryadi dan Cormentyna Sitanggang.--Jakarta:
Pusat Bahasa, 2004

ISBN 979 685 464 3

1. POLITIK-PERISTILAHAN

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi	No. Induk : 402
PB	Tgl. 21/2 2005
320.014	Ttd. : Elm
GLO g	

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA

Peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia harus dipacu untuk mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang amat pesat. Pengalihan konsep-konsep baru dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia harus diprioritaskan. Untuk itu, kerja sama negara serumpun memang memiliki kontribusi yang besar dalam upaya percepatan penyusunan istilah dalam bahasa Indonesia.

Melalui kerja sama Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim), Pusat Bahasa, dengan bantuan para pakar dari berbagai perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia, telah menyusun istilah kehutanan. Istilah itu dihimpun dalam senarai dan diterbitkan sebagai hasil pembakuan peristilahan yang telah dicapai selama ini. Terbitan dalam bentuk glosarium ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, khususnya dalam penyusunan buku teks, makalah, atau karangan ilmiah lainnya, atau perkuliahan di perguruan tinggi.

Glosarium Politik ini pun diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat pemakainya. Saran-saran perbaikan dari para pemakai buku ini untuk penerbitan berikutnya kami nantikan. Akhirnya, kepada Drs. Haryadi, M.Sc., dan Dra. Cormentya Sitanggang yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan keahliannya sebagai penyunting buku ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Di samping itu, kami pun menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Endang Supriatin yang ikut terlibat di dalam penyusunan istilah politik ini dalam kaitannya dengan Mabbim.

Mudah-mudahan *Glosarium Politik* ini bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jakarta, 22 November 2004

Dendy Sugono

PRAKATA

Glosarium Politik ini merupakan hasil penghimpunan dan pengembangan peristilahan Indonesia dari berbagai cabang ilmu di bidang politik, yang meliputi administrasi publik, ekonomi politik, hubungan internasional, politik perbandingan, dan teori filsafat politik. Berhubung beberapa keterbatasan, cabang ilmu yang telah digarap terbatas pada cabang-cabang ilmu tersebut. Diharapkan pada masa mendatang cabang-cabang ilmu lain dapat melengkapi daftar istilah bidang politik ini. Upaya penghimpunan, pembahasan, dan pengembangan yang dikelola oleh Pusat Bahasa ini secara intensif dilakukan dalam kurun waktu empat tahun melalui enam kali rapat kerja dan kemudian dibahas dalam Sidang Pakar Mabbim sejak 1995 sampai dengan tahun 1998.

Entri yang digunakan dalam penyusunan istilah ini berasal dari bahasa sumber, bahasa Inggris. Dengan demikian, sumber rujukan yang digunakan adalah buku atau terbitan daftar istilah atau glosarium cabang ilmu dengan bahasa Inggris dan/atau dari buku-buku teks cabang ilmu yang terkait. Selain itu, entri juga berasal dari istilah yang sudah sangat biasa digunakan dalam bahasa Indonesia dan sudah diketahui pula padanannya dalam bahasa Inggris.

Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang ilmu dalam bidang politik telah melibatkan banyak orang, sesuai dengan spesialisasi keahlian yang diperlukan, bekerja sebagai dosen dan peneliti di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Mereka yang telah menyumbangkan kepakarannya antara lain Drs. Soegiono, M.A., Drs. Ary Bainus, M.A., Dra. Nuri Suseno, M.Si., Dr. Andi Mallarangeng, Dr. Chusnul Mariyah, Drs. A.A. G. Wisnumurti, M.Si., Drs. Haryadi, M.Si., dan Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira.

Penyusunan istilah bidang perhutanan ini telah pula dipermudah oleh bantuan kebahasaan yang disumbangkan oleh pakar bahasa dari Pusat Bahasa, yaitu Dr. Sri Sukesi Adiwimarta dan Dra. Meity Taqdir Qodratillah, M.Hum. Selain itu, Pusat Bahasa pun menyediakan tenaga yang memperlancar, yakni Dra. Cormentya Sitanggang, Dra. Lien Sutini, Drs. Fairul Zabadi, Dra. Hari Sulastri, dan Dra. Wiwiek Dwi Astuti, M.M., yang bertindak sebagai sekretaris dan Drs. Dedi Puryadi dalam bantuan logistik.

Daftar istilah yang disajikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati kami mengharapkan adanya saran dan kritik perbaikan dari berbagai pihak sehingga daftar istilah ini menjadi semakin bermanfaat bagi pengguna.

Kepada semua pihak yang telah memungkinkan penghimpunan, penyusunan, sampai penerbitan *Glosarium Politik* ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Jakarta, 22 November 2004

Penyunting

A

abatement of action	pemberhentian tindakan
absolute monarchy	monarki mutlak/absolut
absolution	pengampunan
absolutism	absolutisme
access by outsider	capaian/akses pihak luar
accountability deficit	defisit akuntabilitas
accountability procedure	prosedur akuntabilitas
accountable administrator	administrator akuntabel
accountable management	manajemen akuntabel
accountable public manager	manajer publik/umum akuntabel
accrual accounting	akuntansi tunggakan
action program	program aksi tindakan
activity of government	kegiatan/aktivitas pemerintah
ad hoc authority	otoritas/kewenangan ad hoc
administration of justice	administrasi peradilan
administrative accountability	akuntabilitas administrasi
administrative action	tindakan administrasi
administrative agency	agensi administrasi
administrative autonomy	otonomi administrasi
administrative behaviour	perilaku/tingkah laku administrasi
administrative capacity	kapasitas/kemampuan administrasi
administrative centralisation	pusatan/sentralisasi administrasi
administrative change	perubahan administrasi
administrative characteristics	ciri-ciri/karakteristik administrasi
administrative competence	kecakapan/kompetensi administrasi
administrative control	kontrol/pengendalian administrasi
administrative control instruments	instrumen kontrol administrasi
administrative control mechanisms	mekanisme kontrol/pengendalian administrasi

administrative county • administrative responsibility

administrative county	kawasan kecamatan
administrative culture	budaya/kultur administrasi
administrative decentralisation	desentralisasi administrasi
administrative depression	depresi administrasi
administrative development	pembangunan administrasi
administrative district	kawasan kabupaten
administrative doctrine	doktrin administrasi
administrative domain	domain administrasi
administrative effectiveness	efektivitas/keefektifan administrasi
administrative efficiency	efisiensi administrasi
administrative ethics	etika administrasi
administrative features	fitur/sifat-sifat administrasi
administrative hierarchy	hierarki administrasi
administrative intervention	campur tangan/intervensi administrasi
administrative issue	isu administrasi
administrative jurisdiction	yurisdiksi administrasi
administrative law	undang-undang/hukum administrasi
administrative leadership	kepemimpinan administrasi
administrative legislation	legislasi administrasi
administrative mission	misi administrasi
administrative neutrality	netralitas administrasi
administrative officer	pejabat administrasi
administrative organisation	organisasi administrasi
administrative paradigm	paradigma administrasi
administrative policy	kebijakan administrasi
administrative policy making	pembuatan kebijakan administrasi
administrative politics	politik administrasi
administrative procedure	prosedur administrasi
administrative procedure act	akta prosedur administrasi
administrative protocol	protokol administrasi
administrative reform	pembaruan/reformasi administrasi
administrative regulation	peraturan/regulasi administrasi
administrative regulatory agency	agensi pengatur administrasi; agensi regulatori administrasi
administrative resource	sumber daya administrasi
administrative responsibility	tanggung jawab administrasi

administrative restructuring • ambiguous role

administrative restructuring	penstrukturan kembali/restrukturisasi administrasi
administrative review commission	komisi peninjauan/review administrasi
administrative rule	aturan administrasi
administrative structures	struktur administrasi
administrative theory	teori administrasi
administrative welfare	kesejahteraan administrasi
administrativism	administrativisme
advisory agency	agensi penasihat
advisory board	dewan penasihat
advisory committee	komite penasihat
advisory council	majelis penasihat
advocacy	advokasi
affirmative action	tindakan afirmatif
agency corporate plan	rencana korporat agensi
agency network	jaringan agensi
agency problem	masalah/problem agensi
agenda building	pembentukan agenda
agenda dynamic	dinamik/dinamika agenda
agenda management technique	teknik manajemen agenda
agenda of government	agenda pemerintah
agenda setting	penetapan agenda
agenda-setting process	proses penetapan agenda
agent of change	agen perubahan
agricultural policy	kebijakan pertanian
agricultural productivity	produktivitas pertanian
agricultural subsidy	subsidi pertanian
aids to small business	bantuan (pada) pengusaha kecil
alternative development	pembangunan; pengembangan alternatif
alternative dispute resolution	resolusi perselisihan alternatif
alternative growth	pertumbuhan alternatif
alternative option	opsi alternatif
alternative policy	kebijakan alternatif
ambiguous role	peran takjelas; peran mendua

amoral bureaucracy • autonom

amoral bureaucracy	birokrasi tak bermoral/amoral
analysis of problem	analisis masalah
analytical habit	kebiasaan analitis
annual planning cycle	siklus perencanaan tahunan
annually recurrent	berulang setiap tahun
anomaly	anomali
anticipatory government	pemerintah bayangan/antisipatori
anti-corruption	antikorupsi
Anti-Corruption Bureau	Biro Antikorupsi; Badan Pencegah Korupsi
anti-corruption commission	komisi antikorupsi
anti-corruption law	undang-undang/hukum antikorupsi
appeals procedure	prosedur banding/himbauan
appellate jurisdiction	jurisdiksi banding/penghimbauan
appointive authority	kewenangan/otoritas melantik
appropriateness	kepatutan; kelayakan; kepantasan; ke- sesuaian
appropriation hearings	dengar pendapat peruntukan
appropriation process	proses peruntukan
aptitude test	uji kecerdasan
aspect of implementation	aspek pelaksanaan/implementasi
assessing risk	pengasesan risiko
assessing the environment	penaksiran lingkungan
Audit Commission	Komisi Audit
auditor general	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; auditor umum
authorisation hearings	dengar pendapat pemberian kuasa
authorisation legislation	legislasi kewenangan
authoritative	otoritatif; sah
authorization legislation	legislasi otorisasi
autonom	otonom

B

backward mapping
bad government
balanced development
balanced score card
banishing bureaucracy

banking program
basic decision
basic guideline
basic philosophy
basic strategy
behaviour theory
behaviouralism
benchmarking
benevolent autocracy
blue collar worker
body politic
bossism
boundary analysis
bounded rationality
brainstorming
bribery
buck passing
budget allocation
budget authority
budget committee
budget coordination

pemapan ke belakang
pemerintahan buruk
pembangunan berimbang/seimbang
kartu skor berimbang/ seimbang
penghalauan birokrasi; birokrasi ter-
halau
program perbankan
keputusan dasar
garis panduan; pedoman dasar
falsafah dasar
strategi dasar
teori perilaku/kelakuan/tingkah laku
behavioralisme
penolakan
otokrasi baik hati/murah hati
pekerja kerah biru
kelompok politik
bosisme
analisis batas
rasionalitas terikat
sumbang saran
suap
penyerahan beban tugas
alokasi anggaran
kewenangan anggaran
komisi anggaran
koordinasi anggaran

budget cuts • bureaucratic secrecy

budget cuts	pemotongan anggaran
budget maximising	pemaksimalan anggaran
budget process	proses anggaran
budget reform	pembaruan/reformasi anggaran
budgetary cycle	siklus anggaran
budgetary decentralisation	desentralisasi anggaran
budget-making	pembuatan anggaran
burden of taxes	beban pajak
bureau movement	usaha progresif kaum reformis
bureaucracy corruption	korupsi birokrasi
bureaucracy performance	kinerja birokrasi
bureaucratic absolutism	absolutisme birokratik
bureaucratic allies	sekutu birokratik
bureaucratic autonomy	otonomi birokratik
bureaucratic characteristics	ciri-ciri/karakteristik birokrasi
bureaucratic corruption	korupsi birokratik
bureaucratic culture	budaya/kultur birokrasi
bureaucratic dysfunction	disfungsi birokrasi
bureaucratic efficiency	keefisienan/efisiensi birokrasi
bureaucratic features	sifat-sifat birokrasi
bureaucratic ideology	ideologi birokrasi
bureaucratic impersonality	impersonalitas birokratik
bureaucratic inertia	kelembapan/inersia birokrasi
bureaucratic lag	kelambanan birokrasi
bureaucratic leader	pemimpin birokrasi
bureaucratic leadership	kepemimpinan birokrasi
bureaucratic mode of production	mode produksi birokrasi
bureaucratic model of public administration	model birokratik administrasi publik
bureaucratic network	jaringan/rangkaian birokrasi
bureaucratic participation	partisipasi/keikutsertaan birokrasi
bureaucratic perception	persepsi birokratik
bureaucratic politics	politik birokrasi
bureaucratic power	kekuasaan birokrasi
bureaucratic responsibility	tanggung jawab administrasi/birokrasi
bureaucratic secrecy	kerahasiaan birokrasi

bureaucratic technical superiority • business-state linkage

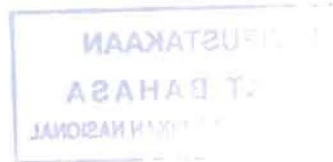
bureaucratic technical superiority	keunggulan/superioritas teknis birokrasi
bureaucratisation	birokratisasi
bureaupathic behaviour	tingkah laku/perilaku biropasi
bureaupathology	biro patologi
business briefing	taklimat bisnis/niaga
business management	manajemen bisnis
business reform	reformasi bisnis/niaga
business regulation	regulasi/pengaturan bisnis
business regulatory policy	kebijakan pengaturan bisnis/niaga
business society	masyarakat bisnis
business-state linkage	(per)kaitan bisnis-negara

C

cabinet minister	menteri kabinet
cabinet secretary	sekretaris kabinet
cabinet-level departments	departemen tingkat/peringkat kabinet
calculative phase	fase kalkulatif
capacity-building	pengembangan kapasitas
capital improvement programme	program peningkatan modal
capital works spending	pembelajaan kerja modal
capitalisation policy	kebijakan permodalan/kapitalisasi
career development	pengembangan karier
carrier service	pelayanan karier
casework	kerja kasus
catalytic government	pemerintah katalitik
central agency	agensi pusat
central audit	audit pusat
central committee	komite pusat
central government	pemerintah pusat
central processing system	sistem pemrosesan pusat
central processing unit	unit/satuan pemrosesan pusat
centralised bureaucracy	birokrasi terpusat
central-local partnership	kemitraan pusat-daerah/lokal
centre periphery relations	hubungan pusat pinggiran
chancellor of the exchequer	menteri/kanselir keuangan
change agency	agensi perubahan
charismatic authority	otoritas/kewenangan karisma
checks and balances	<i>checks and balances</i>
child labor	buruh anak-anak
city council	dewan kota
city government	pemerintah kota

civic organization • coherent report

civic organization	organisasi sivik; organisasi masyarakat
civil commotion	kegemparan sipil
civil rights act	akta hak sipil
civil rights policy	kebijakan hak sipil
civil service excellence	kecemerlangan/keunggulan pegawai negeri sipil
civil service excellence award	anugerah keunggulan/kecemerlangan pegawai negeri sipil
civil service level	peringkat/level pegawai negeri sipil
civil service neutrality	netralitas pegawai negeri sipil
civil service reduction	pengurangan pegawai negeri
civil service reform	reformasi pegawai negeri
civil service regulations	peraturan pegawai negeri sipil
civil service restructuring	penstrukturan kembali/restrukturisasi pegawai negeri sipil
civil service review	peninjauan kembali pegawai negeri sipil
civil service system	sistem kepegawaian negeri
classification act	akta klasifikasi
clean government	pemerintahan yang bersih
clien focus	fokus klien/pelanggan
cliente	klien/pelanggan
cliente agency	agensi klien/pelanggan
cliente charter	piagam klien/pelanggan
client's charter	piagam pelanggan
clinical relationship	hubungan klinis
clinical training programme	program latihan klinis
clinical utility	utilitas klinis
closed-loop system	sistem lingkaran tertutup
coalition building	pembangunan koalisi
coalition government	pemerintah koalisi
code of behaviour	kode tingkah laku/peri laku
code of conduct	kode perilaku
coercive power	kekuasaan paksaan
cognitive aspect	aspek kognitif
coherent report	laporan koheren



collective action • comparative public policy

collective action	tindakan kolektif
collective decision	keputusan kolektif
collective purpose	tujuan/sasaran kolektif
collective responsibility	pertanggungjawaban kolektif
colonial administration	administrasi/pemerintahan kolonial/ penjajah
colossal plan	rencana kolosal/rencana raksasa
command and control	komando dan kontrol/perintah dan pengawasan
command and control agency	agensi perintah dan pengawasan; agensi komando dan kontrol
command and control approach	pendekatan perintah dan pengawasan
command and control mechanism	mekanisme perintah dan pengawasan
command and control regulation system	sistem pengaturan perintah dan pe- ngawasan
common consent	persetujuan umum
common fund	dana umum
common good	kebaikan bersama
common market	pasaran bersama
common regulation	peraturan umum
communication breakdown	kerusakan komunikasi
communication climate	iklim komunikasi
communication gap	kesenjangan komunikasi
communication process	proses komunikasi
communication skill	kemahiran/keterampilan/keahlian ko- munikasi
community action program	program tindakan masyarakat
community-owned government	pemerintah milik masyarakat/komu- nitas
commuted pension gratuity	persentase pensiun komune
comparative administration	perbandingan administrasi
comparative policy analysis	analisis kebijakan komparatif/per- bandingan
comparative public administration	administrasi publik perbandingan
comparative public policy	kebijakan publik perbandingan

compensation system • continuous dialogue

compensation system	sistem ganti rugi/kompensasi
compensatory damage	kerusakan pampasan/ganti rugi
competitive business	bisnis kompetitif
competitive government	pemerintahan kompetitif
competitive neutrality	netralitas kompetitif
competitive regulatory policy	kebijakan pengaturan kompetitif
complexity management	manajemen kompleksitas
compliance agency	agensi kepatuhan
compliance audit	audit pemenuhan
compliance of implementor	kepatuhan pelaksana
compulsory policy instrument	instrumen kebijakan wajib
confirmation of results	konfirmasi hasil
conflict of interest	konflik kepentingan
conflict resolution	resolusi/penyelesaian konflik
congestion tax	pajak kesesakan
congressional oversight	pengawasan kongres
consequential imperative	keharusan konsekuensial
conservative policy	kebijakan konservatif
constituency group	kelompok pemilih/konstituensi
constitutional amendment	amendemen konstitusi
constitutional architecture	arsitektur konstitusional
constitutional arrangement	penyusunan konstitusi
constitutional detail	rincian/detail konstitusi
constitutional monarchy	monarki/kerajaan konstitusional
consultative council	dewan perundingan/konsultatif
consumer expectation	harapan konsumen/pelanggan
consumer protection	perlindungan konsumen/pelanggan
consumer segmentation	segmentasi konsumen
consumer survey	survei konsumen
content of policy	isi kebijakan
contestability	kemampuan berkompetisi
context of implementation	konteks implementasi/pelaksanaan
contextual framework	rangka kerja kontekstual
contingency model	model kontingensi
contingency theory	teori kontingensi
continuous dialogue	dialog berlanjut

continuous improvement • criminal policy

continuous improvement	perbaikan lanjutan
contract management	manajemen kontrak
contract model	model kontrak
contracting out	kontrak ke luar
contractualism	kontraktualisme
contrived randomness	keacakan tersusun
control of pollution	pengawasan polusi
control strategy	strategi kontrol/pengawasan
coordination of division	koordinasi pembagian/divisi
corporate analysis	analisis korporat
corporate cycle	siklus korporat
corporate finance	keuangan korporat
corporate financial analysis	analisis keuangan korporat
corporate governance	tata kelola pemerintahan korporat/ kepemerintahan korporat
corporate headquarter	markas besar korporat; kantor pusat korporat
corporate resources	sumber daya korporat
corporate responsibility	tanggung jawab korporat
corporate strategic planning	perencanaan strategik korporat
corporate target	sasaran/target korporat
corporatism	korporatisme
corporatization	korporatisasi
corrective action	tindakan perbaikan/korektif
cost accounting	akuntansi biaya
cost-benefit	biaya manfaat/untung rugi
cost-benefit analysis	analisis biaya manfaat/untung-rugi
council manager	manajer dewan
council member	anggota dewan
Council of Economic Advisors	Dewan Penasihat Ekonomi
council of government	dewan pemerintah
Council of Ministers	dewan menteri
county council	dewan daerah
creative decision	keputusan kreatif
criminal offence	pelanggaran kriminal
criminal policy	kebijakan kriminal

crisis policy • cybernetic model

crisis policy	kebijakan krisis
criteria policy	kriteria kebijakan
critical interaction	interaksi kritis
critical public policy	kebijakan publik kritik/kritis
cross-national public policy	kebijakan publik lintas-negara
cross-national variation	variasi lintas nasional/negara
cross-subsidies	subsidi silang
cultural diversity	diversitas/keragaman budaya/kultural
cultural issue	isu budaya/kultur
cultural policy	kebijakan kultur/budaya
cultural problem	masalah/hal budaya/kultur
current status	status umum
customer care	pemedulian pelanggan
customer focus	tumpuan/fokus pelanggan
customer satisfaction	kepuasan pelanggan
customer-driven government	pemerintah dipandu pelanggan; pem- erintah terteral pelanggan; peme- rintah beorientasi pelanggan
cybernetic model	model sibermetik

D

day-by-day management	manajemen sehari-hari
debt repayment	pembayaran kembali utang
decentralised decision-making	pengambilan keputusan terdesentralisasi
decentralised government	pemerintah desentralisasi
decentralized government	pemerintahan terdesentralisasi
decision criteria	kriteria keputusan
decision game	permainan penentu
decision horizon	horizon penentuan
decision-making	pembuatan keputusan
decision-making machinery	mesin pembuat keputusan
decision-rule	aturan keputusan
decision-theoretic evaluation	evaluasi teoritik keputusan
decremental budget	anggaran dekremental/bertambah
default powers	kekuasaan default
defence policy	kebijakan pertahanan
definition of issue	definisi isu
definition of problem	definisi masalah
delegation of authority	delegasi wewenang/otoritas
demand-side role	peran sisi-permintaan
democratic institution	lembaga demokratik/institusi demokratik
democratic public administration	administrasi publik/negara demokratik
demotivation	demotivasi
denationalisation	denasionalisasi
departmental accountability	akuntabilitas departemen
departmental allocation	alokasi departemen

departmental budget • disposition of implementor

departmental budget	anggaran departemen
departmental culture	kultur/budaya departemen
departmental expenditure	pengeluaran/belanja departemen
departmental inspector	pemeriksa/inspektur departemen
departmental objective	sasaran departemen
departmental plan	rencana departemen
departmental policy	kebijakan departemen
departmental responsibility	tanggung jawab departemen
departmental rivalry	persaingan departemen
deregulation	deregulasi
design of program	desain program
design standard	standar desain
desired outcome	hasil terharap
despatch decision rule	peraturan keputusan cepat
destructive competition	kompetisi/persaingan destruktif
developing country	negara berkembang
developing policy	pengembangan kebijakan
development administration	administrasi pembangunan
development constraints	halangan/konstrai pembangunan
development fund	dana pembangunan
development management	manajemen pembangunan
development-oriented	berorientasi pembangunan
diagonal coordination	koordinasi diagonal
dichotomy of politics and administration	dikotomi politik dan administrasi
differentiated policy alternative	alternatif kebijakan terdiferensiasi
digital capital	modal digital
dilemma of redistribution	dilema redistribusi
dimension of public administration	dimensi administrasi publik
diplomatic etiquette	etiket diplomasi
direct service delivery	pengiriman pelayanan langsung
dirty hands dilemma	dilema tangan kotor
disaster relief program	program bantuan bencana
disciplinary action	tindakan disipliner
disclosure requirement	syarat penyingkapan
disposition of implementor	disposisi implementor

dissemination of information • dynamics of organization

dissemination of information	diseminasi/penyebaran informasi
distribution function	fungsi distribusi
distributive policy	kebijakan distributif
district administration	administrasi daerah/distrik
district administration system	sistem administrasi daerah/distrik
district council	majelis daerah; dewan daerah
district population equality	persamaan populasi distrik
diversity of target group	diversitas kelompok sasaran
division of class	divisi/pembagian kelas
division of labour	pembagian buruh/kerja
domain of policy	ranah/domain kebijakan
domestic affairs	masalah domestik/dalam negeri
domestic circumstance	sirkumtansi domestik/dalam negeri
domestic influence	pengaruh domestik/dalam negeri
domestic investment	investasi dalam negeri
domestic order	ketertiban domestik/ketertiban dalam negeri
domestic policy	kebijakan domestik/kebijakan dalam negeri
domestic policy type	tipe kebijakan domestik/dalam negeri
domino theory	teori domino
dossier	dosir; dokumen
driving change	pemacu perubahan
driving force	kekuatan penggerak
due process	proses wajib; <i>due process</i>
dynamic differences	perbedaan dinamik
dynamics of organization	dinamika organisasi

E

earmarked	ditentukan
e-business	e-business/ <i>bisnis</i>
e-commerce	<i>e-commerce</i>
economic context	konteks ekonomi
economic crisis	krisis ekonomi
economic decentralization	desentralisasi ekonomi
economic development	pembangunan ekonomi
economic dislocation	dislokasi ekonomi
economic environment	lingkungan ekonomi
economic equality	pemerataan ekonomi
economic function	fungsi ekonomi
economic indicator	indikator ekonomi
economic interest	kepentingan ekonomi
economic issue	isu ekonomi
economic of development	ekonomi pembangunan
economic policy	kebijakan ekonomi
economic problem	masalah ekonomi
economic program	program ekonomi
economic recession	resesi ekonomi
economic restructuring	restrukturisasi ekonomi/penstruktur- an kembali ekonomi
economic stability	stabilitas ekonomi
education policy	kebijakan pendidikan
efficiency of administration	efisiensi administrasi
efficiency reform	reformasi efisiensi
e-government	<i>e-government</i>
elected assembly	majelis terpilih

elected county administration • environmental planning

elected county administration	administrasi wilayah terpilih
elected office	jabatan terpilih
elected politician	politisi terpilih
elected representation	perwakilan terpilih
election commission	komisi pemilihan
election cycle	siklus pemilihan
electric power distribution	distribusi tenaga listrik
electronic counter measure (ECM)	tindak balas elektronik
electronic government	pemerintahan elektronik
electronic revolution	revolusi elektronik
employee behavior	perilaku/tingkah laku pekerja
employee performance evaluation	evaluasi kinerja pegawai
employer's federation	federasi majikan
employment policy	kebijakan tenaga kerja
empowerment	pemberdayaan
empowerment of the poor	pemberdayaan rakyat miskin
energy policy	kebijakan energi
enforcement agency	agen pemaksa
enforcement procedure	prosedur paksa
enfranchise	memberi hak memilih
entrepreneurial government	pemerintah enterpreneurial/yang ber-wirausaha
enterprising government	pemerintah berdaya usaha
enviromental governance	tata kelola pemerintahan lingkungan (hidup); pemerintahan lingkungan (hidup)
enviromental policy making process	proses pembuatan kebijakan lingkungan (hidup)
enviromental policy process	proses kebijakan lingkungan
enviromental protection	perlindungan lingkungan (hidup)
environmental analysis	analisis lingkungan (hidup)
environmental governance	tata kelola pemerintahan lingkungan (hidup)/pemerintahan lingkungan (hidup)
environmental impact assessment	penilaian dampak lingkungan (hidup)
environmental planning	rencana lingkungan hidup

environmental policy • executive order

environmental policy	kebijakan lingkungan hidup
environmental policy making	pembuatan kebijakan lingkungan (hidup)
environmental pollution	polusi lingkungan (hidup)
environmental protection	perlindungan lingkungan (hidup)
equal employment opportunity	peluang kerja sama
equal opportunity	peluang sama
equality of opportunity	persamaan peluang/kesempatan
essential equivalence	kesetaraan esensial
essential infrastructure	prasarana esensial; infrastruktur penting
ethical responsibility	pertanggungjawaban etika
ethical theory	teori etika
ethnic minority	minoritas etnik
evaluability assessment	penaksiran kemampuan evaluasi
evaluating policy analysis	pengevaluasian analisis kebijakan
evaluation management	manajemen evaluasi
evaluation of policy result	evaluasi hasil kebijakan
evaluation planning	perencanaan evaluasi
evaluation research	penelitian/riset evaluasi
Excellence Award	Anugerah Kecemerlangan/Keunggulan
Excellence Work Circle	Kumpulan/Siklus Kerja Cemerlang
exchange costs	biaya pertukaran
exchequer	kos pertukaran
exchequer grant	hibah/grant perbendaharaan
executive action	tindakan eksekutif
executive agency	agensi eksekutif
executive branch	cabang eksekutif
executive budget	anggaran eksekutif
executive committee	komiti eksekutif
executive council	dewan/lembaga eksekutif
executive decree	dekret eksekutif
executive leadership	kepemimpinan eksekutif
executive management	manejemen eksekutif
executive office of the president	kantor eksekutif presiden
executive order	perintah eksekutif

executive power • extrapolative forecasting

executive power	kekuasaan eksekutif
executive public service	pelayanan publik eksekutif
executive secrecy	kerahasiaan eksekutif
exigencies of service	desakan pelayanan
expansionist policy	kebijakan ekspansionis
expectation gap	kesenjangan/harapan ekpektasi
experimental projects	proyek eksperimental
experimental stage	tingkat eksperimental
expert power	kekuasaan bersumber keahlian
explanatory element	unsur penjelas
external accountability	akuntabilitas eksternal
external constituency	konstituensi/kawasan eksternal
external customer	pelanggan eksternal
external environment	lingkungan eksternal
external market	pasar eksternal
external pressure	tekanan eksternal
extrapolative forecasting	peramalan ekstrapolatif

F

fail-safe	bebas gagal
fair trade policy	kebijakan perdagangan adil
fait accompli	<i>fait accompli</i>
family support system	sistem dukungan/sokongan keluarga
feasibility studies	studi kelaikan/kelayakan
federal assistance	bantuan federal
federal blue print	cetak biru federal
federal budget	anggaran federal
federal council	dewan federal
federal debt	utang federal
federal fund	dana federal
federal government	pemerintah federal
Federal Legislative Council	Dewan Legislatif Federal
federal official	pejabat federal
federal policy-making	pembuat kebijakan federal
Federal Power Commission	Komisi Kekuasaan Federal
federal regulatory power	kekuasaan pengaturan federal
federal system	sistem federal
federal trade commission	komisi perdagangan federal
federalism cooperative	kerja sama federalisme
field organization	organisasi lapangan
financial administrations	administrasi keuangan
financial agreement	perjanjian keuangan
financial autonomy	otonomi keuangan
financial decision	keputusan keuangan
financial deficiency	kekurangan keuangan/defisiensi keuangan

financial estimation • free market mechanism

financial estimation	perkiraan keuangan
financial impact	dampak keuangan
financial management initiative	inisiatif manajemen keuangan
financial obligation	kewajiban/obligasi keuangan
financial performance	kinerja/prakarsa keuangan
financial practice	praktik keuangan/finansial
financial regulations	peraturan/regulasi keuangan
financial resources	sumber daya keuangan
financial support	bantuan keuangan
fiscal accountability	kebertanggungjawaban/akuntabilitas fiskal
fiscal federalism	federalisme fiskal
fiscal imbalance	ketidakseimbangan fiskal
fiscal impact	dampak fiskal
flat hierarchy	hierarki datar/rata
flat tax	pajak rata
flexible management	manajemen fleksibel
flexible response	tanggapan fleksibel
flood control policy	kebijakan pengawasan banjir
focus group discussion	diskusi kelompok terarah
food security policy	kebijakan keselamatan makanan
food stamps policy/program	kebijakan food stamp/program food stamp
foreign investment policy	kebijakan penanaman modal asing
foreign policy type	tipe kebijakan/politik luar negeri
foreign service	pelayanan luar negeri
foreign-aid program	program bantuan luar negeri
formal authorization	otorisasi formal
formal evaluation	evaluasi formal
formal problem	masalah formal
formula grant	bantuan berformula
formulating policy	perumusan/pemformulasian kebijakan
forward linkage	perkaitan ke depan/muka
franchising	pewaralabaan
free market mechanism	mekanisme pasaran/pasar bebas

front bench • future policy

front bench
frontier of administration
Fulton Report
function of management
functional activity
functional planning
future policy

kursi utama parlemen; barisan depan
fronti administrasi
Laporan Fulton
fungsi manajemen
aktivitas fungsional
perencanaan fungsional
kebijakan masa depan

G

gazette notification	pemberitahuan warta
general accounting office	kantor akuntansi umum
general administration	administrasi umum
general grant	grant umum
general income transfer	transfer pendapatan umum
general management	manajemen umum
general order	aturan umum
general plan	rencana umum
general revenue sharing fund	dana bagi hasil perolehan umum
generalist	generalis
generic management	manajemen generik
generic policy alternative	alternatif kebijakan umum
global business	bisnis/perniagaan global
global electronic economy	ekonomi elektronik global
global marketing management	manajemen pemasaran global
global marketplace	pasar/pasaran global
goal achievement	pencapaian tujuan
goal approach	pendekatan tujuan
goal constraint	kendala tujuan
goal setting	penetapan tujuan
good governance	tata kelola pemerintahan yang baik; kepemerintahan yang baik
goods and services	barang dan jasa
governability	upaya pemerintahan
governance	tata kelola pemerintahan; kepemerintahan
governance administration	administrasi tata kelola pemerintahan; administrasi pemerintahan

governance by objective • grant

governance by objective	kepemerintahan berbasis tujuan; tata kelola pemerintahan berbasis tujuan
governance by rule	kepemerintahan berbasis aturan; tata kelola pemerintahan berbasis aturan
governing body	badan memerintah
governing elite	elit memerintah
government action	tindakan pemerintah
government business enterprise	perusahaan bisnis pemerintah
government circular	edaran/sirkuler pemerintah
government constraints	kendala/halangan/hambatan pemerintah
government decision	keputusan pemerintah
government expenditure	pengeluaran/belanja pemerintah
government failure	kegagalan pemerintah
government gazette	warta/siaran pemerintah
government organization	organisasi pemerintah
government organizational structure	struktur organisasi pemerintah
government performance	kinerja pemerintah
government policy	kebijakan pemerintah
government resignation	peletakan jabatan/pengunduran diri pemerintah
government spending	pembelanjaan pemerintah
government sponsored corporation	korporasi/perusahaan disponsori pemerintah
government treasury	perbendaharaan pemerintah
governmental accountability	kebertanggungjawaban pemerintah
governmental agency	agensi pemerintahan
governmental body	badan pemerintah
governmental function	fungsi pemerintah
governmental intervention	campur tangan/intervensi pemerintah
governmental policy activity	aktivitas kebijakan pemerintah
government-business relations	hubungan pemerintah-bisnis
grand strategy	strategi besar
grandfather clause	kebiasaan turun-temurun
grant	bantuan

grass-roots organization • gun control

grass-roots organization
grass roots participation
group cohesion
growth fiscal policy
gun control

organisasi akar-rumput
partisipasi/penyertaan akar-rumput
kohesi kelompok
kebijakan pertumbuhan fiskal
pengawasan/kontrol senjata api

H

haphazard planning	perencanaan sembarangan
Hawthorne experiments	eksperimen/percobaan Hawthorne
head of department	kepala bagian
health policy	kebijakan kesehatan
hierarchical structure	struktur hierarkis
hierarchy of control	hierarki kontrol
high government official	pejabat tinggi pemerintah
high level decision	keputusan tingkat tinggi
high public official	pejabat tinggi publik
higher law	hukum tertinggi
Hofstede's national culture	budaya nasional Hofstede
holistic imperative	keharusan/imperatif holistik
Home Affairs	hal ihwal dalam negeri
home affairs policy	kebijakan dalam negeri
home-based officer	pegawai negeri tetap
horizontal communication	komunikasi horizontal
horizontal coordination	koordinasi horizontal
horizontal equity	ekuiti horizontal
horizontal organization	organisasi horizontal
House of Commons	Dewan Perwakilan Rakyat
household census	sensus rumah tangga
housemanship	pelatihan pegawai
Housing Act	Akta Perumahan
Housing Advice Centre	Pusat Nasihat Perumahan
housing association	persatuan perumahan
housing cooperative	koperasi perumahan
housing corporation	perusahaan perumahan

housing finance • humane bureaucracy

housing finance	pembiayaan perumahan
housing policy	kebijakan perumahan
housing target	target perumahan
human behaviour	perilaku/tingkah laku manusia
Human Development Index	Indeks Pembangunan Manusia
human relations approach	pendekatan hubungan manusia
human relations school	mazhab/aliran pemikiran hubungan manusia
human resource development	pengembangan/pembangunan sumber daya manusia
human resources management	manajemen sumber daya manusia
humane bureaucracy	birokrasi kemanusiaan

I

ideal type bureaucracy	birokrasi tipe ideal
identification of causes	identifikasi sebab-musabab
identification of strategic issues	pengidentifikasian isu-isu strategik
identifying policy risk	pengidentifikasian risiko kebijakan
ill-structured problem	masalah tidak terstruktur
imbalanced growth	pertumbuhan tak seimbang
immigration policy	kebijakan imigrasi
impasse resolution	resolusi impas
impersonal administration	administrasi impersonal
implementation capacity	kapasitas pelaksanaan
implementation feasibility	kemungkinan pelaksanaan
implementation of government policy	implementasi kebijakan pemerintah
implementation process	proses pelaksanaan/implementasi
implementation strategy	strategi implementasi/pelaksanaan
implementing agency	pengimplementasian agensi
import quota	kuota impor
incentive regulation	pengaturan/regulasi insentif
incentive system	sistem insentif
income and expenditure account	akun pendapatan dan pengeluaran
income class	kelas pendapatan/berpendapatan
income grants	grant pendapatan
income maintenance	pengurusan pendapatan
income redistribution	redistribusi pendapatan
incremental budget	anggaran inkremental/tambahan
incremental budgeting	anggaran inkremental/tambal sulam
incremental change	perubahan inkremental/tambahan

incremental decision-making • in-house service

incremental decision-making	pengambilan/pembuatan keputusan inkremental
incremental policy	kebijakan tambal sulam/inkremental
incrementalism	inkrementalisme
incrementalism theory	teori inkrementalisme
incumbent leader	pemimpin sedang berkuasa
incumbent officer	pejabat saat ini
independent agency	agensi bebas/mandiri/independen
independent regulatory commission	komisi pengaturan independen
indigenous initiative	inisiatif/prakarsa asli/pribumi
indigenous model	model pribumi/asli
individual decision maker	pembuat keputusan individu
individual level	tingkat/peringkat individu
inducement allowance	allowance pendorong
inducement pay	gaji pendorong
inducement-contribution balance	saldo sumbangan pendorong
industrial body	badan perindustrian
industrial development strategy	strategi pembangunan perindustrian
industrial planning	perencanaan perindustrian
industrial policy	kebijakan perindustrian
industrial relations	hubungan perindustrian
industrial restructuring policy	kebijakan penstrukturan kembali industri
industrialization	industrialisasi
industrialization process	proses industrialisasi
industry restructuring	penstrukturan kembali industri
informal assesment	penaksiran informal
informal communication	komunikasi informal
informal group	kelompok informal
informal structure	struktur informal
information analysis	analisis informasi
information collection	pengumpulan/koleksi informasi
information gathering	pengumpulan informasi
information technology system	sistem teknologi informasi
inheritance tax	pajak warisan
in-house service	layanan griaan/dalam

in-house training • interest-based planning

in-house training	latihan di tempat kerja/griiaan
injunction	catatan tiada konsep
inner cabinet	kabinet inti/dalam
innovative organization	organisasi inovatif
input budgeting	penganggaran input
inside government	sisi dalam pemerintah
insitutional theory	teori kelembagaan
institutional agenda	agenda kelembagaan/institusi
institutional arrangement	pengaturan kelembagaan/institusi
institutional building	pengembangan kelembagaan/institusi
institutional change	perubahan institusi/kelembagaan
institutional commitment	komitmen kelembagaan/institusi
institutional constraint	hambatan/kendala kelembagaan/ins- titusi
institutional development	pengembangan kelembagaan/institusi
institutional dynamic	dinamika institusi/kelembagaan
institutional framework	kerangka kerja institusi/kelembagaan
institutional limitation	pembatasan kelembagaan/institusi
institutional reform	reformasi/pembaruan kelembagaan/ institusi
institutional theory	teori kelembagaan/institusi
institutionalism	paham kelembagaan/institusionalisme
institutionally based question	masalah berbasis kelembagaan
instrumentality	instrumentalitas
insufficient information	informasi tak mencukupi
intellectual capital	modal intelektual/cendekiawan
intended impact	dampak terharap
interaction-influence	pengaruh interaksi
interagency committee	komite antaragensi
interauthority relationship	hubungan antarpihak berkuasa/antar- otoritas
interdepartmental collaboration	kerja sama antardepartemen
interdepartmental committee	komite antardepartemen
interdepartmental coordination	penyelarasan/koordinasi antardepartemen
interest-based planning	perencanaan berbasis kepentingan

intergovernmental agency • intragovernmental linkages

intergovernmental agency	agensi antarpemerintah
intergovernmental linkages	pautan antardepartemen/antarpemerintah
intergovernmental network	jaringan/pautan antarpemerintahan
intergovernmental relations	hubungan antarpemerintah
interim agreement	perjanjian interim
internal accountability	akuntabilitas internal/kebertanggung-jawaban internal
internal audit	audit internal
internal customer	pelanggan dalam
internal dynamics	dinamika internal
internal environment	lingkungan internal
internal market	pasar/pasaran internal
internal revenue service	kantor pajak pendapatan
internalisation management	manajemen internalisasi
international affairs	masalah internasional
international agreement	perjanjian internasional
international business	bisnis internasional
international development	pembangunan internasional
international division of labour	pembagian kerja internasional
international finance	keuangan internasional
international governmental organization	organisasi (pemerintah) internasional
international influence	pengaruh internasional
international institution	lembaga/institusi internasional
international migration	migrasi internasional
international negotiation	perundingan internasional
international organization	organisasi internasional
international policy making	pembuatan kebijakan internasional
international regimes	rezim internasional
international trade policy	kebijakan perdagangan internasional
internationalization	internasionalisasi
inter-party difference	perbedaan antarpantai/antarpihak
intragovernmental coordination	koordinasi dalam pemerintah
intragovernmental linkages	keterpautan dalam pemerintahan organisasi dalam pemerintahan

investigative power • issues vulnerability index

investigative power	kekuasaan menyelidiki
investment analysis	analisis investasi
irrelevant scholar	ceudekiawan/sarjana takrelevan
issue change	perubahan isu
issue control	kontrol/pengawasan isu
issue creation	penciptaan/kreasi isu
issue identification	identifikasi isu
issue network	jaringan isu
issue option	opsi isu
issues life cycle	siklus kehidupan isu
issues life cycle model	model siklus kehidupan isu
issues management	manajemen isu
issues vulnerability index	indeks kerentanan isu

J

jeopardy assessment	taksiran berbahaya
job evaluation	evaluasi tugas/kerja
job analysis	analisis jabatan/analisis kerja
job corps	corp pekerja
job definition	definisi kerja/tugas
job description	deskripsi/gambaran tugas
job evaluation	evaluasi pekerjaan/jabatan
job productivity	produktivitas kerja
job relationship	hubungan kerja
job specification	spesifikasi jabatan/pekerjaan
job tenure	tempo/masa tugas; catatan tiada konsep
job training	pelatihan kerja
job training program	program <i>job training</i> /pelatihan kerja
joint venture	usaha bersama
judgmental forecasting	peramalan penilaian
judicial activism	aktivisme yudisial/kehakiman
judicial branch	cabang yudisial/peradilan
judicial control	kawalan/pengawasan yudisial keha- kiman/peradilan
judicial independence	kebebasan yudisial/kehakiman/peradil- an
judicial restraint	halangan yudisial/kehakiman/peradilan
judiciary	badan peradilan
junior minister	menteri muda
juror relations	relasi anggota juri
justice department	departemen kehakiman

justice of peace • justice policy

justice of peace
justice policy

jaksa pendamai
kebijakan keadilan

L

labour arbitration court	mahkamah arbitrase pekerja
labour efficiency	efisiensi buruh
labour exchange	pertukaran pekerja
labour force	tenaga kerja
labour group	kelompok pekerja
labour market	pasar/pasaran buruh
labour organisation	organisasi pekerja
labour policy	kebijakan perburuhan
labour regulation	regulasi perburuhan/pekerja
land acquisition policy	kebijakan pengambilan tanah
land use development plan	rencana pembangunan tata guna tanah
landreform policy	kebijakan landreform
law of treaties	hukum perjanjian
leadership of example	kepemimpinan melalui keteladanan/ teladan
leadership roles	peranan kepemimpinan
leadership selection	pemilihan/seleksi kepemimpinan
leadership style	gaya kepemimpinan
leading for innovation	terdepan dalam inovasi
leaked information	informasi terbocoran
learning organization	organisasi pembelajaran
least effort principle	prinsip daya paling sedikit
least-cost analysis	analisis biaya paling sedikit
leftist government	pemerintah beraliran kiri
legal accountability	akuntabilitas legal/hukum
legal	legal
legal status of civil servant	status hukum pegawai negeri

legal-rational authority • low wage

legal-rational authority	otoritas/wewenang legal-rasional
legislative assembly	majelis legislatif
legislative body	badan legislatif
legislative branch	cabang legislatif
legislative budget	anggaran legislatif
legislative cycle	siklus legislatif
legislative veto	veto legislatif
legitimate power	kekuasaan terlegitimasi
liberal policy	kebijakan liberal
licensing policy	pelisensian kebijakan
limit of administration	keterbatasan administrasi
line agency	agen lini
line authority	otoritas lini
line management	manajemen lini/garis
line of succession	urutan suksesi
line-item budget	anggaran berdasarkan butir garis
litmus test	tes litmus
living standard	standar hidup
local administration	administrasi lokal
local authority	otoritas/wewenangan lokal/daerah
local development	pembangunan lokal/daerah
local economic	ekonomi lokal/daerah
local economy	ekonomi lokal/daerah
local governance	tata kelola pemerintahan lokal; kepe- merintahan daerah
local government	pemerintah lokal/daerah
local politic	politik lokal/daerah
long term planning	perencanaan jangka panjang
long-term performance	kinerja jangka panjang
long-term planning	perencanaan jangka panjang
look east policy	kebijakan berhaluan timur
low cost	ongkos/biaya rendah
low labour efficiency	efisiensi/keefisienan buruh rendah
low tariff	tarif rendah
low wage	upah rendah

lump sum appropriation • luxury tax

lumpsum appropriation
luxury tax

peruntukan lumpsum
pajak barang mewah

M

macroeconomic management	manajemen makroekonomi
macroeconomic policy	kebijakan ekonomi makro
maintenance policy	kebijakan pengurusan
major public issue	isu publik utama
maladministration	salah administrasi
management by committee	manajemen komite
management by interest	manajemen menurut/atas kepen- tingan
management by objective	manajemen (menurut)/atas sasaran
management capability	kapabilitas manajemen
management concept system	sistem konsep manajemen
management control	kontrol manajemen
management cycle	siklus manajemen
management development	pembangunan manajemen
management information	informasi manajemen
management information system	sistem informasi manajemen
management of information technology	manajemen teknologi informasi
management of policy	manajemen kebijakan
management policy	kebijakan manajemen
management tool	alat manajemen
managerial accountability	akuntabilitas manajerial/manajemen
managerial reform	pembaruan/reformasi manajemen/ manajerial
managerial resources	sumber daya manajemen/manajerial
managerial revolution	revolusi manajerial

managerial skills • medicare

managerial skills	kemahiran/keahlian manajemen/ manajerial
managerialism	manajerialisme
managing change	pengelolaan perubahan
managing public organization	pengelolaan organisasi publik
managing the risk	pengelolaan/mengurus risiko
Mandarin class	kelas Mandarin
mandates identification	identifikasi mandat
manifest function	fungsi manifes
manpower administration	administrasi tenaga kerja
manpower planning	perencanaan tenaga kerja
manpower policy	kebijakan tenaga kerja
market accountability	kebertanggungjawaban/akuntabi- litas pasar
market approach	pendekatan pasar
market failure	kegagalan pasar
market mechanism	mekanisme pasar
market oriented government	pemerintah berorientasi pasar
market segmentation	segmentasi pasar
market simulation	simulasi pasar
market strategy	strategi pasar
market-based public administration	administrasi publikan berdasarkan pasar
market-based question	masalah berbasis pasar
marketing action	tindakan pemasaran
marketing management	manajemen/pengurusan pemasaran
marketing model	model pemasaran
market-oriented government	pemerintah berorientasi pasar
market-oriented society	masyarakat berorientasi pasar
market-type mechanism	mekanisme tipe pasar
matrix organisation	organisasi matriks
mayor	walikota
mayoral representative	perwakilan terbanyak
mechanism of governance	mekanisme tata kelola pemerintahan/ kepemerintahan
medicare	pemeduliaan kesehatan

memorandum of understanding (MOU) • motivation-hygiene theory

memorandum of understanding (MOU)	memorandum kesepakatan
mergers and acquisitions	merger dan akuisisi
merit pay	pembayaran merit
merit system	sistem merit
micro-economic perspective	perspektif mikro-ekonomi
micro-economic reform	reformasi ekonomi mikro
micromanagement	manajemen mikro
mid-term review	tinjauan tengah waktu
middle management	manajemen menengah
mid-term evaluation	evaluasi tengah waktu
military organization	organisasi militer
ministerial accountability	akuntabilitas/kebertanggungjawaban kementerian
ministerial reshuffle	perombakan kementerian
ministerial responsibility	tanggung jawab kementerian
mission statement	pernyataan misi
mission-driven government	pemerintah berpandu/berbasis
misimixed policy instrument	instrumen kebijakan campuran
mobilization of bias	mobilisasi bias/pembiasaan
mode of representation	mode perwakilan/representasi
moderately structured problem	masalah terstruktur sederhana/agak terstruktur
modern bureaucracy	birokrasi modern
modern capitalist economy	ekonomi kapitalis modern
modern marketing	pemasaran modern
modern society	masyarakat modern
modern state	negara modern
monetary policy	kebijakan moneter
money manager	manajer keuangan
moral hazard	moral hazard
moral health	kesehatan moral
moral leadership	kepemimpinan bermoral
motivation-hygiene theory	teori motivasi higiene

multicultural management • mutual recognition

multicultural management	manajemen multikultur/multi-budaya
multi-level policy system	sistem kebijakan multitingkat
multiple elections	pemilihan ganda
multiplier effect	efek berganda
municipal board	lembaga kota; badan perkotaan
municipal council	dewan kota
municipalization	pengkotaan
mutual recognition	pengakuan timbal balik

N

national debt	utang nasional
National Labor Relations Act	Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional
national policy making	pembuatan kebijakan nasional
national service	pelayanan nasional
national tax policy	kebijakan pajak nasional
nationalization	nasionalisasi
nationalized industries	industri ternasionalisasikan
nationalized industry	industri dinasionalisasikan/ternasionalisasi
needs assessment	penaksiran kebutuhan/keperluan
needs hierarchy	hierarki kebutuhan
negotiation skills	kemahiran/keterampilan/keahlian negosiasi/perundingan
neighbourhood association	rukun tetangga
neighbourhood council	rukun warga
neo-classical theory	teori neoklasik
neo-corporatism	korporatisme baru
neo-functionalism	fungsionalisme baru; neofungsionalisme
neo-institutionalism	institusional baru; neoinstitusionalisme
new paradigms for government	paradigma baru (untuk) pemerintahan
new policy proposal	proposal kebijakan baru
new public administration	administrasi publik baru
new public management	manajemen publik baru
nimbyism	nimbyism
non-decision	tanpa keputusan; nonputusan

non-governmental organization • nuclear energy policy

non-governmental organization	organisasi nonpemerintah; lembaga swadaya masyarakat
nonpaper document	dokumen tak tertulis
nonparameter	nonparameter
nonprice competition	kompetisi nirharga
non-profit organization	organisasi nonprofit/nirlaba
non-verbal communication	komunikasi nonverbal
normative issue	isu normatif
Northcote-Trevelyn Report	Laporan Northcote-Trevelyn
nuclear energy policy	kebijakan energi nuklir/atom

O

office environment	lingkungan kantor
office politics	politik jabatan
official agenda	agenda resmi
official policy maker	pembuat kebijakan resmi/formal
oligopoly theory	teori oligopoli
one-off budget	anggaran sekali beri
one-tier	satu peringkat
open civil service	sistem pegawai negeri sipil terbuka
operation research	riset/penelitian operasi
operational environment	lingkungan operasi
operational goals	tujuan operasional
operational manager	manajer operasi
operational objectives	sasaran operasi
operational planning	perencanaan operasional
operational research	penelitian/riset operasi
operational responsibility	pertanggungjawaban operasional
operations management	manajemen operasi
organisation development	pengembangan organisasi
organisational culture	budaya organisasi
organisational efficiency	efisiensi organisasi
organisational ethics	etika organisasi
organisational leadership	kepemimpinan organisasi
organisational members	anggota organisasi
organisational performance	kinerja organisasi
organisational process	proses organisasi
organisational response	respons organisasi; tanggapan organisasi

organizational rigidity • ownership of asset

organizational rigidity	kekakuan organisasi
organization management	manajemen organisasi
organization theory	teori organisasi
organizational behaviour	perlakuan/tingkah laku organisasi
organizational climate	iklim organisasi
organizational culture	budaya organisasi
organizational decision-making	pengambil keputusan organisasi
organizational development	pengembangan organisasi
organizational effectiveness	keefektifan organisasi
organizational performance	kinerja organisasi
organizational process	proses organisasi
organizational response	respons organisasi
organizational strategy	strategi organisasi
organizational support	dukungan organisasi
organizational theory	teori organisasi
organizational value	nilai organisasi
organized government	pemerintah terorganisasi
outcome indicator	indikator hasil
outcomes focus	fokus hasil/manfaat
outcomes objective	sasaran hasil
outcomes of election	hasil pemilihan
outer cabinet	kabinet (di) luar
outer city	kota (di) luar
outlays and budget	biaya dan anggaran
out-of-pocket expense	perbelanjaan sendiri
output budgeting	penganggaran keluaran
output system	sistem <i>output</i>
outside government	sisi luar pemerintah
oversight and review	perhatian dan tinjauan; kekeliruan dan tinjauan
oversight committee	komite pemerhati
ownership of asset	pemilikan aset

P

paper work	kertas kerja
paperless bureaucracy	birokrasi tanpa kertas
paradigm change	perubahan paradigma
paradigm shift	peralihan/pergeseran paradigma
parastatal	parastatal
Pareto principle	prinsip Pareto
Parkinson's law	hukum Parkinson
parliamentary clerk	klerk parlemen; pekerja parlemen
parliamentary commission	komisi parlemen
parliamentary committee	komite parlemen
parliamentary secretary	sekretaris parlemen
parliamentary sovereignty	kedaulatan parlemen
parliamentary system	sistem parlementer
participation crisis	krisis partisipasi
partisan configuration	konfigurasi partisan
partnership	kemitraan
party election program	program pemilihan partai
patent policy	kebijakan paten
patrimonial administration	administrasi patrimonial
patrimonial bureaucracy	birokrasi patrimonial
patronage system	sistem patronase/naungan
patron-client relationship	hubungan patron-klien
pattern of influence	pola pengaruh
penal code	kode penal
penetocracy	penetokrasi
pension plans	rencana pensiun
people poverty	kemiskinan orang banyak

perception of policy actor • plurality election

perception of policy actor	persepsi pelaku kebijakan
performance appraisal	penilaian kinerja
performance budgets	anggaran kinerja
performance contracts	kontrak kinerja
performance criteria	kriteria kinerja
performance goal	tujuan kinerja
performance indicator	indikator kinerja
performance management	manajemen kinerja
performance measurement	pengukuran kinerja
performance monitoring	pemonitoran/pemantauan kinerja
performance pay	pembayaran kinerja
performance-related pay	pembayaran terkait kinerja
performance standard	standar kinerja
performance target	target/sasaran kinerja
personal issue	isu personal
personnel	personalia/kepegawaian
personnel development	pengembangan pegawai/personel
personnel management	manajemen personel
personnel system	sistem personel
personnel training	latihan personel
perspective analysis	analisis perspektif
piecemeal change	perubahan berangsur-angsur/sedikit demi sedikit
pilot project	proyek percontohan
planning countermeasures	tindak balas perencanaan; perencanaan kontra tindakan
planning objective	sasaran perencanaan
planning strategy	strategi perencanaan
Planning-Programming-Budgeting System (PPBS)	Sistem Perencanaan-Pemrograman-Penganggaran
Planning-Programming-Budgeting-Scheduling System	Sistem Perencanaan-Pemrograman-Penganggaran-Penjadwalan
pluralism	pluralisme
plurality election	pemilihan pluralitas/majemuk/keberagaman

polarization of policy elite • policy indicator

polarization of policy elite	polarisasi elit kebijakan
policy cycle	siklus kebijakan
policy activity	aktivitas kebijakan
policy actor	aktor/pelaku kebijakan
policy adoption	adopsi kebijakan
policy advice	nasihat/advis kebijakan
policy advocacy	advokasi kebijakan
policy agenda	agenda kebijakan
policy analysis	analisis kebijakan
policy argument	argumen kebijakan
policy change	perubahan kebijakan
policy community	masyarakat/komunitas kebijakan
policy content	isi kebijakan
policy context	konteks kebijakan
policy cycle	siklus/lingkaran kebijakan
policy decision	keputusan kebijakan
policy demand	tuntutan kebijakan
policy design	desain/rancangan kebijakan
policy development	pengembangan kebijakan
policy document	dokumen kebijakan
policy entrepreneur	wirausaha kebijakan
policy enterprise	serikat/maskapai kebijakan
policy environment	lingkungan kebijakan
policy evaluation	penilaian/evaluasi kebijakan
policy failure	kegagalan kebijakan
policy focus	fokus kebijakan
policy formation	formasi/pembentukan kebijakan
policy formulation	formulasi kebijakan/perumusan kebijakan
policy framework	kerangka kebijakan
policy function	fungsi kebijakan
policy impact	dampak kebijakan
policy implementation	pelaksanaan/implementasi kebijakan
policy implication	implikasi kebijakan
policy incremental	inkremental/tambal sulam kebijakan
policy indicator	indikator kebijakan

policy indicator construction • policy stage

policy indicator construction	konstruksi indikator kebijakan
policy instrument	instrumen kebijakan
policy issue	isu kebijakan
policy legitimation	legitimasi kebijakan
policy literature	literatur kebijakan
policy maintenance	pengurusan/pemeliharaan kebijakan
policy maker	pembuat kebijakan
policy making function	fungsi pembuatan kebijakan
policy making mechanism	mekanisme pembuatan kebijakan
policy making process	proses pembuatan kebijakan
policy meaning	pengertian kebijakan
policy mix	campuran kebijakan
policy model	model kebijakan
policy monitoring	pemantauan/pemonitoran kebijakan
policy negotiation	negosiasi/perundingan kebijakan
policy network	jaringan kebijakan
policy objective	sasaran kebijakan
policy orientation	orientasi kebijakan
policy outcome	hasil kebijakan
policy practitioner	praktisi kebijakan
policy priority	prioritas kebijakan
policy problem	problem/hal kebijakan
policy problem circle	lingkaran masalah kebijakan
policy process	proses kebijakan
policy process map	map/peta proses kebijakan
policy proposal	usulan/proposal kebijakan
policy rational	rasional kebijakan
policy recommendation	rekomendasi kebijakan
policy research	penelitian/riset kebijakan
policy response	respons kebijakan
policy review	tinjauan/ulasan kebijakan
policy risk	risiko kebijakan
policy risk analysis	analisis risiko kebijakan
policy situation	situasi kebijakan
policy space	ruang kebijakan
policy stage	tahapan kebijakan

policy statement • political exchange

policy statement	pernyataan kebijakan
policy study	studi/kajian kebijakan
policy subsystem	subsistem kebijakan
policy support	dukungan kebijakan
policy system	sistem kebijakan
policy task	tugas kebijakan
policy termination	terminasi/pembatasan kebijakan
policy thinking	pemikiran kebijakan
policy tool	alat kebijakan
policy transfer	transfer kebijakan
policy transformation	transformasi kebijakan
policy type	tipe kebijakan
policy typology	tipologi kebijakan
policy undertaking	perjanjian kebijakan
policy window	jendela kebijakan
policy making authority	otoritas/wewenang pembuat kebijakan
policy making cycle	siklus pembuatan kebijakan
politic of local government	politik pemerintah lokal/daerah
political access	akses politik
political accountability	akuntabilitas politik
political action	tindakan politik
political business cycle	siklus bisnis politik
political cleavage	pembelahan politik
political commitment	komitmen politik
political condition	kondisi politik
political conflict	konflik politik
political control	kawalan/pengawasan/kontrol politik
political culture	budaya/kultur politik
political decentralization	desentralisasi politik
political decision making	pembuatan keputusan politik
political difference	perbedaan politik
political discourse	wacana/diskursus politik
political economy	ekonomi politik
political environment	lingkungan politik
political exchange	pertukaran politik

political executive • presidential veto

political executive	eksekutif politik
political indicator	indikator politik
political interest	kepentingan politik
political issue	isu politik
political leadership	kepemimpinan politik
political management	manajemen politik
political opposition	oposisi politik
political party	partai politik
political party performance	kinerja partai politik
political policy	kebijakan politik
political power	kekuasaan/kekuatan politik
political problem	masalah politik
political process	proses politik
political responsibility	pertanggungjawaban/tanggung jawab politik
political sociology	sosiologi politik
political support	dukungan/sokongan politik
political system	sistem politik
political viability	kelangsungan hidup politik
politicization	politisasi
politics of local government	politik pemerintah lokal/daerah
poll tax	pajak kepala/pemilikan
popular control	kontrol/pengawasan rakyat
popular participation	partisipasi/penyertaan ramai/umum
popular sovereignty	kedaulatan umum/rakyat
popular virtue	kebajikan umum
popular will	kemauan umum
port management	manajemen pelabuhan
position classification	klasifikasi posisi
postbureaucratic organization	organisasi pascabirokratik
postmodern public administration	administrasi publik pascamodern
postmodernism	postmodernisme/pascamodernisme
power elite theory	teori elit kekuasaan
practical management	manajemen praktis/amali
preferred choice	pilihan tersuka/teringin
presidential veto	veto presidensial/presiden

pressure group • product of governmental action

pressure group	kelompok penekan
price regulation	pengaturan/regulasi harga
primary policy-maker	pembuat kebijakan utama/primer
principal actor	aktor/pelaku utama
principal agent theory	teori agen prinsipal/utama
principles of administration	prinsip administrasi
prioritising risk	pemrioritasan risiko
private enterprise	perusahaan swasta/privat
private goods	barang privat
private governance	tata kelola pemerintahan swasta/ kepemerintahan swasta
private interest	kepentingan swasta/pribadi
private organisation	organisasi swasta
private problem	masalah privat
private sector	sektor privat/swasta
privatization	privatisasi
probationary period	periode percobaan
problem analysis	analisis masalah/problem
problem avoidance	pengelakan masalah
problem definition	definisi masalah/problem
problem formulation	formulasi/perumusan masalah
problem identification	identifikasi masalah/problem
problem modelling	pemodelan masalah
problem search	penelusuran/pencarian masalah
problem solving	pemecahan masalah
problem solving activity	aktivitas pemecahan masalah
problem specification	spesifikasi masalah
problem structuring	penstrukturan masalah/problem
procedural integrity	integritas prosedural
procedural policy	kebijakan prosedural
procedural rules	aturan prosedural/berprosedur
process evaluation	evaluasi proses
process improvement	pembaikan/kemajuan proses
process of compromise	proses kompromi
product of governmental action	hasil/produk tindakan pemerintah

productivity improvement • pseudo-evaluation

productivity improvement	penyempurnaan/pengukuran produktivitas
professional accountability	kebertanggungjawaban/akuntabilitas profesional
professional ethic	etika profesional
professional network	jaringan profesional
professional standard	standar profesional
professionalism	profesionalisme
profit motive	motif profit/keuntungan
program budgeting	penganggaran program
program development	pengembangan program
program evaluation	evaluasi program
program guideline	pedoman/panduan program
program implementation	implementasi/pelaksanaan program
program management	manajemen program
program performance	kinerja program
program planning	perencanaan program
program assesement	penaksiran program
program budgeting	penganggaran program
program evaluation	evaluasi program
progressive tax	pajak progresif
project management	manajemen proyek
promotion by merit	promosi melalui
promotion by seniority	promosi/kenaikan senioritas
property rights	hak kepemilikan
property tax	pajak kepemilikan
proportional election	pemilihan proporsional
protect policy	kebijakan perlindungan
protectionism	proteksionisme
protective regulatory policy	kebijakan pengaturan proteksi
providing benefit	pemberian keuntungan
provincial administration	administrasi provinsi/daerah
pseudo-evaluation	evaluasi pseudo/maya

public accountability • public need

public accountability	kebertanggungjawaban/akuntabilitas publik
public action	tindakan publik
public activity	aktivitas publik
public administrator	administrator publik/negara
public affairs	hal ihwal publik
public asset	aset publik
public authority	kewenangan/otoritas publik
public benefit	keuntungan publik
public borrowing	pinjaman/peminjaman publik
public bureaucracy	birokrasi publik
public choice	pilihan publik
public choice theory	teori pilihan publik
public corporation	korporasi/perusahaan awam
public debate	debat publik
public debt	utang publik
public decision	keputusan publik
public decision-making	pembuatan keputusan publik
public entrepreneurship	kewirausahaan publik
public enterprise	perusahaan publik; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
public finance	keuangan publik
public fund	dana publik
public goods	barang publik
public governance	kepemerintahan publik/tata kelola pemerintahan publik
public health	kesehatan publik
public institution	institusi publik
public interest	kepentingan publik
public interest group	kelompok kepentingan publik/umum
public land	tanah negara
public law	hukum publik
public liability	liabilitas/kekurangan publik
public management	manajemen publik
public need	kebutuhan publik/umum/keperluan publik

public offering • public service responsibility

public offering	penawaran publik
public officer	pejabat publik
public opinion	opini/pendapat umum/publik
public organization	organisasi publik
public ownership	kepemilikan umum/publik/awam
public participation	partisipasi publik
public personnel management	manajemen kepegawaian publik
public policy	kebijakan publik
public policy analysis	analisis kebijakan publik
public policy formulation	formulasi/perumusan kebijakan publik
public policy making	pembuatan kebijakan publik
public problem	masalah publik/umum
public resources	sumber daya publik
public response	respons publik
public safety	keamanan/keselamatan publik
public school	sekolah negara/publik
public sector	sektor publik
public sector agency	agensi sektor publik
public sector budget	anggaran sektor publik
public sector inefficiency	ketidakefisienan sektor publik
public sector leadership	kepemimpinan sektor publik
public sector management	manajemen sektor publik
public security	keamanan publik
public servant	pegawai negeri
public service	pelayanan publik
public service accountability	kebertanggungjawaban/akuntabilitas pelayanan publik
Public Service Commission	Komisis Pelayanan Publik
public service corporation	perusahaan pelayanan publik
public service delivery	pelaksanaan/penghantaran pelayanan publik
public service delivery system	sistem pelaksanaan/pengiriman pelayanan publik
public service reform	reformasi pelayanan publik
public service responsibility	pertanggungjawaban pelayanan publik

public service value • purchasing policy

public service value	nilai pelayanan publik
public spending	pembelanjaan/pengeluaran publik
public subsidy	subsidi publik
public support	dukungan/sokongan publik
public trust	kepercayaan publik
public utilities	kemudahan publik
public utility	utilitas publik
public utility regulation	pengaturan utilitas umum; regulasi utilitas publik
public value	nilai publik
public work	pekerjaan umum
Public Works Department	Departemen Pekerjaan Umum
public-housing program	program perumahan publik (rakyat)
publicness	kepublikan
public-private mixes	percampuran publik-swasta/publik- privat
public-private partnership	kemitraan publik-privat
purchaser/provider split	pembagian/pembelahan pembeli/ pemberi
purchaser-provider contract	kontrak pembeli-pemberi
purchasing policy	kebijakan pengeluaran

Q

quality circle
quality control circle
quality initiative
quality of growth
quangos
quasi-government
quasi-municipal
quasi-public

siklus/lingkaran mutu/kualitas
lingkaran pengawasan kualitas/mutu
inisiatif/prakarsa mutu (kualitas)
mutu pertumbuhan
quangos
semipemerintah
kuasi-perkotaan; perkotaan semu
kuasi-publik; publik semu

R

rational action	tindakan rasional
rational actor model	model aktor/pelaku rasional
rational choice	pilihan rasional
rational decision making model	model pembuatan keputusan rasional
rational theory	teori rasional
rational-legal authority	kewenangan/otoritas rasional-legal
readjustment of policy	penyesuaian kembali kebijakan
reaganism	reganisme
recipient state	negara resipien
recommendation	rekomendasi
reconciliation	rekonsiliasi
recruitment system	sistem rekrutmen/perekrutan
redevelopment	pembangunan kembali
redistribution of income	redistribusi pendapatan
redistributive policy	kebijakan redistributif
redistributive welfare policy	kebijakan kesejahteraan redistributi
fred-tape	tep/pita merah
reducing homelessness	pengurangan tunawisma
reducing unemployment	pengurangan pengangguran
reengineer	rekayasa ulang
re-engineering	perekayasaan ulang
referendum	referendum
reform	reformasi; pembaruan
reformation	reformasi
regent	regen
regional agency	agensi/keagenan regional; keagenan wilayah

regional authority • relevant scholar

regional authority	otoritas wilayah; kewenangan regional/wilayah
regional development	pembangunan regional/wilayah
regional government	pemerintah regional
regional planning board	badan perencanaan daerah/regional
regional policy	kebijakan regional/wilayah
regionalisation	regionalisasi
registrar office	kantor pendaftar
regressive tax	pajak regresif
regulation of transportation industries	regulasi/pengaturan industri transportasi
regulative capability	kemampuan pengaturan
regulative policy	kebijakan pengaturan
regulatory agency	keagenan pengaturan/regulatori; agensi pengaturan
regulatory board	dewan pengaturan/regulatori
regulatory body	badan pengaturan/kepatuhan
regulatory budget	anggaran pengaturan/kepatuhan
regulatory commission	komisi pengaturan/kepatuhan
regulatory compliance	memenuhkan pengaturan/kepatuhan
regulatory cost	ongkos/biaya pengaturan/kepatuhan
regulatory framework	kerangka kerja pengaturan/kepatuhan
regulatory function	fungsi regulatori/pengaturan
regulatory impact statement	pernyataan dampak pengaturan
regulatory inflation	inflasi pengaturan
regulatory management	manajemen pengaturan
regulatory policy	kebijakan pengaturan
regulatory reform	reformasi/pembaruan pengaturan
rehabilitation program	program rehabilitasi/pemulihan
reinstate	ungkap kembali
reinvent	reka cipta ulang
reinventing	pereka cipta ulang; penciptaan kembali
reinventing government	perekaciptaan ulang pemerintahan
relational enterprise	perusahaan relasional/berhubungan
relationship among actor	hubungan antaraktor/antarpelaku
relevant scholar	ceendekiawan/sarjana/pandit relevan

representative bureaucracy • rule making

representative bureaucracy	birokrasi perwakilan/representatif
representative government	pemerintah(an) perwakilan
representativeness	keterwakilan
resource input	masukan sumber
resource acquisition	akuisisi sumber daya
resource allocation	alokasi sumber daya
responsible government	pemerintahan bertanggung jawab
responsible government system	sistem pemerintah bertanggung jawab
responsive regulation	pengaturan responsif
responsive services	pelayanan responsif
responsiveness	keresponsifan/kedayatanggapan
restructuring	penstrukturan kembali
result oriented government	pemerintah(an) berorientasi hasil
retrench	berhemat
retrenchment	pengurangan kerja
reverse discrimination	diskriminasi kebalikan
revitalization of public service	revitalisasi pelayanan publik
reward power	kekuasaan bersumber ganjaran
reward system	sistem ganjaran/hadiah
rightist government	pemerintah beraliran kanan
risk analysis	analisis risiko
risk assessment	penaksiran risiko
risk category	kategori risiko
risk criteria	kriteria risiko
risk management	manajemen risiko
risk minimisation	minimalisasi/pengurangan risiko
risk treatment	perlakuan risiko
role of evaluation	peran evaluasi
role of government	peran pemerintah
role of state	peran(an) negara
roll-call analysis	analisis panggil-nama
routine decision	keputusan rutin
routine hearings	dengar pendapat rutin
rowing	kayuh; dayung
rule application	pelaksanaan aturan
rule making	pembuatan aturan

rule making function • rural policy

rule making function
rule of adjudication
rural policy

fungsi pembuatan peraturan
aturan penghakiman
kebijakan pedesaan

S

sanitary board
satisficing (satisfaction)
scenario building
scenario development
scenario planning
scholar of public administration

scientific management
scientific aspiration
scrutiny process
seamless government
self management
self-directed work team
self-management
self-regulatory policy
semi-automatic decision-making
semi-privatisation
senior system
seniority
separation of power
sequential decision-making
service delivery
service delivery system
service provider
service quality
service-delivery agency
sex discrimination

dewan saniter/kebersihan
kepuasan
pembangunan skenario
pengembangan skenario
perencanaan skenario
cendekiawan/sarjana/pandai administrasi publik
manajemen keilmuan/ilmiah
aspirasi keilmuan/ilmiah
proses penelitian dengan cermat
pemerintah tak bercela
swamanajemen
tim/kelompok kerja mandiri
managemen diri; swamanajemen
kebijakan swaatur
pembuatan keputusan semiotomatis
semiprivatisasi
sistem senior
senioritas
pemisahan kekuasaan
pengambilan keputusan berurutan
pengiriman/pelaksanaan pelayanan
sistem pelaksanaan pelayanan
penyedia/pembekal pelayanan
kualitas/mutu pelayanan
agensi pengiriman pelayanan
diskriminasi seks

sexual harassment • societal change

sexual harassment	kekerasan/pelecehan seksual
shifting variables	pergeseran peubah/variabel
short-term planning	perencanaan jangka pendek
shrinking state	penyusutan (peran) negara
signal of policy variance	sinyal/penanda variansi kebijakan
situational theory	teori situasional/situasi
skills development	pengembangan kecakapan/keterampilan
small business	perusahaan/bisnis kecil
small business administration	administrasi usaha kecil
social and economic indicators	petunjuk/indikator sosial dan ekonomi
social cleavage	pembelahan/belahan sosial
social cohesion	kohesi sosial
social conflict	konflik sosial
social context	konteks sosial
social control	kontrol/pengawasan sosial
social equality	persamaan sosial
social equity	pemerataan/keadilan sosial
social expenditure	pengeluaran sosial/belanja sosial
social force	kekuatan/tekanan sosial
social fund	dana sosial
social good	barang sosial
social indicator	indikator sosial
social insurance program	program asuransi sosial
social issue	isu sosial
social policy	kebijakan sosial
social problem	masalah sosial
social regulatory policy	kebijakan pengaturan sosial
social responsibility	pertanggungjawaban sosial
social safety net	jaring pengaman sosial
social security	keamanan sosial
social security program	program keamanan sosial
social spending	belanja sosial
social stratum	strata/pelapisan sosial
social welfare	kesejahteraan sosial
societal change	perubahan kemasyarakatan

societal policy activity • state-civic organization relationship

societal policy activity	aktivitas kebijakan kemasyarakatan
soft bureaucracy	birokrasi lunak
solution analysis	analisis solusi
span of control	rentang kendali/kontrol
specialisation	spesialisasi
specific policy	kebijakan spesifik/khusus
specific program	program spesifik/khusus
spending cuts	potongan pengeluaran
spillover effect	efek pelimpahan
spoil system	sistem hasil perang
stability of relationship	stabilitas hubungan
stable democracy	demokrasi mantap/stabil
stable government	pemerintahan mantap/stabil
staff agency	keagenan/agensi staf
staff management	manajemen staf
stages of policy	tahapan kebijakan
stagflation	stagflasi
stakeholder	stakeholder; pemegang saham
stakeholder management	manajemen stakeholder/pemegang saham
stakeholders analysis	analisis stakeholder/pemilik kepentingan
standard of living	standar kehidupan
standard operating procedure	prosedur operasi standar
standards of conduct	standar perilaku
standards of service	standar pelayanan
state action	tindakan negara
state building	pembangunan negara
state enterprise	perusahaan negara
state financial authority	otoritas/kewenangan keuangan negara
state intervention	intervensi/campur tangan negara
state legislative assembly	majelis legislatif negara
state public service	layanan publik negara
state revenue	hasil/pendapatan negara
state-civic organization relationship	hubungan organisasi negara-siviks (masyarakat/warga negara)

statement of objectives • strategic policy capacity

statement of objectives	pernyataan tujuan/objektif
state-oriented society	masyarakat (ber)orientasi negara
static management	manajemen statik
status quo policy	kebijakan status quo
statutory body	badan hukum/berstatuta
steering committee	komite pengarah
steering not rowing	<i>steering not rowing</i>
step of policy	tahapan kebijakan
strategic approach	pendekatan strategik
strategic business unit planning	perencanaan satuan bisnis strategik
strategic capacity	kapasitas strategik
strategic change	pendekatan/perubahan strategik
strategic choice	pilihan strategik
strategic consideration	pertimbangan strategik
strategic decisions	keputusan strategik
strategic development	pembangunan strategik
strategic framework	kerangka strategik
strategic gap	kesenjangan strategik
strategic gap analysis	analisis kesenjangan strategik
strategic hamlet	désa strategik
strategic human capital	modal manusia strategik
strategic human resource development	pengembangan sumber daya manusia strategik
strategic human resource management	manajemen sumber daya manusia strategik
strategic issue	isu strategik
strategic leadership	kepemimpinan strategik
strategic management	manajemen strategik
strategic management model	model manajemen strategik
strategic manager	manajer strategik
strategic mission	misi strategik
strategic operation	operasi strategik
strategic option	opsi strategik
strategic planning	perencanaan strategik
strategic planning model	model perencanaan strategik
strategic policy capacity	kapasitas kebijakan strategik

strategic policy framework • substantive policy

strategic policy framework	kerangka kebijakan strategis
strategic policy option	opsi kebijakan strategis
strategic priority-setting process	proses penyetingan/penetapan prioritas strategis
strategic process	proses strategis
strategic public administrator	administrator publik/negara strategis
strategic results areas	wilayah hasil strategis
strategic task	tugas strategis
strategic thinking	pemikiran strategis
strategic vision	visi strategis
strategy adoption	adopsi strategi
strategy change cycle	siklus perubahan strategi
strategy environment	lingkungan strategi
strategy implementation	implementasi/pelaksanaan strategi
strategy priority	prioritas strategi
strategy thinking	pemikiran strategi
strategy/policy value chain	rantai nilai strategi/kebijakan
street level bureaucracy	birokrasi pelaksana
strike	pemogokan; mogok
strip-mining regulation	regulasi pengaturan pembukaan pertambangan; pembukaan pertambangan
strong bureaucracy	birokrasi kuat
structural adjustment program	program penyesuaian struktural
structural adjustment	penyesuaian struktural
structural arrangements of bureaucracy	pengaturan struktural birokrasi
structural change	perubahan struktural
structural imperative	imperatif struktural
structural organisation theory	teori organisasi struktural
structural policy	kebijakan struktural
structural relationship	hubungan struktural
structure and process	struktur dan proses
structure-agency debate	perdebatan struktur-agensi
subgovernment	subpemerintah
subsidiary	tambahan; bantuan; alat penolong
substantive policy	kebijakan substantif

substantive problem • systems theory

substantive problem	masalah substantif
subsystem politics	politik subsistem
success criteria	kriteria kesuksesan
success factor	faktor keberhasilan
superconductivity policy	kebijakan superkonduktivitas
supplementary policy-maker	pembuat kebijakan suplementer
supplier performance	kinerja penyedia/rekanan
supply-side role	peran(an) sisi penawaran
sustainable development	pembangunan berkesinambungan
sustainable management	manajemen berkesinambungan
SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analysis	analisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman
symbolic policy	kebijakan simbolik
system maintenance	pemeliharaan sistem
system model	model sistem
systematic re-engineering	perekayasaan ulang sistematis
systemic agenda	agenda sistemik
systems model	model sistem
systems theory	teori sistem

T

tacit collusion	kolusi diam-diam; kolusi tersembunyi; pakatan tersembunyi
tall hierarchy	hierarki tinggi
target group	kelompok sasaran
target population	populasi target/sasaran
task force	gugus tugas
tax reduction policy	kebijakan pengurangan pajak
team work synergy	sinergi kerja tim
technical feasibility	kelayakan teknik
techniques of system analysis	teknik analisis sistem
technocrat	teknokrat
technocratic counselling	penyuluhan teknokratik
technological change	perubahan teknologi
technology policy	kebijakan teknologi
telecommunications policy	kebijakan telekomunikasi
tentative strategy	strategi tentatif/semntara
teory of cybernetics	teori sibernetik
territorial decentralization	desentralisasi teritorial/wilayah
territorial princes	pangeran wilayah
territorial princess	penguasa (perempuan) teritorial
territorial right	hak teritorial/wilayah
Thatcherism	Thatcherisme
theoretical forecasting	peramalan teoretis
theoretical reflection	refleksi teoretis
theory of cybernetics	teori sibernetik
theory of unethical behaviour	teori tingkah laku/perilaku taketika
think-tank	think-tank/kumpulan pemikir

threat of sanction • trouble shooting

threat of sanction	ancaman sanksi
tone of management	nada manajemen
top management	manajemen puncak
top-down control	pengawasan atas-bawah
top-down planning	perencanaan atas-bawah/dari atas
total quality management	manajemen kualitas total; mutu total
total quality service	pelayanan kualitas/mutu total
tractability problem	masalah mudah dikerjakan
trade association	asosiasi (per)dagang(an); perserikatan perdagangan
trade secret	rahasia dagang
trade union movement	gerakan serikat dagang
traditional authority	kewenangan/otoritas tradisional
traditional model	model tradisional
traditional public administration	administrasi publik/negara tradisional
traditional public management	manajemen publik tradisional
traditional society	masyarakat tradisional
traffic control	pengawasan lalu lintas
training policy	kebijakan pelatihan
trait theory	teori sifat
transformation of public policy	transformasi kebijakan publik
transformational leadership	kepemimpinan transformasional
transitional economy	ekonomi transisi
transitional grant	hibah/bantuan transisi
transitional justice	keadilan transisi/peralihan
transportation policy	kebijakan perhubungan/transportasi
trend analysis	analisis tren
trend setting decision	keputusan pengesetan tren
tribunal	tribunal
trouble shooting	pemicu masalah

U

ultra-vires
uncontrollable expenditure
Under Secretary
unitary government
unity of command
unofficial participant
urban development
urban planning
urban policy
urban rehousing

ultra-vires
pengeluaran/belanja tak terkontrol
Sekretaris Muda/Kedua
pemerintahan kesatuan
kesatuan perintah
peserta/partisipan takresmi
pembangunan/lingkungan kota
perencanaan kota
kebijakan perkotaan
pemukiman-kembali kota

V

value added tax	pajak nilai tambah
value creation	kreasi/penciptaan nilai
value exploration	eksplorasi nilai
value of improvement	nilai perbaikan/kemajuan
value of money	nilai uang
value of pursuing	nilai pengejaran
value shifts	pergeseran nilai
value systems	sistem nilai
valued input	masukan/keluaran ternilai
vertical coordination	koordinasi vertikal
vertical organisation	organisasi vertikal
vigilance committee	komite kewaspadaan
virement	virement
vision	visi
vision statement	pernyataan visi
visionary leadership	kepemimpinan visioner/visional
voluntary organization	organisasi sukarela
voluntary policy instrument	instrumen kebijakan sukarela
voluntary service	pelayanan sukarela

W

water resources policy	kebijakan sumber daya perairan
water supply policy	kebijakan penyediaan air
weak bureaucracy	birokrasi lemah
Weberian bureaucracy	birokrasi Weberian/Weber
Weberian Characteristics	ciri-ciri/karakteristik
Weberwelfare state	negara kesejahteraan
well-structured problem	masalah/ihwal terstruktur baik
Westminster countries	negara-negara Westminster
Westminster model	model Westminster
white collar worker	pekerja kerah putih
Whitehall model	model Whitehall
Widdicombe report	laporan Widdicombe
work ethic	etika kerja
work motivation	motivasi kerja
work process	proses pekerjaan
world development	pembangunan dunia

Y

yearly assessment

penilaian tahunan

Z

zero-based budgeting
zero-defect

anggaran berbasis nol
tanpa cacat

EKONOMI POLITIK

A

absolute advantage	keunggulan absolut/mutlak
absolute poverty	kemiskinan absolut
abstract cost	biaya/pengeluaran abstrak
adverse selection	pemilihan sakal/berlawanan
agencification	agensifikasi
aggregate capital	modal agregat
aggregate demand	permintaan agregat
aggregate production	produksi agregat
aggregate social works	kerja sosial agregat
aggregate supply	penawaran agregat
agrarian community	komunitas agraris
Ali-Baba	Ali-Baba
allocation	alokasi
altruism	altruisme; paham altruis
altruistic	altruistik
anarchism	anarkisme; paham anarki
anarcho capitalism	anarkokapitalisme; paham anarko- kapitalis
anti-capitalist	antikapitalis
anti-trust	anti-trust
anti-trust law	hukum/undang-undang anti-trust
appropriation bill	rekening/bill peruntukan
arbitrariness	kesewenang-wenangan
Asian Development Bank (ADB)	Bank Pembangunan Asia
asiatic mode of production	mode produksi asiatik
asymmetric information	informasi asimetrik

authorisation bill • anaverage profit

authorisation bill

authoritarian corporatist framework

anaverage profit

rekening otorisasi

kerangka kerja korporatis otoritari

keuntungan rata-rata

B

bail out
balance of payment
balance of trade
balanced budget
banana republic
barriers to entry
barter
barter system
barter trade
basic structure
benefit
bilateralism
black market
block regionalism

bourgeois economy
bourgeois revolution
boycott
Bretton Wood System
budget
budget deficit
budget surplus
bureaucratic capture
business cycle
business proxy

bail out
neraca pembayaran
neraca perdagangan
anggaran berimbang
negara boneka
sekat masuk
barter
sistem barter
perdagangan barter
struktur dasar
untung; manfaat; faedah
bilateralisme; paham bilateral
pasar gelap
regionalisme blok; paham blok
regional
ekonomi borjuis
revolusi borjuis
boikot
Sistem Bretton Wood
anggaran
defisit anggaran
surplus anggaran
penawaran birokratik
siklus/daur bisnis
proksi bisnis

C

capital	modal; kapital
capital development	perkembangan modal/kapital
capital export	ekspor modal
capital flight	pelarian modal
capital flow	arus/aliran modal
capital gains	perolehan modal
capital gains tax	pajak perolehan modal
capital goods industry	industri barang modal
capital growth	pertumbuhan modal
capital market	pasar modal
capitalist class	kelas kapitalis
capitalist community	komunitas kapitalis
capitalist economy	ekonomi kapitalis
capitalist ethic	etika kapitalis
capitalist reformism policy	kebijakan reformasi kapitalis
captive customer	<i>captive customer</i>
captive market	<i>captive market</i>
captured agency	agensi tawanan
captured market	pasar tawanan
cash flow	aliran dana
center-periphery relations	hubungan pusat-pinggiran
central bank	bank sentral
central planning	perencanaan terpusat
ceteris paribus	<i>ceteris paribus</i>
cheap labour	tenaga kerja murah
check and balance	cek dan balans
chicago school of economics	mazhab ekonomi Chicago

choi moi (Vietnam) • conspiracy theory

choi moi (Vietnam)	reformasi ekonomi/choi moi
citizens sovereignty	kedaulatan warga negara
civil liberty	kebebasan sipil
civil rights	hak sipil
class	kelas
class conflict	konflik kelas
class interest	kepentingan kelas
class polarization	polarisasi kelas
class relations	relasi kelas
class struggle	perjuangan kelas
classical economics	ekonomi klasik
classical political economy	ekonomi politik klasik
clientalism	klientalisme; paham kliental
clientalist structure	struktur klientalis
coalition of minorities	koalisi minoritas
coffee money	uang pelicin
collaboration	kolaborasi; kerja sama
collaborative trade liberalisation	liberalisasi perdagangan koloratif
collective consumption goods	barang konsumsi kolektif
collective goods	barang kolektif
collectivisation	kolektivisasi; pengolektifan
collectivism	kolektivisme
collectivity	kolektivitas
command economy	ekonomi komando
commerce clause	klausul perdagangan
Commercial Revolution	Revolusi Komersial/Perdagangan
commercialis	komersialis
commercialization	komersialisasi
comparative statistics	statistik perbandingan
competitive advantage	keunggulan kompetitif
competitive development	pembangunan kompetitif
complementary goods	barang pelengkap
comprador	komprador
conflict resolution	resolusi konflik
conspicuous consumption	konsumsi nyata/mengemuka
conspiracy theory	teori konspirasi

constant dollars • cyclical majority

constant dollars	dolar konstan
consumer goods	barang konsumen
consumer price index (cpi)	indeks harga konsumen
contract out	luar kontrak
coolie labour	kuli kasar; kerja kuli
co-ordination of expectations	koordinasi pengharapan
corporate special interest system	sistem kepentingan khusus korporat
corporate welfare	kesejahteraan korporat
corporated body	badan terkorporat
corporation de facto	korporasi de facto
corporatisation	korporatisasi
cost sharing	berbagi biaya/beban
council for mutual economic aid	majelis bantuan ekonomi bersama
crony capitalism	kapitalisme kroni; paham kapitalis kroni
cross pressures	tekanan silang
cultural revolution	revolusi kebudayaan
currency convertability	nilai tukar mata uang
current account surplus	surplus perhitungan mata uang; surplus rekening koran
current dollars	dolar yang berlaku
customs union	perhimpunan adat
cyber culture	budaya siber
cyclic preferences	keinginan melingkar
cyclical majority	mayoritas siklis/melingkar

D

debt	utang
debt slavery	perbudakan utang
decapitalisation	dekapitalisasi
decisive set	set penentuan
deficit financing	penganggaran defisit
deflation	deflasi
deliberative	runding
demand	permintaan; tuntutan
demand curve	kurva permintaan/tuntutan
demand orientation	orientasi permintaan/tuntutan
demand schedule	jadwal permintaan/tuntutan
demerit goods	barang cacat/keliru
depression	penurunan; penekanan; depresi
deregulate	tak mengatur; deregulasi
derived demand	permintaan terasalan/turunan
deterministic demand	permintaan menentukan/deterministik
devaluation	devaluasi; penurunan nilai uang
development constraint	kendala/hambatan pembangunan
development oriented	berorientasi pembangunan
developmental state	negara berkembang
dictatorship	kediktatoran
diminishing returns	pengembalian berkurang
dirigism	dirigisme; paham dirigis
discount rate	kadar diskon/potongan; harga potongan
discounted	terdiskon; terpotong
distribution of values	distribusi/pembagian nilai
divisibility	dapat dibagi; terbagikan

doi moi • dynamic flexibility

doi moi

domestic bourgeoisie

domestic economic system

domestic market effect

dualism

dumping

dyadic

dynamic flexibility

doi moi; reformasi politik

borjuis domestik

sistem ekonomi domestik

efek/akibat pasar domestik

dualisme; paham dualis

dumping

diadik

kelenturan/fleksibilitas dinamis

E

economic change	perubahan ekonomi
economic conservatism	konservatisme ekonomi; paham konservatif ekonomi
economic determinism	determinisme ekonomi
economic entrepreneur	wirusaha/wiraswasta ekonomi
economic ideology	ideologi ekonomi
economic independence	kemerdekaan/independensi ekonomi
economic indicator	indikator ekonomi
economic infrastructure	infrastruktur ekonomi
economic irrationality	ketakrasionalan/irasionalitas ekonomi
economic leadership	kepemimpinan ekonomi
economic liberalisation	liberalisasi ekonomi
economic man	manusia ekonomi
economic policy	kebijakan ekonomi
economic populism	populisme/paham populi ekonomi
economic power	kuasa ekonomi
economic regionalism	regionalisme ekonomi; paham regional ekonomi
economic resource	sumber daya ekonomi
economic sanction	sanksi ekonomi
economic slowdown	kemunduran ekonomi
economic socialism	sosialisme ekonomi; paham sosialis ekonomi
economic sovereignty	kedaulatan ekonomi
economic summit	sidang puncak ekonomi
economic system reform	reformasi sistem ekonomi
economic threshold	ambang batas ekonomi

economic warfare • externalities

economic warfare	peperangan ekonomi
effective tax rate	kadar pajak efektif
efficiency price	harga efisiensi
egalitarian society	masyarakat egaliter
elasticity	elastisitas
elit mass gap	kesenjangan massa elit
embeded autonomy	otonomi terpancang
embeded mercantilism	merkantilisme terpancang; paham merkantilis terpancang
eminent domain	domain mulia/istimewa
employment policy	kebijakan pekerjaan
entitlement	pemberian hak
entitlement program(me)	program/rancangan pemberian hak
equilibrium price	harga keseimbangan
equity	keadilan
ersatz capitalism	kapitalisme semu/ersatz; paham kapitalis semu
european common market	pasar bersama eropa
excess production	produksi berlebih
exchange value	nilai tukar
excludability	ketersisihan
excludable	tersisihkan
expected value	nilai harapan/terharap
explanation	penjelasan
export manufacturing	pemanufakturaran barang
export oriented industrialisation	industrialisasi berorientasi ekspor
export processing industry	industri pemrosesan barang ekspor
externalities	eksternalitas

F

factor of production	faktor produksi
fair deal	pakatan jujur
fairness doctrine	doktrin kejujuran
federal reserve system	sistem cadangan federal
financial system	sistem keuangan/finansial
fiscal impact	dampak fiskal
fiscal policy	kebijakan fiskal
fiscal year	tahun fiskal
fixed deposit investment	investasi deposito tetap
flat tax	pajak rerata
foreign capital displacement	pengalihan modal asing
foreign direct investment	investasi langsung asing
foreign exchange	pertukaran asing
free enterprise economy	ekonomi perusahaan bebas
free labour production	produksi pekerja lepas/buruh bebas
free market	pasar bebas
full employment	bekerja penuh

G

general special preference
global capital
global consumerism

global context
global governance
gold standard
great society
great society program
group-oriented
growth theory
growth triangle

preferensi khusus umum
modal global
konsumerisme global; paham kon-
sumer global
konteks global
tata kelola pemerintahan global
standar emas
masyarakat raya
program masyarakat raya
orientasi kelompok
teori pertumbuhan
segitiga pertumbuhan

H

hard currency

head start

hot money

human labour production

human nature

hyperinflation

mata uang utama

mulai terdepan

uang panas

produksi pekerja manusia

hakikat/alam manusia

hiperinflasi

I

ikhtilaf	<i>ikhtilaf</i>
imf-world bank conference	konferensi bank dunia-imf
immigrant labour	pekerja imigran
imperfect competition	kompetisi/persaingan taksempurna
import quota	kuota impor
import substituting industrialisation	industrialisasi pensubstitusian impor
import-substitution industrialisation	industrialisasi substitusi-impor
import-substitution strategy	strategi-substitusi impor
inalienable rights	hak milik tak berpindah
incentive	insentif
incentive system	sistem insentif
income class	kelas pendapatan
income effects	efek pendapatan
income inequality	ketaksamaan/ketakmerataan pendapatan
income policy	kebijakan pendapatan
income redistribution	redistribusi pendapatan; pembagian kembali pendapatan
income security	keamanan pendapatan
income security programme	program keamanan pendapatan
income tax	pajak pendapatan
incorporation	inkorporasi
incrementalism	inkrementalisme; paham inkremental
indexation	indeksasi
individual property rights	hak milik individu
inducements-contribution balance	keseimbangan kontribusi dorongan
industrial body	badan industrial

industrial bourgeoisie • issue space

industrial bourgeoisie	borjuis industrial
industrial democracy	demokrasi industrial
industrial organization theory	teori organisasi industrial
industrial policy	kebijakan industrial
industrial policy conflicts	konflik kebijakan industrial
industrial retardation	perlambatan industrial
industrial society	masyarakat industri
industrial transformation	transformasi industrial
industrial warefare	perangkat industrial
industrial welfare	kesejahteraan industrial
information asymmetry	asimetri informasi
infrastructure investment	investasi infrastruktur
instrumentalist	instrumentalis
intellectual property rights	hak milik intelektual
intensity of preference	intensitas keinginan/preferensi
interest rate(s)	kadar/nilai modal
intermediate goods	barang perantara
international comprador	komprador internasional
international labour office	kantor pekerja internasional
international labour organization (ilo)	organisasi pekerja internasional
international monetary fund (imf)	dana moneter internasional
international order	tatanan internasional
internationalization	internasionalisasi
iron law of oligarchy	hukum besi oligarki
iron law of wages	hukum besi upah
irrelevant alternatives	alternatif takrelevan
islamic economy	ekonomi islamis
issue space	ruang isu

J

judicial review

kaji ulang hukum; tinjauan judicial

L

labour control	kendali pekerja
labour cost	biaya pekerja
labour economics	ekonomi pekerja
labour flexibility	keluwesan pekerja
labour market	pasar pekerja
labour market deregulation	deregulasi pasar pekerja
labour market reform	reformasi pasar pekerja
labour needs	kebutuhan pekerja
labour organisation	organisasi pekerja
labour productivity growth	pertumbuhan produktivitas pekerja
labour shortages	kekurangan pekerja
laissez-faire capitalism	kapitalisme saing bebas; kapitalisme laissez-faire
laissez-faire democracy	demokrasi saing bebas/ <i>laissez-faire</i>
laissez-faire leadership	kepemimpinan saing bebas/ <i>laissez-faire</i> faire
laissez-faire unionization	penyatuan saing bebas/ <i>laissez-faire</i>
law of comparative advantage	hukum keunggulan komparatif/ber- banding
law of demand	hukum permintaan
law of diminishing returns	hukum keuntungan berkurang
law of supply	hukum penawaran
law of the concentration of capital	hukum konsentrasi modal
left-wing economic policy	kebijakan ekonomi sayap kiri
levy	levi
liberal corporatist structure	struktur korporatis liberal
liberal perspective	perspektif liberal

liberalization of trade • luxurious goods

- liberalization of trade	liberalisasi perdagangan
libertarianism	libertarianisme; paham libertarian
load shedding	curah beban
long-run participation value	nilai partisipasi jangka panjang
long-term performance	kinerja jangka panjang
lumpy expenditure	pengeluaran bergumpal
luxurious goods	barang mewah

M

macroeconomics	makroekonomi
marginal analysis	analisis marjinal
marginal cost	biaya marjinal
marginal productivity	produktivitas marjinal
marginal rate of return	kadar marjinal keuntungan
market irrationality	ketakrasionalan/irasionalitas pasar
market socialism	sosialisme pasar; paham sosialis pasar
maximin regret	sesal sekali
maximising	memaksimalkan
maximization	pemaksimalan
mercantile realism	paham realis/realisme merkantil
mercantilist system	sistem merkantil
merit goods	barang jasa
microeconomics	mikroekonomi
minimal decisive set	set penentuan minimal
minimal state	negara minimal
minimum wages	upah minimum
modern imperialist	imperialis modern
monetary policy	kebijakan moneter
monetary system	sistem moneter
money politics	politik uang
money stock	stok/sediaan uang
money supply	penawaran uang
monopolistic capitalism	kapitalisme monopolistik
monopolistic noncapitalism	nonkapitalisme monopolistik
monopsony	monopsoni

multi-dimenzional • mutually exhaustive

multi-dimenzional
multilateralism
mutually exclusive
mutually exhaustive

multidimensional
multilateralisme; paham multilateral
tak berdamai; bertolak belakang
perbedaan sempurna

N

national comprador	komprador nasional
national debt	utang negara/nasional
national expenditure	pengeluaran/belanja nasional
national income	pendapatan nasional
nationalised industries	industri milik negara
nationalist perspective	perspektif nasionalis
natural cost	biaya alami/hakiki
natural monopoly	monopoli alami/hakiki
neoclassic	neoklasik
neo-classical economics	ekonomi neoklasik
neo-corporatism	neokorporatisme; paham neokorporatis
neo-fascism	neofasisme; paham neofasis
neutral economic zone	zona ekonomi netral
newly industrializing economies (nie)	ekonomi industri baru
nonarbitrary	nonarbitrer
nondictatorship	takdediktatoran
nonincome class	kelas tak berpenghasilan
nonperforming loan	pinjaman gratis
nonperversity	tanpa kerusakan batin
nonprobabilistic	ketakmungkinan
nonrestriction	nonrestriksi; tak terbatas
nonstructuralist theory	teori nonstrukturalis
normative	normatif
numerical	numerik; berangka

O

open market operation
open regionalism

opportunity cost
organisation of petroleum exporting
countries (opec)
organizational process

operasi pasar terbuka
regionalisme terbuka; paham regional
terbuka
biaya yang pantas/layak
organisasi negara pengekspor minyak
proses organisasi

P

paid labour	pekerja upah
pareto principals	prinsip pareto
participative flexibility	fleksibilitas/keluwesan partisipatif
paternalism	paternalisme; paham paternalis
path dependency	ketergantungan jalan
patrimonial	patrimonial
patronage structure	struktur patronase/perlindungan
perfect competition	kompetisi/persaingan sempurna
phillip curve	kurva phillip
philosophical radicalism	radikalisme berfilsafat
planned economy	ekonomi terencana
policy competition	kompetisi/persaingan kebijakan
policy convergence	pemusatan/penumpuan kebijakan
policy coordination	koordinasi kebijakan
political action committee (pac)	komite tindakan/aksi politik
political entrepreneur	wirausaha/wirawasta politik
political ethics	etika politik
political leadership	kepemimpinan politik
political realism	realisme politik; paham realis politik
poll tax	pajak kepala
positive association	asosiasi positif
positive-sum game	permainan menang-menang
positivist school of thought	aliran pemikiran positivis; mazhab pemikiran positivis
post-colonial state	negara pascakolonial
post-colonialism	pascakolonialisme

post-feminism • regional links

post-feminism	pascafeminisme
poverty	kemiskinan
power structure	struktur kekuasaan
pre-capitalist economy	ekonomi prakapitalis
pre-industrialization	praindustrialisasi
price control	kendali harga
price support	dukungan harga
private enterprise	perusahaan privat
private property	milik privat
private property rights	hak milik privat
private sector	sektor privat
privatisation	privatisasi
producer goods	barang produser/penghasil
product cycle	siklus hasil
production decision	keputusan produksi
productive labour production	produksi pekerja produktif
profit rates	kadar keuntungan
progressive income tax	pajak penghasilan progresif
progressive tax	pajak progresif
progressive taxation	perpajakan progresif
prosperity neighbour policy	kebijakan tetangga makmur
protectionist policy	kebijakan proteksionis
protective trade agreement	perjanjian lindung dagang
public choice framework	kerangka kerja pilihan publik
public debt	utang negara
public sector	sektor publik
rational expectations	harapan rasional
reaganomics	ekonomi reagan; reaganomik
real dollars	dolar nyata
reconstruction of markets	rekonstruksi pasar
redistribution	redistribusi; pembagian kembali
redistributive function	fungsi redistributif
regional broadcasting centre	pusat penyiaran regional
regional free trade agreements	perjanjian perdagangan bebas regional
regional links	tautan/pautan regional

regionalism • runaway inflation

regionalism	regionalisme; paham regional
regression toward the mean	regresi ke arah rerata
regressive tax	pajak regresif
relation of production	hubungan produksi
rent seeking	pemburuan rente
rentier class	kelas perente
rent-seeker	pemburu rente
rent-seeking behavior	perilaku memburu rente
rent-seeking capitalism	kapitalisme memburu rente
reserve requirement	prasyarat cadangan
resource inequality	ketaksetaraan sumber daya
right-to-work laws	hukum/undang-undang hak kerja
right-wing economic policy	kebijakan ekonomi sayap kanan
risk analysis	analisis risiko
roaring 20s	raungan/pekikan 20-an
runaway inflation	inflasi berlari

S

satisfy	memuaskan
saving rate	kadar tabungan
schedule supply	penawaran jadwal
scientific consensus	konsensus keilmuan
selection rules	aturan seleksi/pemilihan
self-enforcing	menguatkan/memaksa diri
sequestration	penyitaan
shortage economy	ekonomi kekurangan
single-peaked curve	kurva puncak tunggal
sit-down strike	pemogokan duduk
skill development levy	iuran pengembangan kecakapan
slave	budak
sleeping partner	mitra persero takkerja
smart partnership	kemitraan cerdas
social justice	keadilan sosial
social policy	kebijakan sosial
social welfare	kesejahteraan sosial
socialisation of resources	sosialisasi sumber daya
socio anarchism	paham anarki/anarkisme sosial
socio-economic status	status ekonomi sosial
spatial economic	ekonomi ruang/spasial
special interest group	kelompok kepentingan khusus
specialization	spesialisasi; kekhususan
stagflation	stagflasi
stare decisis	keputusan menjang
state enterprise reform	reformasi perusahaan negara
state-owned enterprises	perusahaan milik negara

stock exchange • system theory

stock exchange	bursa saham
stock market	pasar saham
strike	pemogokan
strike authorization vote	undi suara otorisasi pemogokan
structural adjustment	penyesuaian struktural
structural adjustment programme	program penyesuaian struktural
structural unemployment	pengangguran struktural
structuralist	strukturalis
subjectivity	subjektivitas
suboptimal	suboptimal
suboptimality	suboptimalitas
subregionalism	subregionalisme; paham subregional
subsidy	subsidi
substitute goods	barang substitusi/pengganti
superfund	superdana
supply	penawaran
supply and demand	permintaan dan penawaran
supply curve	kurva penawaran
supply orientation	orientasi penawaran
supply-side economics	ekonomi sisi penawaran
sustainable economy	ekonomi berkesinambungan/berkelanjutan
system theory	teori sistem

T

tariff barriers	hambatan tarif
tariqa	tariqa
taxation	pemajakan
taxation policy	kebijakan pemajakan
theory of value	teori nilai
timber politics	politik main kayu
total cost	biaya total/keseluruhan
trade policy	kebijakan perdagangan
trade restriction	pembatasan/restriksi perdagangan
trade-off analysis	analisis keseimbangan
transaction cost	biaya transaksi
transfer payment	pembayaran transfer/pemindahan/ pengiriman
transnational neo-liberalism	neoliberalisme transnasional; paham neoliberal transnasional
transportation cost	biaya transportasi
treasury board	dewan perbendaharaan/keuangan
two sided test	uji dua sisi

U

undominated	tak didominasi/terdominasi
unemployment insurance	asuransi pengangguran
unemployment rate	kadar pengangguran
unfunded mandate	mandat tanpa dana
unplanned economy	ekonomi tak terencana
upper-middle class	kelas menengah atas
usury	riba

V

value preferences
variable-sum game
vote trading

keinginan/preferensi nilai
permainan semua variabel/menang
dagang suara/pilihan

W

war on poverty
welfare provision
withholding tax
worker compensation
working hour

perang terhadap kemiskinan
perlengkapan/syarat kesejahteraan
pajak penangguhan
kompensasi/ganti rugi pekerja
jam kerja

Z

zero inflation

inflasi nol; tak ada inflasi

HUBUNGAN INTERNASIONAL

A

20 years crisis	krisis 20 tahun
abetment	sekongkol
absolute power	kekuasaan/kekuatan mutlak
absolute weapon	senjata mutlak
abstain	abstain
abstention	abstensi
act of state	tindakan negara
action oriented	berorientasi tindakan
active deterrence	penangkalan aktif
actual power	kekuasaan nyata
administration of justice	administrasi keadilan
adversary party	pihak lawan
advisory council	dewan penasihat
aerial bombing	pengeboman udara
affirmative action	tindakan afirmatif
agent provocateur	agen provokator
aggression	agresi
agitation	agitasi
air defence	pertahanan udara
Air Defence Artillery (ADA)	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud); ADA
Air Defence Identification Zone (ADIZ)	Zona Identifikasi Pertahanan Udara
air operation	operasi udara
air strike	serangan udara
air superiority	keunggulan udara

air warfare • anti-Comintern

air warfare	peperangan udara
airborne early warning	peringatan dini udara
airborne forces	pasukan terjun payung
airborne regiment	resimen terjun payung
airborne warning and control system (AWACS)	sistem peringatan dan pengawasan udara; AWACS
aircraft carrier	kapal induk
airhead	tumpuan udara
airmobile forces	pasukan gerak udara
air-to-air missile	peluru kendali/rudal udara ke udara
align	bersekutu
Aligned Nations	Negara-Negara Sekutu
alignment	persekutuan
alliance	aliansi
Allied Powers	Kekuatan Sekutu
allies	pihak sekutu
allocation of power	alokasi kekuatan/kekuasaan
amalgamation	amalgamasi
ambassador at large	duta besar berkuasa penuh
amnesty	amnesti
Amnesty International	Amnesti Internasional
amphibious (military)	amfibi (militer)
anarchism	anarkisme
anarchist	anarkis
anarcho-syndicalism	anarki sindikalisme
anarchy	anarki
Anglo-Malaya Defence Agreement	Perjanjian Pertahanan Inggris- Malaysia
annexation	aneksasi
Antiballistic Missile (AMB)	Peluru Kendali Antibalistik; Rudal Antibalistik; ABM
Antiballistic Missile Defence	Pertahanan Peluru Kendali Anti- Balistik; Pertahanan Rudal Anti-Balistik
anti-Comintern	anti-Komintern

Anti-Facist People's Freedom League • Asia Europe Meeting

Anti-Facist People's Freedom League (AFPFL)	Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis; AFPFL
anti-Semitism	anti-Semistisme; anti-Yahudi
antisubmarine warfare	peperangan antikapal selam
apartheid	apartheid
apathy	apati
apolitical	apolitis
appeal tribunal	tribunal imbauan
appeasement	penenangan
Arab Israeli War	Perang Arab Israel
Arab League	Liga Arab
Arab Maghribi	Arab Magribi
Arab-Israeli conflict	konflik Arab-Israel
arbitrary (power)	arbiter
arbitrate	menimbang
archipelagic principle	prinsip kepulauan
archipelagic state	negara kepulauan
archipelagic waters	perairan kepulauan
area bombing	pengeboman kawasan
area studies	studi kawasan
area target	sasaran kawasan
Armed Forces	Angkatan Bersenjata
armed insurrection	pemberontakan bersenjata
armed neutrality	netralitas/kenetralan bersenjata
armistice	gencatan senjata
armoured personnel carrier (APC)	pengangkutan pasukan bersenjata
arms control	pengendalian senjata
arms control agreement	perjanjian pengendalian senjata
arms embargo	embargo senjata
arms race	perlombaan senjata
arms trade	perdagangan senjata
arrogance of power	arogansi kekuasaan
articulation	artikulasi
artillery regiment	resimen artileri
ASEAN Concord	Kesepakatan ASEAN
ASEAN Regional Forum (ARF)	Forum Regional Asean; ARF
Asia Europe Meeting (ASEM)	Pertemuan Asia Eropa

Asia-Pacific Economic Cooperation • Axis Power

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)	Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik; APEC
Asian-African Conference	Konferensi Asia Afrika
Association of South East Asian Nations (ASEAN) Tenggara; Asean (Perbara)	Perserikatan/Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Nations (ASEAN) Tenggara; Asean (Perbara)
asylum (politic)	suaka politik
Atlantic Charter	Piagam Atlantik
atomic free zone	zona bebas atom
attache	atase
attack group	kelompok penyerang
Australia, New Zealand, United States (ANZUS)	Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat; ANZUS
autarchy	autarki
authentic	sahih; absah
authentication	penyahihan; pengabsahan
authenticity	kesahihan; keabsahan
authoritarian	otoriter
authoritarianism	otoritarianisme
authoritative	otoritatif
authorities	pihak berwenang; otoritas
authority	kewenangan; otoritas
autocracy	autokrasi
axis of advance	poros kemajuan
Axis Power	kekuatan poros

B

Baghdad Pact	Pakta Baghdad
balance of power	perimbangan kekuatan
balance of terror	perimbangan teror
balkanization	balkanisasi; pembalkan
ballistic missile	peluru kendali/rudal balistik
ballistic missile defence	pertahanan rudal balistik
ballot	balot
Bandung spirit	Semangat Bandung
bandwagon effect	efek bandwagon
Bangkok Declaration	Deklarasi Bangkok
Bangkok Summit	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bangkok
banishment	pelarangan; pembuangan
bargaining theory	teori tawar-menawar
Baruch Plan	rencana Baruch
battleship	kapal tempur/perang
Bay of Pigs invasion	invasi Teluk Babi
beachhead	tumpuan pantai
belligerency	berperangan
Benelux countries	negara-negara Benelux
Berlin blockade	blokade Berlin
big power	kekuatan besar
bilateral	bilateral; dua pihak; dwipihak
biological warfare	peperangan biologi
biological weapon	senjata biologi
bipolar	bipolar; dwikutub
black propaganda	propaganda hitam

blast shelter • Bushido doctrine

blast shelter	perlindungan meletup
blitzkrieg	blitzkrieg
block voting	pengambilan suara blok
blockade	blokade
board of trustee	badan perwalian; majelis wali amanah
Bogota Charter	Piagam Bogota
Bolshevik Revolution	Revolusi Bolshevik
bomber	pesawat pengebom
border dispute	perselisihan perbatasan
borderless	tanpa perbatasan
bourgeois	borjuis
brain drain	pelarian intelektual; brain drain
Brezhnev Doctrine	Doktrin Brezhnev
brinkmanship	nekad bahaya (polugri); berjibaku
British Commonwealth	Persemakmuran Inggris
Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asia Growth Area (BIMP EAGA)	Kawasan/Area Pertumbuhan Asia Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, (BIMP EAGA)
buffer state	negara penyangga
buffer zone	zona penyangga
burden sharing	pembagian beban
bureaucratic	birokratik
bureaucratic politics	politik birokratik
bureaucratic-politics model	model politik birokratik
bushfire war	perang semak terbakar
Bushido doctrine	doktrin Bushido

C

cabinet	kabinet
cabinet government	pemerintahan kabinet
Cable News Network (CNN)	Jaringan Berita Kabel
calculated risk	risiko terhitung
Camp David Agreement	Perjanjian Camp David
capability	kapabilitas; kemampuan
capital ship	kapal besar
capitalism	kapitalisme
capitalist	kapitalis
capitalist system	sistem kapitalis
carpet bombing	pengeboman rata-luas
carrier group	kelompok pengangkut
carrier ship	kapal pengangkut
casus belli	alasan peperangan; <i>casus belli</i>
catalytic attack	serangan katalitik
ceasefire	gencatan senjata
center	pusat
central control	pengendalian pusat
Central Intelligence Agency (CIA)	Badan Intelijen Pusat (AS); CIA
centralisation/centralization	sentralisasi
centralised power	kekuasaan terpusat
centralism	sentralisme
centrifugal	sentrifugal
centripetal	sentripetal
cession	penyerahan wilayah
chain of command	rantai komando

chaos theory • command, control, and communications (C3)

chaos theory	teori kaos
chemical warfare	peperangan kimia
civil aviation	penerbangan sipil
civil war	perang saudara
civilian control	pengendalian sipil
clandestine	rahasia
clash of civilisation	konflik peradaban
Clash of the Titans	konflik kekuatan besar
cleavage	pembelahan
clique	klik; konco
close air support	dukungan udara erat
close defence	pertahanan erat
close support	dukungan erat
closed door policy	kebijakan/politik pintu tertutup
coalition	koalisi
co-centre periphery	pusat pinggir bersama
cohesion	kohesi
cold war	perang dingin
collective	kolektif; bersama
collective action	tindakan kolektif/bersama
collective agreement	perjanjian kolektif/bersama
collective intervention	campur tangan/intervensi kolektif/bersama
collective security	keamanan kolektif/bersama
collective self defence	pertahanan diri kolektif/bersama
collusion	kolusi
colonial	kolonial
colonial domination	dominasi kolonial
colonialism	kolonialisme
colonialist	kolonialis; penjajah
colony	koloni; tanah jajahan
combined operations	operasi campuran
Cominform	Kominform
Comintern	Komintern
command, control, and communications (C3)	komando, pengendalian, dan komunikasi

command, control, communications & intelligence (C3I) • conflict

command, control, communications & intelligence (C3I)	komando, pengendalian, komunikasi, dan intelijen
commission	komisi
commissioner	komisioner
committee hearings	dengar pendapat komite
committee of enquiry	komite penyelidikan
committee on disarmament	komite perlucutan senjata
common boundary	perbatasan bersama
common good	kebaikan bersama
common market	pasaran bersama
commonwealth	persemakmuran
Commonwealth Fund for Technical Co-operation (CFTC)	Dana Persemakmuran untuk Kerja Sama Teknis
communism	komunisme
community	komunitas; masyarakat
society	masyarakat
comparative advantage	keunggulan komparatif
comparative foreign policy	politik luar negeri perbandingan
competition	kompetisi; persaingan
contemporary state system	sistem negara kontemporer
concentration of power	konsentrasi kekuasaan
conceptual approach	pendekatan/ancangan konseptual
Concert of Europe	Konser Eropa; <i>Concert of Europe</i>
concession	konsesi
conciliation	konsiliasi
concord	kesepakatan
concurrent majority	mayoritas bersama
concurrent power	kekuasaan bersama
condemn	menghukum; mengutuk
condemnation	penghukuman; pengutukan
condottiere state	negara kondottiere
Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE)	Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa; CSCE
confidence building	pembentukan kepercayaan
confidence building measure (CBM)	tindakan pembentukan kepercayaan
conflict	perselisihan; konflik

conflict ending • countervailing strategy

conflict ending	pengakhiran konflik
conflict of interest	konflik kepentingan
conflict of value	konflik nilai
conflict regulation	pengaturan konflik
conflict resolution	resolusi konflik
conflict spectrum	spektrum konflik
conflict transformation	transformasi konflik
confrontation policy	kebijakan konfrontasi
constitution	konstitusi; UUD
constitutional amendment	amendemen konstitusi
constitutional law	hukum tata negara
consular treaty	traktat konsuler
Consultative Group on Indonesia (CGI)	Kelompok Konsultatif untuk Indonesia; CGI
containment	pembendungan
Containment Policy (US)	Politik Pembendungan (AS)
contemporaneous agreement	perjanjian serentak
contending factions	faksi bertentangan
content analysis	analisis isi
contiguous zone	zona berdampian
continental system	sistem kontinental
contingency approach	pendekatan kontingensi
convention	konvensi
conventional war	perang konvensional
conventional weapon	senjata konvensional
cordial	ramah
core	inti; pusat
correlation of world forces	korelasi kekuatan-kekuatan dunia
cost-benefit analysis	analisis untung rugi
Council for Mutual Economic Assistance (COMECON)	Dewan untuk Bantuan Ekonomi Timbal Balik; COMECON
counter espionage	kontraspijase
counter intelligence	kontraintelijen
countervailing force	kekuatan kontrabalas
countervailing power	kekuasaan kontrabalas
countervailing strategy	strategi kontrabalas

countervalue strike • Cuban missile crisis

countervalue strike	serangan kontranilai
coup d'etat	kudeta
covenant	perjanjian
covert ally	sekutu tersembunyi/tersamar
covert operation	operasi terselubung/tersamar
crime against humanity	kejahatan terhadap kemanusiaan
crisis	krisis
cronyism	kronisme
cruise missile	rudal/peluru kendali jelajah
cruiser	penjelajah
crusade	perang salib
Cuban missile crisis	krisis rudal Kuba; krisis peluru kendali Kuba

D

danger zone	daerah berbahaya
de facto	de facto
de facto government	pemerintahan de facto
de jure	de jure
decision game	permainan keputusan
decision making	pengambilan keputusan
decision making process	proses pengambilan keputusan
decision rule	peraturan keputusan
decision theory	teori keputusan
decisionless decision	keputusan tanpa putusan
decision-making power	kekuasaan pengambilan keputusan
decision-making source	sumber pengambilan keputusan
decisive role	peranan penentu
declaration	deklarasi
declaration of right/bill of rights	deklarasi hak asasi; UU hak asasi
Declaration on the South China Sea	Deklarasi mengenai Laut Cina Selatan
decolonization	dekolonisasi
decontrol	tanpa kendali
decree	dekret
defection	pembelotan
defector	pembelot
defence	pertahanan
defence identification zone	zona identifikasi pertahanan
defence policy	kebijakan pertahanan
defining situation	pendefinisian situasi
definition of issue	definisi/batasan isu
dehumanisation; dehumanization	dehumanisasi

delegate • diplomatic history

delegate	wakil; utusan; delegasi
delegated authority	kewenangan terdelegasikan
delegated legislation	legislasi terdelegasikan
delegation	pendelegasian; perutusan; perwakilan
delegation of authority	pendelegasian kewenangan
delegation of power	pendelegasian kekuasaan
democracy	demokrasi
denunciation of treaty	pemutusan traktat/perjanjian
dependencia	dependensia
dependency	ketergantungan
dependency theory	teori ketergantungan
depoliticisation/depoliticization	depolitisasi
deport	mendeportasi
deportation	deportasi
deprivation	deprivasi; penafian; penolakan
deprived groups	kelompok terdeprivasi/tercerabut/ terampas
derogation of power	pengurangan kekuasaan
desegregation	desegregasi; penghapusan perbedaan
despotism	despotisme
destroyer	kapal pembinasas; penghancur
detached attitude	sikap takterlibat
détente	peredaan ketegangan; détente
detention camp	kamp tahanan
deterrence	penangkalan
dialectical materialism	materialisme dialektis
diplomacy	diplomasi
diplomat	diplomat
diplomatic bargaining	tawar-menawar diplomatik
diplomatic coalitions	koalisi diplomatik
diplomatic communication	komunikasi diplomatik
diplomatic compromise	kompromi diplomatik
diplomatic corp	korps diplomatik
diplomatic etiquette	etiket diplomatik
diplomatic history	sejarah diplomatik

diplomatic immunity • economic linkage

diplomatic immunity	kekebalan diplomatik; imunitas diplomatik
diplomatic protection	proteksi/perlindungan diplomatik
diplomatic recognition	pengakuan diplomatik
diplomatic redress	ganti rugi diplomatik
directed-energy weapons	persenjataan energi terarah
disarmament	perlucutan senjata
discrimination	diskriminasi
disintegration	disintegrasi
dissident	penentang; pembangkang
distribution crisis	krisis distribusi
distribution of capability	distribusi kapabilitas
distribution of power	distribusi kekuasaan/kekuatan
divide and rule	pecah dan kuasai
doctrine	doktrin
doctrine of military necessity	doktrin keperluan militer
dog fight	pertempuran pesawat terbang
domestic analogy	analogi domestik
domicile	domisili
domicile principle	prinsip domisili
dominion	dominion
domino theory	teori domino
double veto	veto ganda
dualism	dualisme
dynasty	wangsa; dinasti
early warning system	sistem peringatan dini
Earth Day	Hari Bumi
Earth Summit	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi
East-West conflict	konflik Timur-Barat
economic bloc	blok ekonomi
economic blockade	blokade ekonomi
economic controls	pengendalian ekonomi
economic crisis	krisis ekonomi
economic dislocation	dislokasi ekonomi
economic linkage	pertautan/perkaitan ekonomi

economic sovereignty • European Economic Community (EEC)

economic sovereignty	kedaulatan ekonomi
economic strength	kekuatan ekonomi
economic warfare	peperangan ekonomi
European Currency Unit (ECU)	Satuan Mata Uang Eropa; ECU
egalitarian	egaliter
egalitarianism	egalitarianisme
Eisenhower doctrine	doktrin Eisenhower
embargo	embargo
emerging power	kekuatan (yang) muncul
emigration	emigrasi
empire	kekaisaran
encirclement policy	politik pengepungan
entente	kesepakatan; persetujuan; perjanjian
entente cordial	kesepakatan ramah
environmental crisis	krisis lingkungan
environmental forces	kekuatan lingkungan
envoy plenipotentiary	utusan berkuasa penuh
epistemic community	komunitas epistemik
equilibrium	keseimbangan
escalation	eskalasi; peningkatan
espionage	spionase
essential equivalence	kesetaraan esensial
ethnic cleansing	pembersihan etnik
ethnic-nationalism	nasionalisme etnik
Euro	Mata Uang Euro
European Atomic Energy Commission (Euratom)	Komisi Tenaga Atom Eropa; Euratom
European Commission	Komisi Eropa
European Community	Masyarakat Eropa
European Council	Dewan Eropa
European Court of Human Rights	Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa
European Court of Justice	Mahkamah Eropa
European Defence Community	Komunitas Pertahanan Eropa
European Economic Community (EEC)	Masyarakat Ekonomi Eropa; EEC

European Free Trade Area (EFTA) • extraterritorial status

European Free Trade Area (EFTA)	Kawasan Perdagangan Bebas Eropa; EFTA
European Monetary System (EMS)	Sistem Moneter Eropa
European Recovery Programme	Program Pemulihan Eropa
European Security Conference	Konferensi Keamanan Eropa
European Union	Uni Eropa
exclusive economic zone	zona ekonomi eksklusif; ZEE
exclusive zone	zona eksklusif
exile government	pemerintahan pengasingan
expansionism	ekspansionisme
expansionist policy	kebijakan ekspansionis
exploitation de l'home par l'home	<i>exploitation de l'home par l'home</i>
export promotion policy	kebijakan promosi ekspor
expropriation	perampasan
external policy	kebijakan eksternal
external relations	hubungan eksternal
extradition	penyerahan balik
extradition agreement	perjanjian ekstradisi
extra-territorial	ekstrateritorial
extraterritorial rights	hak ekstrateritorial
extraterritorial status	status ekstrateritorial

F

fait accompli	fait accompli
Falkland Islands War	Perang Falkland
Federal Bureau of Investigation (FBI)	Biro Investigasi Federal; FBI
financial agreement	perjanjian keuangan
financial aid	bantuan keuangan
financial crisis	krisis keuangan
financial grant	hibah keuangan
financial loan	pinjaman keuangan
financial support	dukungan keuangan
field diplomacy	diplomasi lapangan
fire arms	senjata api
fire bomb	bom api
firebase	pangkalan/lapangan tembak
firepower	daya tembak
first secretary	sekretaris pertama
first track diplomacy	diplomasi jalur pertama
First World	Dunia Pertama
first world war	Perang Dunia Pertama
first-strike	serangan pertama
fiscal crisis	krisis fiskal
Five Power Defence Arrangement (s) (FPDA)	Pengaturan Pertahanan Lima Kekuatan; FPDA
flexible	fleksibel; lentur
flexible decision	keputusan fleksibel
flexible response	respons fleksibel

floating vote • fundamentalism

floating vote	suara mengambang
Food and Agricultural Organization (FAO)	Organisasi Pangan dan Pertanian; FAO
force	kekuatan; tenaga
force deployment	penggelaran/pengerahan kekuatan
foreign affairs	masalah luar negeri
foreign affairs adviser	penasihat masalah luar negeri
Foreign Direct Investment (FDI)	Investasi Asing Langsung; FDI
foreign policy	politik/kebijakan luar negeri
foreign policy strategy	strategi politik luar negeri
foreign service	dinas luar negeri
foreign trade	perdagangan luar negeri
formula grant	hibah berformula
forward defence	pertahanan ke depan
franchises	hak pilih; waralaba
free territory	wilayah bebas
free trade	perdagangan bebas
free trade area	kawasan/area perdagangan bebas
free zone	zona bebas
French Revolution	Revolusi Prancis
front	front; depan
front-line	garis depan
full mobilization	mobilisasi penuh
function of council	fungsi dewan
functionalism	fungsionalisme
fundamental principle of international law	prinsip fundamental hukum internasional; prinsip dasar hukum internasional
fundamental purpose	tujuan mendasar/fundamental
fundamentalism	fundamentalisme

G

G-15	Kelompok 15 Negara Selatan; G-15
G-7	Kelompok 7 Negara Industri Maju; G-7
game of politics	permainan politik
game theory	teori permainan
General Agreement on Tariff and Trade (GATT)	Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan; GATT
general assembly	majelis umum
general authority	kewenangan umum
general will	kehendak umum
Geneva Convention	Konvensi Jenewa
Geneva protocol	protokol Jenewa
genocide	pemusnahan ras/etnik
geoeconomic	geoekonomi
geoeconomist	ahli geoekonomi; geoekonomis
geopolitical position	posisi geopolitis
geopolitics	geopolitik
geostrategic	geostrategi
geostrategist	ahli geostrategi; geostrategis
geostrategy	geostrategi
glasnost	glasnost; keterbukaan
global governance	kepemerintahan global
global militarisation/global militarization	militerisasi global
global politics	politik global
global trend	kecenderungan global
global village	perkampungan global

global war • Gulf War

global war	perang global
global warming	pemanasan global
globalisation; globalization	globalisasi
globalism	globalisme
good neighbour policy	politik bertetangga baik
grand strategy	strategi besar
grant	hibah
grant-in-aid	bantuan uang
great debate	perdebatan besar/utama
great depressions	depresi besar
great powers	kekuasaan besar
Greenpeace	Greenpeace
grey propaganda	propaganda samar
ground-to-air missile	rudal darat ke udara
groupthink	kelompok pemikir
guardian-state	negara penjaga/pelindung
guerilla war	perang gerilya
guerilla warfare	peperangan gerilya
guided missile	rudal terpandu
Gulf co-operation Council (GCC)	Dewan Kerja Sama Negara Teluk
Gulf War	Perang Teluk

H

habeas corpus
Hanoi Summit

hard power
hard target
head of government
head of state
hearings committee
hegemony
hegemonic stability theory
Helsinki Agreement
Helsinki Conference
Helsinki Final Act
Helsinki Process
heterogenous society
hierarchical policy making
hierarchical type
hierarchy
high politics
historicism
historiography
holocaust
holy war
homogenous society
honorary consul
Hoover Commission

habeas corpus
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Hanoi
kekuasaan kekuatan keras
sasaran keras
kepala pemerintahan
kepala negara
komite dengar pendapat
hegemoni
teori stabilitas hegemonik
Perjanjian Helsinki
Konferensi Helsinki
Akta Final Helsinki
Proses Helsinki
masyarakat heterogen/majemuk
pembuatan kebijakan hierarki
tipe hierarkis
hierarki
politik tingkat atas
historisisme
historiografi
holocaust
perang suci
masyarakat homogen
konsul kehormatan
Komisi Hoover

horizontal integration • humanitarian intervention

horizontal integration
humanitarian intervention

integrasi horizontal/mendatar
intervensi kemanusiaan

I

idealism	idealisme
identity crisis	krisis identitas
image	citra
imperialism	imperialisme
imperialist	imperialis
imperium in imperio	negara dalam negara; imperium in imperio
implementation capacity	kapasitas implementasi
implied agreement	perjanjian tersirat
in exile	dalam buangan/pengasingan
independence	kemerdekaan
independence declaration	deklarasi kemerdekaan
independent variable	variabel bebas
Industrial Revolution	Revolusi Industri
inequality	ketaksamaan
infiltration	penyusupan; infiltrasi
influence	pengaruh
informal treaty process	proses traktat/perjanjian informal
input variables	variabel masukan
institution	institusi; lembaga
institutional	kelembagaan; institusional
insurgency	pemberontakan
insurrection	pemberontakan
intelligence community	komunitas intelijen
intelligence service	dinas intelijen
inter war crisis	krisis antarperang

interactional environment • International Development Association

interactional environment	lingkungan interaksional
Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)	Rudal Balistik Antarbenua; ICBM
interdependence	saling ketergantungan
interest group	kelompok kepentingan
interference	campur tangan; gangguan
Inter-Government Maritime Consultative Organization	Organisasi Konsultatif Kelautan Antarpemerintahan
Intergovernment Organization (IGO)	organisasi antarpemerintah; IGO
intergovernmental	antarpemerintahan
Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI)	Kelompok Antarpemerintah untuk Indonesia; IGGI
Intermediate Nuclear (INF)	Nuklir Jarak Menengah
international administration	administrasi internasional
international anarchy	anarki internasional
International Atomic Energy Agency	Badan Tenaga Atom Internasional
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	Bank Internasional untuk Rekonstruksi/ Pemulihan dan Pembangunan; IBRD
international blockade	blokade internasional
international boundary	perbatasan internasional
International Civil Aviation Organization (ICAO)	Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
International Committee of the Red Cross (ICRC)	Komite Palang Merah Internasional
international communication agency	badan komunikasi internasional
international communication	komunikasi internasional
international community	komunitas internasional
international conferences	konferensi internasional
International Court of Justice	Mahkamah Internasional; Peradilan Internasional
International Criminal Police Organization (Interpol)	Organisasi Polisi Kriminal Internasional; Interpol, Polisi Internasional
International Development Association	Asosiasi Pembangunan Internasional

international exchange • international system

international exchange	pertukaran internasional
International Finance Corporation (IFC)	Korporasi Keuangan Internasional; Perusahaan Keuangan Internasional
International Fund for Agriculture Development (IFAD)	Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian
international history	sejarah internasional
International Institute of Education	Lembaga Pendidikan Internasional
international institution	lembaga internasional
international jurisprudence	yurisprudensi internasional
International Labour Organization (ILO)	Organisasi Buruh Internasional; ILO
International Law Commission	Komisi Hukum Internasional
international legal norms	norma hukum internasional
international management	manajemen internasional
International Monetary Fund (IMF)	Dana Moneter Internasional
International Olympic Committee (IOC)	Komite Olimpiade Internasional; IOC
international order	tata internasional
international organization	organisasi internasional
International Peace Research Association	Asosiasi Penelitian Perdamaian Internasional
International Political Economy	Ekonomi Politik Internasional
International Political Science Association	Asosiasi Ilmu Politik Internasional
International Postal Union	Uni/Persatuan Pos Internasional
International Red Crescent	Bulan Sabit Merah Internasional
International Red Cross	Palang Merah Internasional
international regime	rezim internasional
international relations	hubungan internasional
international safeguards	usaha perlindungan internasional
International Seabed Authority	Otoritas Dasar Laut Internasional
International Security Act (ISA)	Akta Keamanan Internasional
International Socialism	Sosialisme Internasional
international society	masyarakat internasional
international subsystem	subsistem internasional
international system	sistem internasional

International Telecommunication Union (ITU) • issue areas

International Telecommunication Union (ITU)	Uni/Persatuan Telekomunikasi Internasional; ITU
international trade	perdagangan internasional
international trade policy	kebijakan perdagangan internasional
international trade system	sistem perdagangan internasional
international tribunal	tribunal internasional
international war	perang internasional
internationalism	internasionalisme
international-non government organisation	organisasi internasional nonpemerintahan
intervening variables	variabel antara/sela
intervention	intervensi; campur tangan
interwar period	periode antarperang
Intermediate Nuclear Forces (INF)	Kekuatan Nuklir Menengah; INF
invasion	invasi
Iran-Contra scandal	skandal Iran-Contra
Irangate	Irangate
iron curtain	tirai besi
irredenta	iredenta
irredentation	iredentasi
irredentism	iredentisme
isolation	isolasi
isolationism	isolasionisme
issue areas	wilayah isu

J

jihad

joint co-operation

joint development

joint understanding

jurisdiction

jurisprudence

just in war (jus in bello)

just of war (jur ad bellum)

just war

jihad

kerja sama bersama

pembangunan bersama

kesepahaman bersama

yurisdiksi

jurisprudensi

keadilan (hukum) dalam perang

hukum perang

perang adil

K

Komitet Gosudarsvenoy Bezopanosti (KGB) Dinas Rahasia Uni Soviet; KGB
Korean war Perang Korea

L

<i>laissez faire</i>	<i>laissez faire</i>
land locked state	negara daratan (tanpa laut)
landslide victory	kemenangan besar
law of the sea convention	konvensi hukum laut
law of war	hukum perang
law of the sea warfare	hukum peperangan laut
law of treaties	hukum traktat; hukum perjanjian
League of Arab Nations	Liga Bangsa-Bangsa Arab
League of Nations	Liga Bangsa-Bangsa
legal sanctions	sanksi hukum
legal sovereignty	kedaulatan hukum
legislation	legislasi
legislative	legislatif
legitimacy	legitimasi; keabsahan
legitimacy crisis	krisis legitimasi/keabsahan
legitimate	absah
letter of credence	surat kepercayaan
letter of credit	surat kredit
liaison	penghubung; perantara
liaison officer	pejabat penghubung
liberal institutionalism	institusionalisme liberal
liberal internationalism	internasionalisme liberal
liberal reformers	pembaru/reformis liberal
liberation army	tentara pembebasan
Limbang Claim	Klaim Limbang
linkage politics	politik perkaitan/pertautan

linkage theory • low politics

linkage theory

loan

look East policy

low intensity operations

low politics

teori perkaitan/pertautan

pinjaman

kebijakan pandang ke Timur

operasi intensitas rendah

politik tingkat rendah

M

Maastricht Treaty	Traktat/Perjanjian Maastricht
Magna Charta; Magna Carta	Magna Charta/Carta
major power	kekuatan utama
Malaya Philippines Indonesia (Maphilindo)	Malaysia Filipina Indonesia (Maphilindo)
management conflict	manajemen konflik
mandate	mandat
mandated territory	wilayah mandat
mandatory power	kekuasaan mandat
manifesto	manifesto
Manila Summit	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Manilamaritime state	negara maritim
Marshall Aid	Bantuan Marshall
Marshall Plan	Marshall Plan
Marxism	Marxisme
Marxist	Marxis; pengikut paham Marx
mass movement	gerakan massa
massacre	pembunuhan massal
masses	massa
massive retaliation	pembalasan masif
mechanized infantry	infantri berkendaraan
mediation	mediasi; penengah
mediator	mediator; perantara
memorandum of agreement	memorandum/nota perjanjian
memorandum of understanding	nota/memorandum kesepakatan
merger	merger

middle power • mutual assured destruction (MAD)

middle power	kekuatan menengah
militarism	militarisme
militarist	militaris
military	militer
military zone	zona militer
military aid/assistance	bantuan militer
military base	pangkalan militer
military-industrial complex	kompleks industri militer
military pact	pakta militer
military power	kekuatan militer
military doctrine	doktrin militer
minister of foreign affairs	menteri luar negeri
minority	minoritas
minority rights	hak minoritas
minority control	pengendalian minoritas
minority rule	pemerintahan minoritas
Minuteman missile	rudal Minuteman
missing in action	hilang dalam tugas
mobilization system	sistem mobilisasi
model city	kota model/percontohan
monarchical government	pemerintahan monarkis
monetary crisis	krisis moneter
Monroe Doctrine	Doktrin Monroe
Mossad	Dinas Rahasia Israel; Mossad
Most Forward Nation (MFN)	Negara Terutamakan
mother ship	kapal induk
Moro Nationalist Liberal Front (MNLF)	Front Pembebasan Nasional Moro; MNLF
multifunctional	multifungsi
multi track diplomacy	diplomasi multijalur
multilateral	multilateral
multilateralism	multilateralisme
multipolar	multipolar
mutual assured destruction (MAD)	penghancuran pasti timbal balik

N

national	nasional; kebangsaan
national integrity	integritas/keutuhan nasional
national interest	kepentingan nasional
national liberation	pembebasan nasional
National Security Advisory (NSA)	Penasihat Keamanan Nasional; NSA
National Security Council (NSC)	Dewan Keamanan Nasional; NSC
national self-determination	penentuan sendiri nasional
nationalism	nasionalisme
nation-state	negara-bangsa
naval warfare	peperangan laut
NAZI	NAZI
negotiation	negosiasi; perundingan
negotiation treaty	perjanjian perundingan
neo-functionalism	neofungsionalisme
neo-idealism	neoidealisme
neo-liberalism	neoliberalisme
neo-Marxism	neomarksisme
neo-realism	neorealisme
Napoleon War	Perang Napoleon
neutral	netral
neutral power	kekuatan netral
neutral territory	wilayah netral
neutralisation/neutralization	netralisasi
neutralised state	negara netral
neutralised zone	zona netral
neutralism	netralisme

neutrality • Nuremberg Tribunal

neutrality	netralitas
neutralized state	negara ternetralkan
neutralized zone	zona ternetralkan
neutron bomb	bom neutron
New International Economic Order (NIEO)	Tata Ekonomi Internasional Baru
new world order	tata dunia baru
newly industrialized countries (NICS)	Negara-Negara Industri Baru; NICS
nomination	nomipasi; pencalonan
non state actors	aktor nonnegara
non-alignment	nonblok
non-align movement	gerakan nonblok
non-cooperation movement	gerakan tanpa kerja sama
Nongovernment Organization (NGO)	organisasi nonpemerintah; ornop; LSM
non-violence	tanpa kekerasan
North American Free Trade Agreement (NAFTA)	Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara; NAFTA
North Atlantic Treaty Organization (NATO)	Organisasi Perjanjian Atlantik Utara; NATO
North-South relations	hubungan Utara-Selatan
Nuclear Banishment Treaty (NBT)	Perjanjian Penghapusan/Pelarangan Nuklir
nuclear power	kekuatan nuklir
nuclear proliferation	penyebaran/proliferasi nuklir
nuclear weapons free zone (NWFZ)	zona bebas senjata nuklir; NWFZ
Nuremberg Tribunal	Pengadilan Nuremberg

O

open diplomacy	diplomasi terbuka
open door policy	politik pintu terbuka
operation	operasi; gerakan
operation analysis	analisis operasi
oppression	penindasan
oral treaty	perjanjian lisan
oral vote/voice vote	suara lisan
order of battle	aturan perang
organization	organisasi
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)	Organisasi untuk Kerja Sama Pembangunan Ekonomi
Organization of African Unity (OAU)	Organisasi Persatuan Afrika; OAU
Organization of American State (OAS)	Organisasi Negara-Negara Amerika; OAS
Organization of Islamic Conference (OIC)	Organisasi Konferensi Islam; OKI
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)	Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak; OPEC
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)	Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa; OSCE
organizational process model	model proses organisasi
outer-space treaty	traktat/perjanjian angkasa luar
output variables	variabel keluaran
overlapping jurisdiction	yurisdiksi tumpang tindih
overlapping membership	keanggotaan tumpang tindih

overseas • ozone depletion

overseas
overthrow
ozone depletion

seberang lautan; perantauan
penggulingan (kekuasaan)
penipisan ozon

P

pacific blockade	blokade secara damai
Pacific Rim	Palung Pasifik; Cekungan Pasifik
Pacific War	Perang Pasifik
pacification	pasifikasi; perdamaian
pacifism	pasifisme
Palestine Liberation Organisation (PLO)	Organisasi Pembebasan Palestina; PLO
partnership for peace	kemitraan untuk perdamaian
passive deterrence	penangkalan pasif
passive resistance	resistensi pasif
passport	paspor
patron-client	patron-klien
patterns of authority	pola kewenangan/otoritas
peace studies	studi/kajian perdamaian
peaceful blockade	blokade secara damai
peaceful settlement	penyelesaian secara damai
peacefull coexistence	hidup berdampingan secara damai
peace-maker	pencipta perdamaian; juru damai
peace-treaty	perjanjian damai
Peloponnesian Wars	Perang Peloponesia
penetration	penetrasi
penetration crisis	krisis penetrasi
People's Liberation Army (PLA)	Tentara Pembebasan Rakyat; PLA
perception	persepsi
perestroika	restrukturisasi; perestroika
periphery	pinggiran

Permanent Court of Arbitration • prisoners of war

Permanent Court of Arbitration	Mahkamah Arbitrasi Permanen; Mahkamah Arbitrasi Tetap
perpetual agreement	perjanjian abadi
perpetual peace	perdamaian abadi
persona non grata	persona non-grata
pirative state	negara perampas
plebiscite	plebisit
policy	kebijakan
policy goal	tujuan kebijakan
political asylum	suaka politik
political anarchy	anarki politik
political convention	konvensi politik
political crisis	krisis politik
political dispute	perselisihan/pertikaian politik
political ideology	ideologi politik
political integration	integrasi politik
political legitimacy	legitimasi politik
political liberal	liberal politik
political machinery	mesin politik
political philosophy	filsafat politik
political rival	saingan/lawan politik
political rivalry	persaingan politik
political science	ilmu politik
political separation	pemisahan politik
political sovereignty	kedaulatan politik
political theorist	teoritikus/ahli teori/teoritisi politik
political theory	teori politik
political thought	pemikiran politik
political treatise	traktat politik
political unification	unifikasi/penyatuan politik
power	kekuasaan; kekuatan
power politics	politik kekuasaan/kekuatan
power sharing	berbagi kekuasaan
preventive diplomacy	diplomasi preventif
prisoner's dilemma	dilema tahanan
prisoners of war	tahanan perang

privilege rights • psychological warfare

privilege rights	hak-hak istimewa (diplomatik)
proletarian	proletar
proletariat	proletariat
protectionism	proteksionisme
protectionist	proteksionis
protectorat	protektorat
protectorate	negara lindungan
protest note	nota bantahan/protes
proventive diplomacy	diplomasi pembuktian
proxy war	perang lewat pihak ketiga; <i>proxy war</i>
public opinion	opini publik
psychological warfare	perang urat saraf/psikologis

Q

quasi-diplomatic
quasi-federation
quasi-government
quasi-international
quasi-state

kuasi diplomatik
kuasi federasi
kuasi pemerintah
kuasi internasional
kuasi negara

R

racial conflict	konflik ras
racialism	rasialisme
raison d'état	alasan bernegara/ <i>raison d'état</i>
raison d'être	<i>raison d'être</i>
ratification	ratifikasi
rational actor model	model aktor rasional
real politics	real politik
realism	realisme
rebellion	pemberontakan
rebels	pemberontak
recession	resesi
reciprocity	resiprositas; timbal balik
redistribution of power	redistribusi kekuasaan
referendum	referendum
reform/reformation	reformasi
refugee	pengungsi
regional cooperation	kerja sama regional
regional security	keamanan regional
regional studies	studi/kajian regional
regionalisation/regionalization	regionalisasi; pewilayahan
regionalism	regionalisme
reinforcement	penguatan; penegakan; peneguhan
relocation	relokasi
residual power	kekuasaan/kekuatan residual
residual state	negara residual
resource diplomacy	diplomasi sumber daya

resurgence • rules of game

resurgence
revolution
revolutionary
revolutionary war
rocket forces
routine hearing
rule of law
rules of exposure
rules of game

kebangkitan
revolusi
revolusioner
perang revolusioner
pasukan roket
dengar pendapat rutin
aturan hukum
aturan pembukaan
aturan permainan

S

sanction
satelite countries/state
saturation bombing
sea-lanes
secession
secessionism
secessionist
Second World
Second World War
second-strike
second track diplomacy
secret diplomacy
secretary general
secretary of defense
secretary of state (US)
secularism
security communities
Security Council
self-defence
semi-periphery
sensitivity
separatism
separatist movement
Shanghai Communique
shock troop
simulation

sanksi
negara-negara satelit
pengeboman jenuh
jalur laut
pemisahan
paham pemisahan
penganut pemisahan
Dunia Kedua
Perang Dunia Kedua
serangan kedua
diplomasi jalur kedua
diplomasi rahasia
sekretaris jenderal
menteri pertahanan
menteri luar negeri (AS)
sekularisme
komunitas keamanan
Dewan Keamanan
pertahanan diri
semiperiferi; semipinggiran
sensitivitas; kepekaan
separatisme
gerakan separatis
Komunike Shanghai
pasukan penggempur
simulasi

Singapore Johore Riau (SIJORI) • strategic bomber

Singapore Johore Riau (SIJORI)	Segi Tiga Ekonomi Singapura Johor (Sijori) Riau
Singapore Summit	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Singapura
Single European Act	Akta Eropa Tunggal
soft power	kekuasaan/kekuatan lunak
soft target	sasaran lunak
sosial stratum	strata sosial
South Asian Regional Cooperation (SARC)	Kerja Sama Regional Asia Selatan
South East Asia Treaty Organization (SEATO)	Organisasi Pakta Asia Tenggara; SEATO
South-East Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWEZ)	Zona Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara
South-South Relation	hubungan Selatan-Selatan
sovereign	berdaulat
sovereign authority	kewenangan/otoritas berdaulat
sovereign government	pemerintahan berdaulat
sovereign power	kekuasaan berdaulat
sovereign ruler	penguasa berdaulat
sovereign state	negara berdaulat
sovereignty	kedaulatan
special relationship	hubungan khusus
Special Weapon and Tactics (SWAT)	Senjata dan Taktik Khusus
Spratly island	Kepulauan Spratly
star war	perang bintang
state	negara
State Secretary	sekretaris negara
stateless people	orang tak bernegara
statistical profile	profil statistik
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)	Perundingan Pembatasan Senjata Strategik; SALT
Strategic Arms Reduction Talk (START)	Perundingan Pengurangan Senjata Strategik; START
strategic balance	perimbangan strategik
strategic bomber	pengebom strategik

strategic defence initiative • systemic forces

strategic defence initiative	prakarsa pertahanan strategik
strategic offensive	serangan strategik
strategic parity	kesetaraan strategik
strategic politics	politik strategik
strategic stalemate	kebuntuan strategik
strategic studies	kajian/studi strategik
strategic triad	tritunggal strategik
strategist	ahli strategi; strategis
structuralism	strukturalisme
struggle for power	perjuangan untuk kekuasaan
subordinat system	sistem subordinat
subversive	subversif
super power	adikuasa; adidaya
supra-nationalism	supranasionalisme
supra-regional	supraregional
sustainable development	pembangunan berkelanjutan
swing strategy	strategi pendulum
systemic forces	kekuatan bersistem/sistemik

T

tacit consent	persetujuan tersirat
tactic	taktik
tactic consent	persetujuan taktik
tactical nuclear weapons	senjata nuklir taktis
target area	kawasan sasaran
technical aid; technical assistance	bantuan teknis
territorial acquisition	akuisisi/pemerolehan wilayah
territorial sovereignty	kedaulatan wilayah
territorial waters	perairan wilayah
terrorism	terorisme
theater nuclear weapons	senjata nuklir teater
thermonuclear weapons	persenjataan termonuklir
think tank	wadah pemikir; think tank
Third World	Dunia Ketiga
Third World Countries	Negara-Negara Dunia Ketiga
totalitarian	totaliter
trade block	blok perdagangan
trade policy	kebijakan perdagangan
transgovernmental relation	hubungan transpemerintahan
transnational	transnasional
transnational relations	hubungan transnasional
transnationalism	transnasionalisme
treaty	traktat; perjanjian
Treaty of Amity and Cooperation (ASEAN)	Traktat/Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (ASEAN)
Treaty of Rome	Traktat/Perjanjian Roma

trilateral/tripartite • tyranny

trilateral/tripartite

trilateralism

tripartite

triumvirate

truce

trusteeship council

typology

tyranny

tiga pihak; trilateral; tripartit

trilateralisme

tiga pihak

triumvirat

gencatan senjata

dewan perwalian

tipologi

tirani

U

ultimatum	ultimatum
unconditional surrender	penyerahan tanpa syarat
uniformity	keseragaman; uniformitas
unilateral	unilateral; satu pihak
unilateral declaration	deklarasi unilateral
unipolar	unipolar
unitary	kesatuan
United Arab Emirates (UAE)	Uni Emirat Arab
United Nation Charter	Piagam PBB
United Nations (UN)	Perserikatan Bangsa-Bangsa; PBB
United Nations Assistance Mission for East Timor (UNAMET)	Misi Bantuan PBB untuk Timor Timur; UNAMET
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)	Konferensi PBB dalam Perdagangan dan Pembangunan; UNCTAD
United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS	Konvensi PBB mengenai Hukum Laut; UNCLOS
United Nations Development Program (UNDP)	Program Pembangunan PBB; UNDP
United Nations Disaster Relief Organization (UNDRO)	Organisasi Bantuan Bencana PBB
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)	Dewan Ekonomi dan Sosial PBB; ECOSOC
United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)	Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu, dan Budaya; UNESCO

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) • utopian

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)	Dana PBB untuk Aktivitas Kependudukan; UNFPA
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)	Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi; UNHCR
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)	Dana Darurat PBB untuk Anak-anak Internasional; UNICEF
United Nations Protection Force (UNPROFOR)	Pasukan Perlindungan PBB; UNPROFOR
United Nations Transition Administration on East Timor (UNTAET)	Pemerintah Transisi PBB di Timor Timur; UNTAET
United States Agency for International Development (USAID)	Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional; USAID
Universal Declaration of Human Right; UDHR	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; UDHR
utopian	utopia

V

valid	sahih; valid
validation	validasi; penyahihan
validity	validitas; kesahihan
value analysis	analisis nilai
veto power	kekuasaan veto
Vietnam War	Perang Vietnam
vietnamization	vietnamisasi
virtual representation	representasi virtual; perwakilan maya
visa	visa
voluntary organization	organisasi sukarela
vulnerability	kerentanan

W

war crime	kejahatan perang
war criminal	kriminal/penjahat perang
war of liberation	perang pembebasan
war policy	kebijakan perang
war-fighting strategy	strategi perang tempur
Warsaw Pact	Pakta Warsawa
warship	kapal perang
wartime sovereignty	kedaulatan (di) masa perang
war-winning strategy	strategi kemenangan perang
Watergate	skandal Watergate
weapon proliferation	proliferasi senjata
Western European Union (WEU)	Uni Eropa Barat; WEU
window of vulnerability	jendela kerentanan
win-win solution	solusi sama menang
World Tourism Organization (WTO)	Organisasi Pariwisata Dunia; WTO
World Trade Organization (WTO)	Organisasi Perdagangan Dunia; WTO
World Bank	Bank Dunia
world community	komunitas dunia
world government	pemerintahan dunia
World Health Organization (WHO)	Organisasi Kesehatan Dunia; WHO
world policeman	polisi dunia
world politics	politik dunia
world society	masyarakat dunia
world system	sistem dunia
world system theory	teori sistem dunia
world trade	perdagangan dunia
world-system theory	teori sistem dunia

Z

zero-sum game

zone of peace, freedom and
neutrality (ZOPFAN)

permainan zero-sum

Zona Kedamaian, Kebebasan dan
Netralitas; ZOPFAN

POLITIK PERBANDINGAN

A

abdicate	turun takhta
abdication crisis	krisis turun takhta
abetment	sekongkol
absent voter	pemilih takhadir/absen
absentee ballot	suara in absensia
absentee voting	suara in absensia
absolute deviation	penyimpangan mutlak
absolute monarchy	monarki mutlak/absolut
absolute power	kekuasaan mutlak/absolut
absolutism	absolutisme
abstain	abstain
act of parliament	undang-undang
act of state	peraturan negara
act of the executive	peraturan pemerintah
action oriented	berorientasi aksi/tindakan
action theory	teori aksi/tindakan
activism	(paham) aktivisme
actual power	kekuasaan nyata
ad hoc authority	kewenangan/otoritas sementara
ad hoc committee	panitia ad hoc
administrative	administratif
administrative class	kelas administratif; pamong praja
administrative law	undang-undang administrasi negara
administrative state	negara pamong praja/ administratif
adult suffrage	hak pilih dewasa
adversary politics	politik bertentangan

affirmative action • arbitrate

affirmative action	tindakan afirmatif
agrarian movement	gerakan agraria
agrarian party	partai tani
agrarian policy	kebijakan agraria/pertanian
agrarian reform	reformasi agraria/pertanian; pembaruan agraria/pertanian
alien	orang asing
alienation	keterasingan; alienasi
align	bersekutu
Aligned Nations	negara-negara sekutu
alignment	persekutuan; penataan
allegiance	kesetiaan
alliance	aliansi
allocation of power	alokasi kekuasaan
allocation of values	peruntukan nilai
alternative society	masyarakat alternatif
alternative vote	suara alternatif
alternative voting system	sistem pemungutan suara alternatif
amalgamation	amalgamasi; penggabungan
analytical tool	alat analisis
anarchism	anarkisme
anarchist	anarkis
anarchy	anarki
Anglo-Malaya Defence Agreement	Perjanjian Pertahanan Inggris-Malaya
anomie	anomi
anti-Comintern	Antikomunis internasional; antikomintern
Anti-Facist People's Freedom League (AFPFL)	Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis; AFPFL
antithesis	antitesis
apartheid	apartheid
apathy	apati
apolitical	apolitis
Arab League	Liga Arab
arbitrary	arbitrari
arbitrate	menimbang

area studies • autonomy

area studies	kajian wilayah
aristocracy	aristokrasi; golongan bangsawan
aristocrat	aristokrat
aristocratic	aristokratis
armed insurrection	pemberontakan bersenjata
arrogance of power	arogansi/keangkuhan kekuasaan
articulation	artikulasi
assume (power)	ambil alih (kekuasaan)
asylum (politic)	suaka politik
autarchy	autarki
authentication	pengesahan
authoritarian	otoriter
authoritarianism	otoritarianisme
authoritative	berwibawa; berwenang
authority	kewibawaan; kewenangan
autocracy	autokrasi
autonomy	otonomi

B

back-lash	balas dendam
ballot	tindakan memberi suara
ballot act	undang-undang pemberian suara
ballot paper	surat suara; kertas suara
ballot-box	kotak suara
balloting place	tempat pemungutan suara
bandwagon effect	efek gerbong kereta
banishment	pembuangan; pengasingan
bargaining theory	teori tawar-menawar
barrio	bario
Bay of Pigs invasion	penyerangan Bay of Pigs
behavioural persuasion	bujukan/persuasif tingkah laku
behavioural school	aliran/mazhab tingkah laku
behaviouralism	paham tingkah laku
bicameral	dua kamar; bikameral; dwikamar
bicameral body	lembaga dua kamar/dwikamar/bikameral
bicameral council	dewan duakamar/dwikamar/bikameral
bicameral government	pemerintahan bikameral/dwikamar
bicameral legislature	lembaga legislatif dua kamar/bikameral
bicameral system	sistem bikameral/dua kamar
bicameralism	bikameralisme; paham dua kamar
bilateral	bilateral; dua pihak
bill	usulan undang-undang
bill of attainder	usulan undang-undang hak sipil
bill of rights	usulan undang-undang hak asasi
biopolitics	biopolitik

bipartisan • by election

bipartisan	sistem dua partai
bipartite situation	sistem/keadaan dwipihak
bipolar	dwikutub; bipolar
black power	kekuasaan kulit hitam
block voting	pemungutan suara berkelompok
Bolshevism	Bolshevisme
borough	daerah khusus; wilayah khusus
bourgeois	(kaum) borjuis
bourgeoisie	kaum borjuis
Briggs Plan	Rancangan Briggs
bureaucracy	birokrasi
bureaucratic constitutionalism	konstitusionalisme birokratis
bureaucratic empire	empayar birokrasi
bureaucratic politics	politik birokratis
bureaucratic power	kekuasaan birokratis
bureaucratization	pembirokrasian; birokratisasi
by election	pemilu sela

C

cabinet	kabinet
cabinet government	pemerintahan kabinet
cabinet portfolio	portofolio kabinet
cabinet system	sistem kabinet
cadre	kader
cadre party	kader partai
campaign	kampanye
campaign budget	anggaran kampanye
campaign contribution	kontribusi kampanye
campaign fund	dana kampanye
campaign strategy	strategi kampanye
campaigners	juru kampanye
candidate	kandidat; calon
candidate selection	pemilihan calon
capability	kapabilitas; kemampuan
capitalism	kapitalisme
capitalist	kapitalis
capitalist system	sistem kapitalis
capitation grant	dana kapitasi
capitulation	kapitulasi
card voting	pemungutan suara berkartu
caretaker government/ interim government	pemerintahan sementara
carpet-bagger	petualang
cartel	kartel
casting vote	suara pemutus

Castroism • civil service commission

Castroism	Kastroisme
caucus	kaukus
cell	sel
central control	pengendalian pusat
central finance	keuangan pusat
central government	pemerintahan pusat
centralization	sentralisasi; pemusatan
centralized democracy	demokrasi terpusat
centralized power	kekuasaan terpusat
centralism	sentralisme
centre party	partai tengah
centrifugal	sentrifugal
centripetal	sentripetal
centrist	kelompok tengah
cession	penyerahan wilayah
character assassination	pemburukan nama
charismatic leadership	kepemimpinan karismatik
chartered corporation	perusahaan berbadan hukum
church-state relations	hubungan agama-negara
citizen army	tentara rakyat
city republic	republik kota
city state	negara kota
civic	kewargaan
civic culture	budaya kewargaan
civil	sipil
civil aviation	penerbangan sipil
civil code	hukum perdata
civil defence	pertahanan sipil
civil disobedience	pembangkangan sipil
civil disorder	kekacauan sipil
civil government	pemerintahan sipil
civil liberties	kebebasan warga/sipil
civil rights	hak sipil
civil rights movements	gerakan hak sipil
civil service commission	komisi layanan sipil

civil society • collective good

civil society	masyarakat sipil
civil war	perang saudara
civilian control	pengendalian sipil
civilian member	warga sipil
civilian rule	pemerintahan sipil
civil-military relations	hubungan sipil-militer
clandestine movement	gerakan bawah tanah
clandestine operations	operasi bawah tanah
class conflict	pertentangan kelas
class consciousness	kesadaran kelas
class structure	struktur kelas
class struggle	perjuangan kelas
clean bomb	bom bersih
client state	negara klien/pelanggan
clientele	klientel
clientele party	partai klientel
clientele support	dukungan klientel
clique	klik
close election	pemilihan ketat
closed door policy	kebijakan rapat tertutup
closed government	pemerintahan tertutup
closure/cloture	penutupan pembahasan
coalition	koalisi
coalition government	pemerintahan koalisi
coat-tail effect	kesan coat-tail
cohabitation	kohabitasi
cohesion	kohesi
cold war	perang dingin
collaborative strategy	strategi kerja sama
collateral damage	kerusakan kolateral
collateral relations	hubungan kolateral
collective	kolektif
collective action	tindakan kolektif
collective agreement	persetujuan kolektif/bersama
collective bargaining	perundingan kolektif/bersama
collective good	kebaikan bersama

collective goods • communications network

collective goods	barang kolektif
collective leadership	kepemimpinan bersama/kolektif
collective responsibility	pertanggungjawaban bersama/kolektif
collusion	kolusi
colonial	kolonial; penjajahan
colonial domination	dominasi kolonial/jajahan
colonial government	pemerintahan kolonial
colonial secretary	kementerian jajahan/kolonial
colonialism	kolonialisme
colonialist	kolonialis; penjajah
colonization	kolonisasi; penjajahan
colony	koloni; tanah jajahan
commander	komandan
Cominform	Kominform
commission	komisi
commissioner	komisioner
committee hearings	komisi dengar pendapat
committee of council	komisi dewan
committee of enquiry	komisi penyelidikan
committee system	sistem komisi
commodity tax	pajak komoditas
common boundary	perbatasan bersama
commonwealth	persemakmuran
communal	komunal
communal group	kelompok komunal
communal representation	perwakilan komunal
communal riots	pemberontakan komunal
communalization	komunalisasi
communalise	komunalis
communalism	komunalisme
communes	komune
communication approach	pendekatan komunikasi
communication barrier	kendala/rintangan komunikasi
communication channel	saluran komunikasi
communication integration	integrasi komunikasi
communications network	jaringan komunikasi

communism • conflict

communism	komunisme
communist	komunis
Communist Manifesto	manifesto komunis
communist youth group	kelompok pemuda komunis
community	komunitas; masyarakat
community atmosphere	suasana bermasyarakat
community conflict	konflik komunitas/masyarakat
community politics	politik komunitas/masyarakat
community studies	kajian komunitas/masyarakat
comparative analysis	analisis perbandingan/komparatif
comparative evaluation	evaluasi (per)bandingan/komparatif
comparative government	pemerintahan perbandingan/komparatif
comparative history	sejarah (per)bandingan/komparatif
comparative politics	politik (per)bandingan
competent authority	otoritas/kewenangan kompeten
competitive dynamic	dinamik bersaing
competitive party system	sistem partai kompetitif
complete autonomy	otonomi penuh
complete mobility	mobilitas penuh
comprehensive competence	kecakapan/kompetensi penuh/komprehensif
concentration camp	tempat pemusatan
concentration of power	pemusatan kekuasaan
conceptual approach	ancangan konseptual; pendekatan konseptual
conceptualization	konseptualisasi
concession	konsesi
conciliation	konsiliasi
concomitant authority	otoritas ganda
concord	kesepakatan; sepaham
concordat	konkordat
concurrent majority	mayoritas bersama
concurrent power	kekuasaan bersama
conference committee	komisi persidangan
conflict	konflik; pertikaian

conflict of interest • constitutional engineering

conflict of interest	konflik kepentingan
conflict of value	konflik nilai
conflict spectrum	spektrum konflik
Confrontation	Konfrontasi
congress	kongres
congressional abdication	penyerahan kekuasaan kongres
congressional-bureaucratic relationship	hubungan birokratik kongres
congressional committee	komisi kongres
congressional district	wilayah/distrik kongres
congressional election	pemilihan kongres
congressional government	pemerintahan kongres
congressional hearings	dengar pendapat kongres
congressional inquiry	penyelidikan kongres
congressional reform	pembaruan/reformasi kongres
conservative	konservatif
Conservative Party	Partai Konservatif
Consiel d'Etat	Mahkamah Agung
consociational democracy	demokrasi konsosiasional
consociational politic	politik konsosiasional
consociationalism	konsosiasionalisme
consolidation (power)	konsolidasi (kekuasaan)
consortium	konsorsium
conspiracy	konspirasi
conspiracy theory	teori konspirasi
constituency policy	kebijakan daerah pemilihan
constituency sphere	daerah/wilayah pemilihan
constituents	pemilih; pendukung
constitutional assembly	majelis konstitusional
constitutional authoritarianism	otoritarianisme konstitusional
constitutional commission	komisi konstitusional
constitutional council	dewan konstitusional
constitutional crisis	krisis konstitusional
constitutional democracy	demokrasi konstitusional
constitutional emergency	darurat konstitusional
constitutional engineering	rekayasa konstitusional

constitutional government • coup d'etat

constitutional government	pemerintahan konstitusional
constitutional heritage	warisan konstitusional
constitutional initiative	inisiatif konstitusional
constitutional monarchy	monarki konstitusional
constitutional power	kekuasaan konstitusional
constitutionalism power	kekuasaan konstitusionalisme
consultative committee	panitia penasihat/konsultasi
consultative task	tugas penasihat
contestation	persaingan
contiguous zone	zona bersebelahan
contract theory	teori kontrak
contradiction	kontradiksi
convergence theory	teori konvergensi
conversion function	fungsi pertukaran
cooperative federalism	federalisme kerja sama
co-operative movement	gerakan kerja sama
co-operative sphere	wilayah kerja sama
cooptation	kooptasi
co-prosperity sphere	wilayah sekemakmuran
corporate state	negara korporasi
conservatism	konservatisme
cosmopolitan democracy	demokrasi kosmopolitan
council	dewan
council of ministers	dewan menteri
council of regency	dewan kabupaten
Council of Regency and Succession	dewan kabupaten dan suksesi
Council of Rulers	dewan penguasa/pemerintah
council sitting	musyawarah dewan
councillor	anggota dewan
counsellor	penasihat
counter-culture	budaya tandingan
counter-elite	elite tandingan
counter-revolution	kontrarevolusi
counter-revolutionary	kontrarevolusioner
country	negeri
coup d'etat	kudeta; penggulingan kekuasaan

court opinion • czarism

court opinion	opini/pendapat mahkamah
court order	perintah pengadilan
covenant	kesepakatan
critical theory	teori kritik
cross-bench	kursi anggota independen
cross-bencher	anggota parlemen independen
crowd control	pengendalian kelompok
crown colony	koloni kerajaan
crown prince	putra mahkota
cube law/cube rule	hukum kubus
culture of poverty	budaya kemiskinan
cummulative system	sistem kumulatif
cumulative vote	pemilihan kumulatif
customary law	hukum adat
czarism	czarisme

D

dark horse	kuda hitam
de facto	de facto
de facto government	pemerintahan de facto
de jure	de jure
decentralization	desentralisasi
decentralized power	kekuasaan terdesentralisasi
decision game	permainan pengambilan keputusan
decision making process	proses pengambilan putusan
decision process	proses keputusan
decision rule	aturan pengambilan keputusan
decision theory	teori keputusan
decision-making source	sumber pembuatan keputusan
decisive role	peran penentu
declaration	deklarasi
Declaration of Independence	Deklarasi Kemerdekaan
declaration of rights/bill of rights	deklarasi hak-hak
decolonization	dekolonisasi
deconcentration of power	dekonsentrasi kekuasaan
definition of issue	definisi/batasan isu
dehumanization	dehumanisasi
delegate	delegasi; wakil; utusan
delegated authority	kewenangan limpahan
delegated legislation	legislasi limpahan
delegation	delegasi; perutusan
delegation of authority	delegasi kewenangan
delegation of power	delegasi kekuasaan

deliberative democracy • direct election

deliberative democracy
demagogue
demarchy
democracy
democracy bourgeois
democracy elitism
democratic centralism
democratic despotism
Democratic Party
democratization
demonstration
denunciation (treaty)
dependency
dependency theory
depoliticazion
deport
deportation
deprivation
deprived groups
derogation of power
desegregation ✓
despotism
dethrone
developmental attitude
developmentalism
devolution
devolution of authority
D'Hondt system
dialectic
dialectical materialism
dictator
dictatorship
Diet
diplomat
direct democracy
direct election

demokrasi saksama
demagoge
domarki
demokrasi
borjuis demokrasi
elitisme demokrasi
sentralisme demokratis
despotisme demokratik
Partai Demokratik
demokratisasi
unjuk rasa; demonstrasi
pengutukan
ketergantungan
teori ketergantungan
depolitisasi
buang balik
deportasi
deprivasi; penafian
kelompok terdeprivasi
pengurangan kekuasaan
desegregasi
despotisme
detron
perilaku membangun
paham pembangunan
devolusi
devolusi wewenang/otoritas
sistem D'Hondt
dialektik
materialisme dialektis
diktator
kediktatoran
Diet
diplomat
demokrasi langsung
pemilihan langsung

direct or pure democracy • dynasty

direct or pure democracy	demokrasi langsung atau murni
direct primary	primari langsung
dirty politics	politik kotor
dirty tricks	muslihat kotor; tipu muslihat
discriminating factor	faktor pembeda
discrimination	diskriminasi; pembedaan
disfranchisement	pencabutan hak pilih
disintegration	perpecahan; disintegrasi
disputed/contested election	pemilihan tersengketakan
dissident	pembelot; pembangkang; disiden
dissolution	pembubaran
distribution crisis	krisis distribusi
distribution of powers	distribusi kekuasaan
distributive capability ✓	kapabilitas distributif
distributive justice	keadilan distributif
district	distrik; daerah
district system	sistem distrik/daerah
divide and rule	pecah dan perintah
doctrine	doktrin
doctrine of separation of powers	doktrin pemisahan kekuasaan
dominant group	kelompok dominan
dominant party system	sistem partai dominan
domination	dominasi
Dominion	dominion
draconian laws	dalil drakon(an)
dualism	dualisme
duarchy	duarki
dumvirate	dumvirat
Duverger's law	hukum Duverger
dyarchy	diarki
dynastic state	negara dinasti
dynasty	dinasti; wangsa

E

Early Day Motion
ecclesiastical jurisdiction
ecological association
economic imperialism
economy bourgeois
egalitarian
election
election district
election fraud
election platform
election returns
electoral ballot ✓
electoral behaviour code
electoral college
electoral cycle
electoral geography
electoral system
electoral zone
electorate
elite approach
elite cohesion
elite political culture
elite preferences
elite-mass gap
elitist democracy
emergency power

Early Day Motion
yurisdiksi keagamaan
peserikatan ekologis
imperialisme ekonomi
borjuis ekonomi
egalitarian
pemilihan
distrik pemilihan
kecurangan pemilihan
wilayah pemilihan
perolehan suara
suara pemilihan
kode etik perilaku pemilihan
dewan pemilih; lembaga pemilihan
putaran pemilih
daerah pemilihan
sistem pemilihan
zona pemilihan
elektorat; para pemilih
pendekatan elit
kohesi elit
budaya politik elit
preferensi elit
kesenjangan massa elit
demokrasi elitis
kekuasaan darurat

empathy • exit poll

empathy
empire
empirical
empirical approach
empirical evidence
empiricism
enlightenment
enthrone
entryism
environmental forces
environmentalism
epistemology
equality
escalation
ethnic cleansing
ethnic group
ethnic minority
ethnic party
ethnic politics
ethnic rationalism
ethnicity
ethnocentrism
Eurocommunism
European Parliament
evolution
exchange theory
executive
executive agreement
executive authority
executive branch
executive dominance
Executive Office of President
executive officer
executive privilege
exile
exit poll

empati
kekaisaran
empiris
pendekatan/ancangan empiris
bukti empiris
empirisme
pencerahan
menobatkan
entriisme
pengaruh lingkung sekitar
paham lingkungan hidup
epistemologi
kesamaan
eskalasi; peningkatan
pembersihan suku/etnik
kelompok etnik
minoritas etnik
partai etnik
kepolitikan etnik
rasionalisme etnik
etnisitas; keetnikan
etnosentrisme; paham kesukuan
Eurokomunisme
Europarlemen
evolusi
teori pertukaran
eksekutif
perjanjian eksekutif
kewenangan eksekutif
cabang eksekutif
dominasi eksekutif
Jabatan Eksekutif Presiden
pejabat eksekutif
hak istimewa eksekutif
pembuangan; orang buangan
pemberian suara eksit

exploitation • extremist

exploitation
extremism
extremist

eksploitasi
ekstremisme
ekstremis

F

Fabianism	Fabianisme
faction	faksi
factionalism of council	faksionalisme dewan
fait accompli	<i>fait accompli</i>
false consciousness	kesadaran palsu
falsifiability	kemungkinpalsuan
fatalism	fatalisme
fatwa	fatwa
favourite son	anak kesayangan
Federal Bureau of Investigation	Biro Investigasi Federal
federal court	mahkamah federal
federal election	pemilihan federal
federal government	pemerintahan federal
Federal Legislative Council	Dewan Legislatif Federal
federalism	federalisme
federalist	federalis
federal-state financial relations	hubungan keuangan negara federal
federation	federasi
feint (military)	tipuan (tentara)
feudal system	sistem feodal
feudalization	feodalisasi; pémfeodalan
feudalism	feodalisme
filibuster	gangguan
first-past-the-post	pemenang undi terbanyak
floating vote	suara mengambang
floating voter	pemilih mengambang
floor leader	ketua anggota parlemen

form of government • fundamentalist dogma

form of government	bentuk pemerintahan
formal-legal approach	pendekatan/ancangan legal-formal
franchises	hak pilih
fraternity	fraternitas
free society	masyarakat bebas
free vote	pemilihan bebas
freedom of association	kebebasan berserikat
freedom of information	kebebasan informasi
freedom of religion	kebebasan beragama
freedom of speech	kebebasan berbicara
front	front
front-bencher	anggota utama dewan
front-organization	organisasi depan
functional succession	suksesi fungsional
functionalism	fungsionalisme
fundamental rights	hak dasar/asasi
fundamentalism	fundamentalisme
fundamentalist dogma	dogma fundamentalis

G

Gaullism	Gaullisme
general assembly	majelis umum
general authority	kewenangan umum
general election	pemilihan umum; pemilu
general strike	pemogokan massal
general suffrage	hak pilih umum
general will	kehendak umum
genocide	pemusnahan manusia
gerontocracy	gerontokrasi
gerrymander	gerimander
gerrymandering	batas daerah pemilihan
gestapo	Gestapo
get on the ticket	calon terpilih
ghetto	ghetto
gift relationship	hubungan berian
glasnost	keterbukaan; glasnos
global democracy	demokrasi global
governance	kepemerintahan
government	pemerintahan; pemerintah
government back-bencher	dukungan parlemen terhadap pemerintah
government by the people	pemerintahan oleh rakyat
government for the people	pemerintahan untuk rakyat
government institution	lembaga/institusi pemerintah
government of the people	pemerintahan dari rakyat
government succession	suksesi pemerintah(an); penggantian pemerintah

graft	korupsi
grant	hibah
grass-roots	akar rumput
grassroots movement	gerakan akar rumput/rakyat bawah
Great Leap Forward	Perubahan Besar ke Depan
green parties	partai hijau
Green Revolution	Revolusi Hijau
grey propaganda	propaganda samar
group struggle	perjuangan kelompok
gubernatorial	tugas gubernur
guerilla war	perang gerilya
guerilla warfare	peperangan gerilya
guided democracy	demokrasi terpimpin
guild socialism	sosialisme gilda
Gulag	Gulag

H

habeas corpus	habeas corpus
Hare system	sistem Hare
hartal	hartal
head of government	kepala pemerintahan
head of state	kepala negara
heavy weight of bureaucratic power	birokratik besar
hegemony	hegemoni
heir-designate	putra mahkota; pengganti pemimpin
hereditary authority	kewenangan temurun
hereditary principle	prinsip temurun
hereditary succession	suksesi temurun; penggantian temurun
heterogenous society	masyarakat heterogen
hierarchical control	pengawasan/pengendalian hierarkis
hierarchical policy making	pembuatan kebijakan hierarkis
hierarchical type	tipe hierarkis
hierarchy	hierarki
hierarchy of prefectoral system	hierarki sistem prefektoral
home-rule (self-government)	pemerintahan sendiri
homogeneity	homogenitas; kehomogenan
homogenous society	masyarakat homogen
horizontal integration	integrasi horizontal
horse race and toss-up	taruhan
House of Commons	Majelis Rendah
House of Lords	Majelis Tinggi
House of Representatives	Dewan Perwakilan
human relations	hubungan manusia
human rights	hak asasi manusia
hung parliament	parlemen terikat

I

identity crisis	krisis identitas
ideological struggle	perjuangan ideologis
ideology	ideologi
illustrative issue	isu ilustratif
immobilism	imobilisme
impeachment	pemecatan (presiden); pendakwaan
imperative	imperatif; kepastian
imperial	imperial
imperial preference	preferensi imperial
imperialism	imperialisme
imperium in imperio	negara dalam negara
impoundment	penyitaan; pengurangan
incumbent	calon
independence	kemerdekaan
independent authority	otoritas mandiri/independen
independent voter	pemilih bebas/independen
indirect election	pemilihan taklangsung
individual freedom	kebebasan individual
individual ministerial responsibility	pertanggungjawaban individual menteri
indoctrination	indoktrinasi
industrial democracy	demokrasi perindustrian
industrial strike	pemogokan perindustrian
industrial union	perserikatan perindustrian
inequality	ketaksamaan
infiltration of foreign element	penyusupan pihak luar
informal structure	struktur takformal/informal

informal treaty process • isolationist

informal treaty process	proses perjanjian informal/traktat informal
infringement of rights	pelanggaran hak
installation ceremony	upacara pelantikan
institution	institusi; lembaga
institution building	pembinaan institusi
institutional	institusional; kelembagaan
institutional adaptation	adaptasi institusional; penyesuaian kelembagaan
institutional arrangement	susunan institusional
institutional decay	kebobrokan institusional
institutional multifunctionality	kefungsionalan ganda institusional
insurgent	pemberontak; pengacau
insurrection	pemberontakan
Intelligence Agency	Badan Intelijen; Dinas Rahasia
intelligentsia	cendekiawan
inter racial	antarras; antarsuku bangsa
interest aggregation ✓	agregasi kepentingan
interest articulation	artikulasi/penyuaraan kepentingan
interest group	kelompok (se)kepentingan
intergroup conflict	konflik antarkelompok
intermittent group	kelompok bersela
intermittent political system	sistem politik bersela
internal colonialism	kolonialisme dalam negeri
internal security	keamanan dalam negeri
Internal Security Act (ISA)	Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri
intifada	intifada
iron curtain	tirai besi
iron triangle	segitiga besi
iron triangle relationship	hubungan segitiga besi
Islamic party	partai Islam
Islamic state	negara Islam
Island state	negara kepulauan
isolation policy	kebijakan pengasingan
isolationist	pengasing

issue voting • item veto

issue voting
item veto

pemungutan suara pokok persoalan
veto butir

J

Jacobinism
judicial legislation

judicial power
junta
juridical
jurisdictional disputes

Jacobinisme
perundangan yudisial; legislasi keha-
kiman
kekuasaan yudisial/kehakiman
yunta
yuridis; menurut hukum
persengketaan yurisdiksi

K

kaiserism
katascopic
kingdom
kingship
kitchen cabinet
kulak

kaisarisme
kataskopik
kerajaan
kedudukan raja
kabinet dapur
kulak

L

labour movement	gerakan buruh
laicism	laisisme
laissez faire	<i>laissez faire</i>
lame duck	posisi lemah
land locked state	negara daratan
landslide victory	kemenangan besar
latent demand	tuntutan laten
latent function	fungsi laten
latent group	kelompok laten
law of the sea convention	konvensi hukum laut
legal sovereignty	kedaulatan hukum
legislation	perundang-undangan; legislasi
legislative	legislatif
legislature	lembaga perundang-undangan
legitimacy	legitimasi; keabsahan
legitimacy crisis ✓	krisis keabsahan
legitimate	absah
legitimate government	pemerintahan absah/sah
liason	penghubung
liberal democracy	demokrasi liberal
liberal reformers	pembaru liberal
liberalism	liberalisme
liberation army	tentara pembebasan
life peer	bangsawan seumur hidup
life peerage	kebangsawanan seumur hidup
limited monarchy	monarki terbatas
limited vote	suara terbatas
linkage politics	politik perkaitan

list system • loyalist

list system	sistem daftar
lobbying	melobi
lobbyist	pelobi
local authority	kewenangan lokal
local government	pemerintahan lokal
logrolling	<i>logrolling</i>
low intensity operations	operasi intensitas rendah
lower middle class	kelas menengah-bawah
loyal opposition	oposisi loyal/setia
loyalist	pengikut setia

M

machine politics	mesin perpolitikan
major party	partai besar
major power	kekuatan utama
majoritarian system	sistem mayoritas
majority government	pemerintahan mayoritas
majority leader	pemimpin mayoritas
majority	mayoritas
majority votes	suara mayoritas
majority voting system	sistem pemungutan suara mayoritas
Malaya Philippines Indonesia (Maphilindo)	Malaya Filipina Indonesia (Maphilindo)
Malaysian Administrative and Diplomatic Service	Dinas Diplomatik dan Administratif Malaysia
management by exception	pengelolaan perkecualian
management conflict	manajemen konflik
management ecology	ekologi manajemen
management prerogative	prerogatif manajemen/pengelolaan
mandate	mandat
manhood suffrage	hak pilih laki-laki
manifesto	manifesto
marginal seat	kursi marginal
marginalism	marginalisme
marginalization	marginalisasi
maritime state	negara maritim/bahari
martial law	undang-undang darurat perang
Marxian socialism	sosialisme Marx
Marxism	Marxisme

Marxism-Leninism • minority control

Marxism-Leninism	Leninisme-Marxisme
Marxist	pengikut/penganut Marx
Marxis ideology	ideologi marxis
mass opinion	opini/pendapat massa
mass movement	gerakan massa
massacre	pembunuhan massal
masses	massa
massive retaliation	pembalasan besar-besaran
matriarchy	matriarkat
media campaign	kampanye melalui media
mediator	mediator; juru damai; penengah
memorandum of agreement	nota perjanjian
memorandum of understanding	nota kesepahaman
merger	merger; penggabungan
meritocracy	meritokrasi
metropolitan	metropolitan
metropolitan government	pemerintahan metropolitan
metropolitan politics	politik metropolitan
micronationalism	mikronasionalisme
micropolitics	mikropolitik
micro-state	negara kecil
middle class	kelas menengah
middle power	kekuatan menengah
militant tendency	kecenderungan militan
militarization	militerisasi; pemiliteran
militarism	militerisme
militarist	penganut militerisme
military government	pemerintahan militer
millenarian	milenariesme
millenarianism	faham milenium; milenarianisme
millitary doctrine	doktrin militer
ministry	kementerian
minor party	partai kecil
minority	minoritas
minority rights	hak kaum minoritas
minority control	pengendalian minoritas

minority government • municipal government

minority government	pemerintahan minoritas
minority leader	pemimpin minoritas
minority politics	politik minoritas
minority rule	penguasaan minoritas
mob rule	pemerintahan mob
mobilisation system/mobilization system	sistem mobilisasi/penggerakan
mobocracy	mobokrasi
model city	kota percontohan
monarchical government	pemerintahan monarkis
monarchy	monarki
monolithic party	partai monolitik
monotonicity	monotonisitas
moral persuasion	pendekatan moral
movement	(per)gerakan
multifunctional	multifungsional; fungsi rangkap/ ganda
multimember constituency	wilayah pemilihan banyak wakil
multi-member district	distrik wakil ganda
multi-member system	sistem banyak wakil
multinationality	kebangsaan rangkap
multi-party system	sistem multipartai/banyak partai
multiple party system	sistem partai ganda
municipal government	pemerintahan kota

N

nation	bangsa
nation state	negara bangsa
national	nasional
national chairman	ketua umum
national committee	panitia umum
national convention	musyawarah/kongres nasional
national government	pemerintahan nasional
national integrity	keutuhan/integritas bangsa
national interest	kepentingan nasional
national liberation	pembebasan nasional
nasionalization	nasionalisasi; penasionalan
nationalist	nasionalis
nationality	kebangsaan; kenasionalan
nationhood	kehidupan berbangsa
nation-state	negara-bangsa
naturalization	pewarganegaraan
Nazism (National Socialism)	Nazisme
negative campaign	kampanye negatif
neo-colonialism	neokolonialisme
neutral	netral
neutral power	kekuatan netral
neutral territory	wilayah netral
neutralism	netralisme
neutrality	kenetralan; netralitas
neutralization	penetralan; netralisasi
neutralized state	negara ternetralkan

neutralized zone ● non-violence

neutralized zone	zona ternetralkan
night guard state	negara penjaga malam
nobility	kebangsawanan
nominating convention	konvensi pencalonan
nomination	nominasi; pencalonan
non-cooperation movement	gerakan nonkooperasi
non-governmental organisation	organisasi nonpemerintahan
nonpartisan election	pemilihan nonpartisan
non-partisan support	bantuan nonpartisan
nonpartisanism	nonpartisanisme
non-state actor	pejabat bukan pemerintah
non-violence	antikekerasan; tanpa kekerasan

O

official count	penghitungan resmi
oligarchy	oligarki
one-party dominant	dominasi satu partai
one-party system	sistem satu partai
one-way communication	komunikasi searah
open government	pemerintahan terbuka
open primary	primari terbuka
open-ended question	pertanyaan soal terbuka
operation	operasi
opinion poll/opinion survey	jajak pendapat
opportunism	oportunisme
opposition back-bencher	anggota parlemen oposisi
opposition coalition	koalisi oposisi
opposition party	partai oposisi
oppression	penindasan
Organisation of African Unity (OAU)	Organisasi Kesatuan Afrika
organization	organisasi
organization structure	struktur organisasi
orientalism	orientalisme
orthodoxy	ortodoksi
output variables	variabel keluaran
overhead cost	kos <i>overhed</i> /tetap
overlapping jurisdiction	yurisdiksi tumpang tindih
overlapping membership	keanggotaan tumpang tindih
overthrow	penggulingan

P

pacifist
palace revolution
pariah group
parliament
parliamentarian
parliamentarianism
parliamentary constitutionalism
parliamentary democracy
parliamentary draughtsman

parliamentary government
parliamentary privilege
parliamentary select committee
parliamentary supremacy
parochial
parochialism
participant observer
participating democracy
participation observation
participative management
participatory democracy
partisan
partisan election
partisan support
partisanism
partisanship
party

pencinta damai
revolusi istana
kelompok pariah
parlemen
anggota parlemen
parliamentarianisme
konstitusionalisme parlementer
demokrasi parlementer
pembentuk/penyusun undang-undang
parlemen
pemerintahan parlementer
hak istimewa parlementer
panitia pemilihan parlementer
supremasi parlementer
parokial
parokialisme
pengamat terlibat
demokrasi berpartisipasi
pengamatan terlibat
pengelolaan terlibat
demokrasi partisipatoris
partisan; berpihak
pemilihan partisan
dukungan partisan
partisanisme
kepartisanan
partai

party dictatorship • philosophical radical

party dictatorship	kediktatoran partai
party discipline	disiplin partai
party machine	perangkat partai
party organization	organisasi partai
party platform	platform partai
party system	sistem partai
passive resistance	perlawanan pasif
paternalism	paternalisme
paternalistic authoritarianism	otoritarianisme paternalistik
patriarchy	patriarki; patriarkat
patrimonial regime	rezim patrimonial
patriotic	patriotik
patriotic party	partai patriotik
patriotism	patriotisme
patron party	partai patron
patron system	sistem patron
patronage system	sistem partronase
patron-client	patron-klien
peaceful blockade	blokade damai
peaceful coexistence	hidup bersama secara damai
peace-maker	pendamai
peace-treaty	traktat perdamaian
peasant	masyarakat petani
peasant community	komunitas petani
peasant rebellion	pemberontakan petani
peasant society	masyarakat petani
peasantry	kaum tani; kelompok tani
peer group	kelompok setara
penetration	penetrasi
people's front	barisan rakyat
People's Liberation Army (PLA)	Tentara Pembebasan Rakyat
petit bourgeois	borjuis kecil
petticoat government	pemerintahan wanita
petty bourgeois	borjuis bawahan
phenomenology	fenomenologi
philosophical radical	radikal berfalsafah

platform • political charisma

platform
plebiscite
plural society
plural system of voting
pluralization
pluralism
pluralist
pluralistic approach
pluralistic democracy
pluralistic network
plurality
plurality of votes
plurality system
plutocracy
pogrom
polarization
police state
policy determination
political asylum
political acumen
political adventurer
political agenda
political aggrandisement
political agitation
political alienation
political amnesty
political anarchy
political apathy
political attitude
political autonomy
political broker
political bureau
political campaign
political canard
political charisma

platform
plebisit
masyarakat majemuk
sistem pemilihan majemuk
pemajemukan; pluralisasi
pluralisme
pluralis
pendekatan/ancangan pluralistis
demokrasi pluralistis
jaringan pluralistis
kemajemukan
pluralitas suara
sistem pluralitas/majemuk/distrik
plutokrasi
pogrom
polarisasi
negara kepolisian
penentuan kebijakan
suaka politik
kelihaihan politik
petualang politik
agenda politik
peluasan politik
agitasi politik
alinasi/keterasingan politik
amnesti politik
anarki politik
apati politik
sikap politik
otonomi politik
pialang politik
biro politik
kampanye politik
pemalsuan politik
karisma politik

political cleavage • political order

political cleavage	pembelahan politik
political coalition	koalisi politik
political community	komunitas politik
political conservatism	konservatisme politik
political conservative	ahli politik konservatif
political convention	kongres/musyawaharah politik
political corruption	korupsi politik
political crisis	krisis politik
political culture	budaya politik
political decay	kebobrokan politik
political decentralization	desentralisasi politik
political development	pembangunan/kemajuan politik
political dispute	perbalahan/pertikaian politik
political dynasty	dinasti politik
political elite	elite politik
political equilibrium	keseimbangan politik
political framework	kerangka politik
political freedom	kebebasan politik
political heritage	warisan politik
political idealism	idealisme politik
political ideology	ideologi politik
political influence	pengaruh politik
political integration	integrasi politik
political interest	kepentingan politik
political legitimacy	legitimasi/keabsahan politik
political linkage	keterpautan politik
political liquidation	penghapusan politik
political machinery	mesin perpolitikan
political mandate	mandat politik
political mobilization	mobilisasi politik
political mobility	mobilitas politik
political morality	moralitas politik
political neutrality	netralitas/kenetralan politik
political opposition	oposisi politik
political order	tatanan politik

political organization • polling booth

political organization	organisasi politik
political outcomes	putusan/keluaran politik
political participation	peran serta/partisipasi politik
political party	partai politik
political patronage	patronase/pelindungan politik
political philosophy	falsafah politik
political pressure	tekanan politik
political process	proses politik
political prophesy	ramalan politik
political recruitment	rekrutmen politik
political reform	reformasi/pembaruan politik
political rivalry	persaingan politik
political satire	satire politik
political science	ilmu politik
political separation	pemisahan politik
political significance	ketermaknaan politik
political skill	kepiawaian politis
political socialization	sosialisasi/pemasyarakatan politik
political sovereignty	kedaulatan politik
political stratum	strata politik
political structure	struktur politik
political testament	wasiat politik
political theorist	pakar/ahli teori politik
political theory	teori politik
political thought	pemikiran politik
political treatise	risalah politik
political unification	penyatuan politik
political will	kemauan politik
political worker	pekerja politik
politicization	politisasi; pemolitikan
politicize	mempolitikkan
polity	masyarakat berpemerintahan; negara; politi
poll	pungutan suara
pollbook	daftar pemilih
polling booth	bilik pemungutan suara

polling district • princely capital

polling district	daerah pengundian
polls; polling station; polling place	tempat pemungutan suara; TPS
pollster	pengumpul suara pemilih
polyarchy	poliarki
polycentrism	polisentrisme
popular front	barisan rakyat
popular mobilisation	mobilisasi rakyat
popular vote	suara rakyat
populist group	kelompok populis
pork-barrel legislation	legislatif pork-barrel
post-industrial society	masyarakat pascaindustri
power	kekuasaan; kekuatan
power broker	pialang kekuasaan
power concentration	pemusatan kekuasaan
power elite	elit kekuasaan
power equalization	penyamaan kekuasaan
power party	partai berkuasa
power politics	politik kekuasaan
power sharing	pembagian kekuasaan
praetor	pretor
praetorian	pretorian
precinct	subdistrik pemilihan
pre-colonial society	masyarakat prakolonial
preferential system	sistem preferensial
preferential voting	pemungutan suara berpreferensi
preliminary convention	pramusyawarah
president-elect	presiden terpilih
presidential democracy	demokrasi presidensial
presidential election	pemilihan presiden
presidential primary	primari presiden
press freedom	kebebasan pers
pressure group	kelompok penekan
presterioika	presterioika
primacy of politics	keunggulan politik
primitive communism	komunisme primitif
princely capital	ibu kota berkerajaan

princely state • puppet regime

princely state	negeri berkerajaan
problemation	pemasalahan
proletarianization	proletarianisasi
proliferation	proliferasi; percambahan
proportional representation	perwakilan proporsional
proportional system	sistem proporsional
protest movement	(per)gerakan protes
protest note	surat/nota protes
provincial estates	estat provinsi
provisional government	pemerintahan sementara
proxy	proksi
proxy vote	suara proksi
proxy voter	pemilih terkuasakan/proksi
proxy voting	pemilihan terkuasakan/proksi
public opinion	opini/pendapat publik
puppet regime	rezim boneka

Q

quasi-federation
quasi-government
quasi-international
quasi-sovereign constituent
quasi-sovereign unit
quid pro quo

kuasi federasi
kuasi pemerintahan
kuasi internasional
pemilih kuasi berkuasa
unit kuasi berkuasa
quid pro quo

R

racial conflict	konflik ras
radical politician	politikus radikal
rationalization	rasionalisasi
rationalism	rasionalisme
reactionary	reaksioner
rebels	pemberontak
recession	kemerosotan; resesi
reciprocity	kesalingan; resiprositas
redistribution of power	redistribusi kekuasaan
reductionism	reduksionisme
reductionist	reduksionis
reductionist theories	teori reduksionis
referendum	referendum
referendum initiative	inisiatif/prakarsa referendum
reformation	reformasi
regency	kabupaten
regime	rezim
regime of terror	rezim peneror
registered voter	pemilih terdaftar
reign	memerintah; berkuasa
representative democracy	demokrasi perwakilan
representative government	pemerintahan perwakilan
repression	penekanan; represi
republic	republik
republican democracy	demokrasi republik
republicanism	republikanisme

residual power • runoff primary

residual power	kekuasaan residual
revisionist	revisonis
revolution	revolusi
revolutionary	revolusioner
right to vote	hak suara
rightist	aliran kanan
roorback	selebaran gelap
rotten borrough	wilayah berhak setara
royalist	pendukung sistem kerajaan
rule	aturan; pemerintahan
rule of law	pemerintahan berdasar hukum
rule of the sword	pemerintahan dengan kekerasan
rules of the game	aturan permainan
ruling dynasty	dinasti pemerintahan
ruling elites	elit penguasa
ruling party	partai berkuasa
running mate	pasangan pencalonan
runoff election	pemilihan penentu
runoff primary	primari penentu

S

safe district	wilayah aman
secession	penarikan diri; sesesi
secessionism	paham penarikan diri
second ballot system	sistem kertas suara kedua
secondary uncertainty	ketakpastian sekunder
secret ballot	pilihan sulit
sectarianism	sektarianisme
sectionalism	seksionalisme
secular state	negara sekular
segregation	pengasingan ras; segregasi
selective mobilization	mobilisasi selektif
self-determination	penentuan nasib sendiri
self-government	pemerintah sendiri
self-rule	pemerintahan sendiri
semanticism	semantisisme
semi-democracy	semidemokrasi
semi-direct democracy	demokrasi semilangsung
separation of power	pemisahan kekuasaan
separatist movement	gerakan separatis
shadow cabinet	kabinet bayangan
sheikhdom	negara kekuasaan syeh
shoestring district	daerah beranggaran kecil
silkstoking district or ward	daerah pemukiman mewah
simple majority vote system	sistem suara mayoritas kecil
single member constituency	pemilihan partai tunggal
single member system	sistem partai tunggal

single party system • state

single party system
single system of voting

single transferable vote system
single-member district
smear campaign
social experimentation
social class theory
social democracy
social environment
social gains
social imperialism
social isolation
social justice
social mobility
social pressure
social sciences
social unrest
socialization
socialist
socialist legality
socialist realism
socialist revolution
socio-economic class
socio-economic development
solicitation
solidarity
social stratum
sovereign
sovereign authority
sovereign power
sovereign ruler
sovereign state
sovereignty
splinter party
state

sistem partai tunggal
sistem pemilihan tunggal atau suara tunggal
sistem pemilihan tunggal berpindah
distrik wakil tunggal; sistem distrik
kampanye kotor
percobaan sosial
teori kelas sosial
demokrasi sosial
lingkungan sosial
keuntungan sosial
imperialisme sosial
pemencilan sosial
keadilan sosial
mobilitas sosial
tekanan sosial
ilmu-ilmu sosial
keresahan sosial
sosialisasi; pemasyarakatan
sosialis
legalitas sosialis
realisme sosialis
revolusi sosialis
kelas sosioekonomi
pembangunan sosioekonomi
solisitasi; pengumpulan
solidaritas
strata sosial
(ber)daulat
otoritas berdaulat
kekuasaan berdaulat
penguasa berdaulat
negara berdaulat
kedaulatan
partai sempalan
negara

state authority • symbol manipulation

state authority	otoritas negara
state building	pembentukan negara
state capitalism	kapitalisme negara
state craft	kiat bernegara
state executive council	dewan eksekutif (negara)
state socialism	sosialisme negara
statehood	kehidupan bernegara
state's policy	kebijakan negara
state's right	hak negara
statesman	negarawan
statistical profile	profil statistis
status quo	status quo
stratification	stratifikasi; pelapisan
stratocracy	stratokrasi
structural functional analysis	analisis fungsional struktural
structural functionalism	fungsionalisme struktural
sub-professional group	kelompok subprofesional
sub-system autonomy	otonomi subsistem
subversive	subversif
succession	pergantian; penggantian; suksesi
succession politics	perpolitikan/kepolitikan suksesi
suffrage	hak pilih
suffragist	pemberi hak pilih
Sultan in Council	Sultan dalam Majelis
super government	pemerintahan adidaya
supranational government	pemerintahan supranasional
supra-nationalism	supranasionalisme
supreme	agung; tertinggi
supreme body	badan/lembaga tertinggi
supreme power	kekuasaan agung/tertinggi
surgical bombing	pengeboman cermat
suzerain state	negara tuan
suzerainty	pertuanan
swing district	daerah beralih
swing vote	suara beralih
symbol manipulation	manipulasi simbol

symbolic output • tyranny of the majority

symbolic output	keluaran simbolis
symbolic resources	sumber daya simbolis
symbolization	simbolisasi; pelambangan
system of government	sistem pemerintahan
technocracy	teknokrasi
territorial integrity	integritas teritorial/wilayah
territorial principality	wilayah kerajaan
terrorism	terorisme
the authorities	para penguasa
the corridor of power	koridor kekuasaan
the silent majority	mayoritas diam
theocracy	teokrasi
think tank	kelompok pemikir
third party	partai ketiga
toryism	toryisme; konservatisme
totalitarian	totaliter
totalitarian government	pemerintahan totaliter
totalitarianism	totalitarianisme
town-meeting democracy	demokrasi kota
transnational	transnasional
treaty	perjanjian
triadic network	jaringan tiga serangkai
tribal politics	perpolitikan kesukuan
tributary state	negeri upeti
triumvirate	tiga serangkai; triumvirat
tryarchy	triarki
tutelage authority	kewenangan/otoritas kewalian
tutelage regime	rezim kewalian
tutelary state	negara penjaga/garda
two-party system	sistem dua partai/bipartai/dwipartai
typology	tipologi
tyranny	tirani
tyranny of the majority	tirani mayoritas

U

ultimatum
ultramontanism
uncommitted voter
unconditional surrender
unconventional war
undecided voter
unitary
utilitarianism
utopian
utopian socialism
utopianism

ultimatum
ultramontanisme
pemilih tak terikat
penyerahan tak bersyarat
perang takkonvensional
pemilih takpasti
unitari
utilitarianisme
kaum utopis
sosialisme utopis
utopianisme

V

value analysis	analisis nilai
value system	sistem nilai
vassalage	jajahan takluk
vassal-state	negara lindungan
vested interest	kepentingan tertanam/terselubung
voluntarism	voluntarisme
voluntary organization	organisasi sukarela
vote of confidence	mosi percaya
vote of no confidence	mosi takpercaya
voting	pemungutan suara; pemilihan
voting booth	bilik (pemungutan) suara
voting machine	mesin pemungutan suara
voting right	hak pilih/suara

W

ward
welfare state
whiggery
Whiggism
window of opportunity
world federalism
world government

daerah pemilihan
negara kesejahteraan
prinsip whiggs
Whiggisme
celah peluang
federalisme dunia
pemerintahan dunia

X

xenophobia

xenofobia

Y

youth movement

gerakan pemuda

Z

zero-sum game
zionism

permainan zero-sum
zionisme

TEORI DAN FILSAFAT POLITIK

A

a priori	a priori
abdication	turun takhta
abrogation	pembatalan
absolute majority	mayoritas mutlak
absolute moral principles	prinsip moral mutlak
absurdity	absurditas
abuse of power	penyalahgunaan/kesewenangan kekuasaan
academic freedom	kebebasan akademik
accommodation	akomodasi
accord	persetujuan
accountability	kebertanggungjawaban; akuntabilitas
acculturation	akulturasi
Achilles' heel	tumit Achilles
acquiescence	akuisens
action-coordinating capacity of language	kemampuan koordinasi tindakan bahasa
additional member system	sistem anggota/ahli tambahan
adjournment	penangguhan
administrator leader	administrator
agitprop	agitasi propaganda
ahimsa	ahimsa
ahistorical	ahistoris
al-risalat	risalah
alternative future	masa depan alternatif
Althusserian	pengikut Althusser; Althusserian
altruism	altruisme

amendment • anti-trust laws

amendment	amandemen
amendment of the constitution	amandemen perlembagaan
amnesty	amnesti
analytical construct	pembangunan analitis
analytical framework	kerangka analitis
ananiah	individualistik; ananiah
anarchic order	tatanan anarkik
anarcho-capitalism	anarkokapitalisme
anarcho-syndicalism	anarkosindikalisme
anarcho-syndicalist commune	komune anarkosindikalis
anchoring bias	bias sauh
ancient Greece	Yunani/Greece kuno
ancient regime	rezim lama
ancient world	dunia kuno
androgynous society	masyarakat androgen
annexation	penggabungan paksa; aneksasi
anomaly	anomali; penyimpangan
anomic group	kelompok anomik
anomic interest groups	kelompok kepentingan anomik
anthropocentrism	antroposentrisme
anti-clerical	antikerikal
anti-clericalism	faham antiklerikal; antiklerikalisme
anti-colonialism	faham antikolonialis; antikolonialisme
anti-Communism	faham antikomunis; antikomunisme
anti-essentialism	faham antiesensialis; antiesensialisme
anti-foundationalism	faham antifundasionalis; antifundasi- onalisme
anti-fundamentalism	faham antifundamentalis; antifundamen- talisme
antinomy	faham antinomi
anti-politics	faham antipolitik
anti-quarianism	faham antikuarianisme
antiracism	faham antirasis; antirasisme
anti-Semitism	faham anti-Yuhdi; anti-Semitisme
anti-trust laws	undang-undang antimonopoli

anti-Westernism • Athenian democracy

anti-Westernism	faham anti-Barat; faham anti-Westernisme
aparatchiki	kaki tangan/aparatur kerajaan
apartheid	apartheid
A'qli	nalar
arbitration	arbitrasi
asabiyya	sukuisme
Asiatic despotism	faham Despotik Asia
atheism	atheisme
Athenian democracy	demokrasi Athena

B

Ba'athism
bai'ah
balance of power
balkanization
bipolarity
Bonapartism
bourgeoisie democracy

Ba'athism
pengakuan
keseimbangan kekuasaan
Balkanisasi
bipolaritas; kedwikutuban
faham Bonaparte/Bonapartisme
demokrasi borjuis

C

Calvinism	faham Calvin/Calvinisme
catastrophe theory	teori bencana
Catholicism	faham Katolik/Katolikisme
centre-left	kiri tengah
centre-right	kanan tengah
centrifugal democracy	demokrasi sentrifugal
centripetal democracy	demokrasi sentripetal
chaos theory	teori kekacauan
charismatic	karismatik
charismatic authority	otoritas karismatik/karismatikisme
charismatic leadership	kepemimpinan karismatik
charismatic legitimacy	legitimasi karismatik
chauvinism	chauvinisme; faham kebangsaan sempit
chauvinist nationalism	nationalisme chauvinistik
Chicago school	aliran/mazhab Chicago
citizen	warga negara
citizenship	kewarganegaraan/kerakyatan
city-state	negara kota
civil disobedience	pembangkangan sipil
civil obedience	pembangkang sipil
compromise	kompromi/kata sepakat
confucialism	konfusialisme/faham khonghucu
consensus	kesepakatan/konsensus
conservatism	konservatisme/faham konservatif
constitution	konstitusi/undang-undang dasar
constitutional theory	teori konstitusional

constitutionalism • critical theory

constitutionalism
control theory
corporate power
corporatism
critical realism
critical theory

konstitusionalisme
teori kontrol/teori pengawasan
kekuasaan korporat
korporatisme
realisme kritikal
teori kritikal

D

de facto government	pemerintah de facto
declaration of right	deklarasi hak asasi
deconcentration	dekonsentrasi
deconstruction	dekonstruksi
deconstructionism	dekonstruksionisme
dehumanization	dehumanisasi
delegate	delegasi
delegated authority	kewenangan/otoritas terdelegasi
delegation of authority	delegasi kewenangan/otoritas
delegation of power	delegasi kekuasaan
democratic despotism	demokrasi despotisme/faham demokrasi despotik
democratic elitism	elitisme demokratik/faham demokrasi elitis
democratization	demokratisasi
dependency	ketergantungan/dependensia
dependency theory	teori ketergantungan/depedensia
depoliticisation	depolitisiasi
deprived group	kelompok terdeprivasi
determinism	determinisme
determinist theory	teori deterministik
developmental democracy	demokrasi pembangunan
developmentalism	faham pembangunan/developmental- isme
devolution of authority	devolusi kewenangan/otoritas
dictatorship of proletariat	kediktatoran proletariat
divine authority	kewenangan/otoritas ketuhanan

divine king • due process

divine king

divine law

divine rights

divine rule

division of power

doctrinaire

separation of powers

due process

divine king

hukum ketuhanan

hak ketuhanan

aturan ketuhanan

pembagian kekuasaan

doktriner

pemisahan kekuasaan

proses pengadilan jujur; proses pengadilan terbuka

E

elitism
emancipation
emancipatory interest
emancipatory rationalization
emir
emirate
empirical political theory
empirical theory
empiricism
empiricist
enlightment
environment
environmental protection
environmentalism
existentialism

elitisme
emansipasi
kepentingan emansipasi
rasionalisasi emansipasi
emir
amiriat
teori politik empiris
teori empiris
empirisisme
empiris/empirikis
zaman pencerahan
persekitaran lingkungan hidup
proteksi lingkungan hidup
environmentalisme
eksistensialisme

F

Fabian socialism

falsification

fascism

federalism

federalization

feminism

feminist

fifth column

filibuster

Frankfurt school

free masonry

fundamentalism

fundamental rights

fundamentalist

fuqaha

sosialisme Fabian

falsifikasi

fasisme/faham fasis

federalisme

federalisasi

feminisme

feminis

kolum kelima

filibuster

aliran pemikiran Frankfurt; mazhab
Frankfurt

free masonry

fundamentalisme

hak asasi

fundamentalis

ahli fiqih

G

gaullism
gayism
Gemeinschaft

gender bias
gender theory
Gesellschaft
globalization
globalism
gradualism
guided democracy
guild socialism

faham de Gaule; gaulisme
gayisme
komunitas; Gemeinschaft; masyarakat
paguyuban
bias gender
teori gender
masyarakat patembayan; *gesellschaft*
globalisasi; kesejagatan
faham global/kesejagatan
gradualisme
demokrasi terpimpin
sosialisme gilder

H

Hambali school of thought
Hanafi school of thought
hedonism
Hegelian
Helenistic
hermeneutics
hydraulic despotism
humanism
humanitarian intervention
humanity

mazhab Hambali
mazhab Hanafi
hedonisme
Hegelian
Helenistik
hermeneutika
despotisme hidraulik
humanisme
campur tangan kemanusiaan
kemanusiaan

I

iconoclastic	ikonoklastik
iconoclasticism	faham ikonoklas; ikonoklastiksme
idealism	idealisme
idealization	idealisasi
ijtihad	ijtihad
imam	imam
incrementalism	inkrementalisme
independent variables	peubah/variabel bebas
individualism	individualisme
integration	integrasi
internationalism	internasionalisme
intervention	campur tangan; intervensi
interventionism	intervensionisme
invisible hand	invisible hand
iron law of oligarchy	hukum besi oligarki
irrationalism	irasionalisme
irredentis movement	gerakan iredentis
Islamic fundamentalism	fundamentalisme Islam

J

jama'iyya
Jen
Judaism
judicial review

jamaah
zen
agama Yahudi; Yudaisme
tinjauan pengadilan; *judicial review*

K

Kantian
Kemalism
keynesianism
Krishnaism
Kshatriya
Kuhnian

Kantian; penganut Kant
pemikiran kemal attratu
keynesianisme
faham Krishna
kesatria
Kuhnian; penganut Kuhn

L

labour union	serikat buruh
land locked country	negara tak berpantai
landslide factory	kemenangan telak
legal sovereignty	supremasi hukum
legalistic	legalistik
legality	legalitas; kesahan
legislator	legislator
legitimate government	pemerintah berkeabsahan
legitimation	pengabsahan
legitimation crisis	krisis pengabsahan/legitimasi
Leninism	Leninisme
Leninist	Leninis
lesbianism	lesbianisme
leviathan	leviathan
liasion	perantara
liberal	liberal
liberal feminism	feminisme liberal
liberal feminist	feminis liberal
liberal reformer	reformis liberal
liberal socialism	sosialisme liberal
libertarianism	libertarianisme
liberty	kebebasan
limited government	pemerintah terbatas
limited voting system	sistem pilih suara terbatas
lobby	lobi
lobbying	melobi
local democracy	demokrasi lokal

logical positivism • Lutheranism

logical positivism
Lutheranism

positivisme logis
Lutheranisme

M

Machiavellian	Machiavellian; penganut Machiavelli
machiavellianism	machiavellanisme
madani	madani
Mahathir school of thought	mazhab Mahathir
majority rule	pemerintahan mayoritas
Maliki school of thought	mazhab Maliki
marhaenism	marhaenisme
masculinism	maskulinisme
masculinity	maskulinitas
McCarthyism	Mc Carthyisme
Melayu Islam Beraja	Melayu Islam Beraja
memorandum of understanding	memorandum persefahaman
memorandum of agreement	memorandum perjanjian
messiah	ratu adil
messianism	mesianisme; konsep ratu adil
micro-state	negara mikro; <i>micro-state</i>
military industrial complex	kompleks industri militer
militia	milisi
minority rights	hak minoritas
minority rule	pemerintahan minoritas
modernism	modernisme
modernity	modernitas
modernization	modernisasi
modus operandi	modus operandi
modus vivendi	modus vivendi
molism	molisme

monarchical government • martyr

monarchical government

pemerintahan monarki; pemerintah
kerajaan

monarchism

monarkisme

monism

monisme

monotheism

monotheisme

musta'birin

mustabirin; majlis ulama

musyawarah

musyawarah

martyr

martir; syuhada

N

Naqli	dalil nas
nation	bangsa
national catastrophic	bencana nasional
national character	karakter nasional
national credo	kredo nasional; keyakinan nasional
national front	front nasional
national identity	identitas nasional; jati diri bangsa
national socialism	sosialisme nasional
nationalism	faham kebangsaan; nasionalisme
natural authority	otoritas alami
natural law	hukum alam
natural rights	hak-hak asli
naturalism	naturalisme
natural philosophe	fasafah alamiah
nazism	nazisme
neo-collonialism	neokolenialisme
neo-conservatism	neokonservatisme
neo-marxist	neomarxis
neoculism	neokulisme
nepotism	nepotisme
new institutionalism	institusionalisme baru
New International Economic Order	tata ekonomi internasional baru
new social movement	gerakan sosial baru
new-left	kiri baru
new-right	kanan baru
nihilism	nihilisme

noblesse oblige • normative theory

noblesse oblige
non-partisan
nonstructuralist theory
non-violent resistance
normative theory

noblesse oblige
nonpartisan
teori nonstrukturalis
resistensi nirkekerasan
teori normatif

O

ombudsman
open door policy
open government
open society
order-in-council
original sin

ombudsman; pengawas
kebijakan pintu terbuka
pemerintahan terbuka
masyarakat terbuka
titah baginda
dosa asal

P

political oportunist	oportunis politik
pacifism	pasifisme
Pancasila	Pancasila
paradim shift	pergeseran paradigma
paradox of freedom	paradoks kebebasan
political dissent	ketaksepakatan politik
political paranoid	paranoid politik
Pariah	Paria
parliamentary government	pemerintahan parlementer
parliamentary sovereignty	kedaulatan parlemen
parliamentary system	sistem parlementer
patrician	bangsawan
patriot	patriot
patronage	patronase
patron-client relations	hubungan patron-klien
peacemaking	pembuatan perdamaian
people power	kekuatan rakyat
people's free choice	pilihan bebas rakyat
persona non-grata	persona non-grata
personal party	parti personal
personalism	personalisme; kebebasan pribadi
petition	petisi
philosopher-king	raja filsuf
philosophical radicalism	radikalisme filosofis
political philosophy	falsafah politik
pilarization	pengelompokan
plebiscitary democracy	demokrasi plebisit

plural society • political myth

plural society	masyarakat mejemuk
pluralism	pluralisme
pluralist democracy	demokrasi pluralis
pluralist theory	teori pluralis
plutocracy	plutokrasi
polyarchy	poliarki
polis	polis; negara kota
politic engineering	rekayasa politik
political thinking	pemikiran politik
political access	akses politik
political action	tindakan politik
political analysis	analisis politik
political authority	kewenangan/otoritas politik
political business cycle	siklus bisnis politik
political capital	modal politik
political censorship	penapisan politik
political censure	sensor/tapisan politik
political change	perubahan politik
political cohabitation	kohabitasi politik
political concents	persetujuan politik
political consultant	penasihat/konsultan politik
political correctness	pengoreksian politik
political cost	ongkos politik
political economy	ekonomi politik
political efficacy	kemanjuran politik
political emancipation	emansipasi politik
political ethics	etika politik
political idea	cita/ide politik
political integration	integrasi politik
political knowledge	pengetahuan politik
political language	bahasa politik
political leader	pemimpin politik
political leadership	kepemimpinan politik
political life	kehidupan politik
political machine	mesin politik
political myth	mitos politik

political nationalism • power of command

political nationalism	nasionalisme politik
political obligation	keajiban/obligasi politik
political precedent	preseden politik
political problem	masalah politik
political radicalism	radikalisme politik
political realism	realisme politik
political refugee	pelarian politik
political rehabilitation	rehabilitasi politik
political rights	hak-hak politik
political society	masyarakat politik
political sociology	sosiologi politik
political stratification	stratifikasi politik
political cynicism	sinisisme politik
political value	nilai politik
political violence	'kekerasan politik
politics of difference	politik perbedaan
politics of identity	politik jadi diri/identitas
polytheism	politheisme
post-behavioralism	pascaperilaku
post-colonial theory	teori pascakolonial
posteriori	<i>posteriori</i>
post-materialism	pascamaterialisme
post-modern	pascastruktural
post-modernism	pascastrukturalisme
post-modernism feminist	feminis pascamodernisme
post-power accountability	akuntabilitas pascakekuasaan; keber- tanggungjawaban; pascakekuasaan
post-power-syndrome	sindrom pascakekuasaan
post-structural	pascamodern
post-structuralism	pascamodernisme
post-traditional society	masyarakat pascatradisional
post-war circle	siklus pascaperang
poverty of democracy	kemiskinan demokrasi
power block	blok kekuasaan
power of language	kekuasaan bahasa
power of command	kekuasaan komando

primary election • puritanism

primary election

pemilihan umum pendahuluan/per-
tama

Prime Minister

Perdana Menteri

Prime Minister's Office

Kantor Perdana Menteri

protestant ethic

etika protestan

protestant work ethic

etika kerja protestan

protestantism

protestanisme

public interest

kepentingan publik

public of opinion

pendapat umum/publik; opini publik

public sphere

lingkungan umum/publik; ruang publik

puritan ethics

etika puritan

puritanism

puritanisme

Q

Qadieni
qisas

Qadieni
qisas



S

shar'i laws

hukum syariah

**PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**